

# BAMSOET DORONG PENINGKATAN KERJASAMA HAJI INDONESIA-ARAB SAUDI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.03/TH.XVII/MARET 2023



## MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PEMBENTUKAN UU TENTANG MPR RI

# Sudah Saatnya MPR RI Berkinerja Dengan Undang-Undang Tersendiri

ISSN 0854-6371



**06** Refleksi  
Butuh Haluan Negara untuk  
Wujudkan Indonesia Emas 2045

**16** Nasional  
Pergantian Antar Waktu  
Anggota MPR RI

**39** Selingan  
Baragam Budaya  
Menyambut Bulan Puasa

**50** Sosialisasi  
Seminar Nasional 'Urgensi  
Pendidikan Tinggi' di Papua



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



# Daftar Isi

EDISI NO.03/TH.XVII/MARET 2023



## 08 BERITA UTAMA

### Pembentukan UU Tentang MPR RI

Sudah saatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dengan satu undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang tentang MPR. Dengan undang-undang ini maka kewenangan, tugas pokok, dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat.



## 16 Nasional

### Pergantian Antar Waktu Anggota MPR RI



## 50 Sosialisasi

### Seminar Nasional 'Urgensi Pendidikan Tinggi' di Papua



## 39 SELINGAN

### Menyambut Bulan Puasa



## 78 Profil

### Sri Wulan

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Pengantar Redaksi .....     | 04 |
| Perspektif .....            | 06 |
| Kolom .....                 | 34 |
| Aspirasi Masyarakat .....   | 47 |
| Gema Pancasila .....        | 48 |
| Varia MPR .....             | 68 |
| Wawancara .....             | 70 |
| Figur .....                 | 74 |
| Ragam .....                 | 76 |
| Dari Rumah Kebangsaan ..... | 82 |
| Rehal .....                 | 84 |



## COVER

Edisi No.03/TH.XVII/Maret 2023

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

## Tentang Perlunya UU Tentang MPR

**S**ELAMA ini kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, belakangan Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, MPR perlu diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu UU tentang MPR.

Dalam Rapat Pimpinan MPR yang digelar pada Jumat, 20 Januari 2023, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menyebutkan Rapim memberikan amanah kepada Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani sebagai koordinator dalam menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR. Dengan demikian, ke depan, keberadaan lebih lanjut mengenai wewenang, tugas, dan fungsi MPR diatur dalam undang-undang tersendiri. Bahkan, seharusnya DPR dan DPD, masing-masing juga memiliki undang-undang tersendiri.

Bamsoet mengulangi lagi soal Undang-Undang tentang MPR dalam Rapim pada Senin, 27 Februari 2023. Rapim yang dihadiri para Wakil Ketua MPR, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, saat itu membahas tentang perlunya MPR mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (*beschikking*) tentang pelantikan presiden dan wakil presiden pemenang Pemilu. Selama ini, dokumen pelantikan presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna MPR hanya berupa berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja.

Untuk mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat *beschikking* dan mekanisme tata cara pelantikan presiden dan wakil presiden maka diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam UU tentang MPR dan Tata Tertib MPR. Karena itu, Rapim menugaskan Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk merumuskan dan menyusun RUU tentang MPR dan Tata Tertib MPR. Bahkan, Rapim menargetkan penyusunan RUU tentang MPR itu diharapkan rampung dalam waktu 6 bulan.

Sebenarnya, rencana pengaturan lembaga MPR dalam undang-undang tersendiri sudah bergulir sejak 2018-2019. Malah MPR sudah membuat naskah akademik untuk menjadi dasar penyusunan undang-undang tersebut. Pada tahun 2017, Badan Pengkajian MPR telah menerbitkan sebuah buku berjudul "Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR" yang berisi himpunan pemikiran mengenai urgensi dan analisis perlunya pembentukan UU tentang MPR.

Sebagai sebuah lembaga kedaulatan rakyat, MPR memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting. Terkait dengan penguatan tugas dan kewenangan konstitusionalnya maka sudah sepantasnya apabila MPR diatur secara lebih khusus dalam undang-undang tersendiri. Dengan kata lain, memang perlu instrument atau perangkat hukum dalam bentuk undang-undang sebagai payung hukum yang mendukung pelaksanaan dan tugas konstitusi MPR.

Dengan pembentukan UU tentang MPR maka kewenangan, tugas pokok, dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat. UU tentang MPR akan mengatur banyak hal yang selama ini belum diatur dalam UU MD3. Sekadar menyebutkan, misalnya, tentang mekanisme pelantikan presiden dan wakil presiden, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis, Sidang Tahunan MPR, eksistensi Pimpinan MPR melalui Ketetapan MPR, dan sebagainya.

Tentu, langkah awal untuk pembentukan UU tentang MPR adalah menyusun kajian dan naskah akademik. Jika sudah ada kajian naskah akademik penyusunan RUU tentang MPR, maka naskah akademik itu bisa segera disosialisasikan ke semua anggota MPR dan pihak lainnya, seperti pemerintah, pakar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya, untuk mendapatkan masukan melalui berbagai kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Dengar Pendapat Masyarakat (DPM), atau Aspirasi Masyarakat (Asmas). □



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### DEWAN REDAKSI

Dyastasita, Heri Herawan,  
Maifrizal

### REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

### KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

### REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,  
Slamet Eko Suprayitno

### REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,  
Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,  
Alfonso DK Tahapary

### FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,  
Restu, Suprianto, Faridz Rizky,  
Wira, Subhan

### PENANGGUNG JAWAB/

### KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

### STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,  
Achmad Farobi,  
Widya Permataningrum

### SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

### TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,  
Derry Irawan, M. Budiono

### ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan  
Sistem Informasi,  
Sekretariat Jenderal MPR-RI  
Gedung Nusantara III, Lt. 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,  
Senayan, Jakarta 10270.  
Telp. (021) 57895237, 57895238,  
57895251 Fax.: (021) 57895237  
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



### Buku Digital MPR RI



**MUDAH DI AKSES  
EFEKTIF & EFISIEN**

**MAJALAH MAJELIS, JURNAL,  
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN  
MPR RI DALAM GADGET ANDA**



**“ Segera  
Unduh  
Aplikasinya !**

**DI PLAY STORE**  
<http://bit.ly/bukudigitalmpri>

**MPR.GO.ID**      **@MPRG0ID**



## Butuh Halauan Negara untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

**P**ROFIL Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika semua target dan peta jalan (road map) yang sudah dirancang dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten. Target dan peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah intisari dari halauan negara untuk lebih dari dua dekade ke depan. Maka, kehendak mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu layak dipayungi dengan Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN), agar setiap administrasi pemerintahan pusat maupun daerah patuh dan konsisten melaksanakan peta jalan yang sudah disepakati seluruh elemen bangsa.

Indonesia genap berusia satu abad pada tahun 2045, mengacu pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Layak dan pantas menjadikan momentum seratus tahun usia kemerdekaan itu untuk melihat lagi apa yang sudah dicapai saat ini, dan apa yang ingin diwujudkan dalam dua dekade mendatang. Dari momentum satu abad usia kemerdekaan itu lahir wacana dan gagasan mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Memang, harus dimunculkan sebuah tekad yang spesial untuk menandai momentum itu. Terutama, karena menuju era 2040-an itu Indonesia mengalami bonus demografi. Pada dasawarsa itu penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun ke atas). Proporsi usia produktif lebih 60% dari total penduduk Indonesia saat itu. Maka, demi hari depan anak-cucu yang lebih baik, generasi orang tua masa kini terpanggil untuk menyiapkan segala sesuatunya agar pada waktunya nanti komunitas usia produktif itu tidak menjadi beban negara.

Apa yang ingin dicapai 20 tahun ke depan sudah dirancang dan sudah dituangkan menjadi beberapa kebijakan. Target-target yang ditetapkan pada 2045 itu selayaknya memacu semangat dan motivasi komunitas orang muda, terutama remaja dan anak-anak. Sebab, profil Indonesia Emas 2045 menargetkan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata, dengan kualitas

sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni seturut kebutuhan zaman. Dari aspek perekonomian negara, Indonesia ditargetkan sejajar negara maju, bahkan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Peta jalan atau proses mewujudkan Indonesia Emas 2045 berfokus pada empat pilar pembangunan, meliputi pembangunan manusia demi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Setiap pilar memuat ragam agenda pembangunan, dari pendidikan hingga politik luar negeri. Ragam agenda pembangunan itu harus dilaksanakan, bahkan diupayakan untuk dipercepat agar bisa direalisasikan seluruhnya pada tahun 2045.

Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang sudah ditetapkan sekarang ini otomatis menjadi penunjuk arah atau haluan negara. Sebagai pijakan pembangunan nasional, halauan negara itu pun menetapkan target pencapaian pembangunan nasional sepanjang dua dekade ke depan. Sebutlah peta jalan Indonesia Emas itu sebagai rencana strategis negara-bangsa membangun dirinya karena ingin menyongsong masa depan yang lebih baik.

Tentu saja semua perencanaan itu baik adanya. Namun, manakala administrasi pemerintahan berganti pada waktunya nanti, adakah jaminan bahwa semua perencanaan dalam peta jalan Indonesia Emas 2045 itu akan diterima, dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten? Inilah tantangannya.

Sesuai konstitusi, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini akan mengakhiri masa bhakti menjelang akhir 2024. Gagasan Indonesia 2045 itu diinisiasi oleh pemerintahan sekarang, dan segala sesuatunya masih sebatas gagasan dan konsep. Apakah administrasi pemerintahan baru nantinya berkenan menerima dan melaksanakan peta jalan dan sejumlah agenda prioritas pembangunan untuk mewujudkan profil

## H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



Indonesia Emas 2045 itu? Kemungkinan untuk menyederhanakan atau mengeliminasi peta jalan menuju 2045 itu sangat terbuka, terutama jika pemerintahan baru nantinya menawarkan gagasan atau inisiatif lain.

Pada aspek politik pembangunan, Presiden Jokowi dan kabinetnya telah menerapkan kebijakan baru berupa penghentian ekspor bahan mentah beberapa komoditas sumber daya mineral, seperti nikel, bauksit hingga tembaga. Kebijakan penghentian ekspor itu kemudian ditindaklanjuti dengan mendorong program hilirisasi sumber daya mineral untuk menghasilkan produk atau barang setengah jadi. Dengan hilirisasi itu, nilai tambah yang diperoleh negara menjadi lebih besar dan menciptakan banyak lapangan kerja di dalam negeri. Hilirisasi nikel yang dimulai pada 2020 sudah menunjukkan hasil yang signifikan.

Maka, hilirisasi sumber daya mineral yang telah dimulai sekarang ini hendaknya dipahami sebagai strategi atau langkah awal dari peta jalan mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu. Kendati mendapatkan banyak perlawanan dari sejumlah negara, presiden bersama kabinetnya tetap bersikukuh mempertahankan politik dan kebijakan pembangunan yang diterapkan sekarang ini.

Hingga berakhirnya masa bhakti di penghujung tahun 2024, Presiden Jokowi dan kabinetnya diyakini tidak akan mengubah kebijakan dan program hilirisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan politik dan kebijakan pembangunan pemerintah baru nantinya? Berharap saja bahwa program hilirisasi

untuk mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 dilanjutkan.

Namun, ada yang pasti bahwa kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah beberapa komoditas sumber daya mineral itu menyimpan banyak godaan. Sejumlah negara yang sebelumnya menikmati hasil besar berkat ekspor nikel atau bauksit dari Indonesia tentu akan melakukan pendekatan baru kepada pemerintah baru di Indonesia setelah berakhirnya masa bhakti Presiden Jokowi. Sangat mungkin bahwa pemerintahan baru nantinya akan dirayu dan didorong untuk membuka kembali kran ekspor bahan mentah nikel dan bauksit.

Itu sebabnya, dan juga sangat beralasan ketika dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi pernah mengemukakan harapannya agar penghentian ekspor bahan mentah nikel dan bauksit dipertahankan dan dilanjutkan oleh sosok presiden yang akan menggantikannya kelak. Politik dan kebijakan pembangunan pemerintahan baru nanti hendaknya tetap berorientasi pada kepentingan strategis negara-bangsa, khususnya mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Target dan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah intisari dari haluan negara untuk lebih dari dua dekade ke depan. Agar peta jalan itu dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten oleh setiap administrasi pemerintahan pusat maupun daerah, kehendak mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu layak dipayungi dengan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai cerminan dari kesepakatan seluruh elemen bangsa. □

## Pembentukan UU Tentang MPR

# Sudah Saatnya MPR Berkinerja Dengan Undang-Undang Tersendiri



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sudah saatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dengan satu undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang tentang MPR. Dengan undang-undang ini maka kewenangan, tugas pokok, dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat.

UNTUK kedua kali dalam Rapat Pimpinan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan perlunya MPR mempunyai undang-undang tersendiri, yaitu UU tentang MPR. Pada Rapat Pimpinan MPR yang digelar pada Senin, 27 Februari 2023, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, kembali mengulangi rencana pembentukan undang-undang tentang MPR. Dalam Rapim itu, Bamsoet mengungkapkan, undang-undang MPR itu akan mengatur tentang Ketetapan MPR bersifat *beschikking* (penetapan), salah satunya tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

Selama ini, MPR melaksanakan wewenang melantik presiden dan/atau wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden". Untuk melaksanakan pelantikan presiden dan/atau wakil presiden itu, MPR menggelar Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober. Dalam Sidang Paripurna MPR itu, di depan Pimpinan MPR dan di bawah sumpah yang dipandu Ketua Mahkamah Agung, dilaksanakan pelantikan presiden dan/wakil presiden hasil pemilihan umum. Dokumen pelantikan presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan lima tahun di depan Sidang Paripurna MPR itu hanya dalam bentuk Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Rapat Pimpinan MPR, Bamsoet mengutip hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR terkait pelantikan presiden dan/

atau wakil presiden. Hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR tersebut adalah sebagai pelaksanaan wewenang melantik presiden dan/atau wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka MPR perlu mengeluarkan Ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*) tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu Sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan.

"Sehingga presiden dan/atau wakil presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja," kata Bamsoet usai Rapim MPR yang dihadiri Pimpinan MPR lainnya, yaitu Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Bamsoet melanjutkan, untuk merealisasikan adanya Ketetapan MPR yang bersifat *beschikking* maka diperlukan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang (UU) tentang MPR dan Peraturan Tata Tertib MPR. Bamsoet pun telah meminta Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk merumuskan dan menyusun pembentukan UU tentang MPR. "Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan akan merumuskan dan menyusun pembentukan Undang-Undang tentang MPR. Kita menargetkan dalam enam bulan ke depan sudah selesai," katanya.





Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan yang digelar pada Jumat, 20 Januari 2023, Bamsoet juga mengungkapkan bahwa Rapat Pimpinan MPR memberikan amanah kepada Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani sebagai koordinator dalam menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR. Dengan adanya UU tentang MPR maka ke depan keberadaan lebih lanjut mengenai wewenang, tugas pokok, dan fungsi MPR diatur dengan UU tersendiri sehingga tidak lagi bergabung dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Bahkan, Bamsoet mengemukakan, seharusnya DPR RI dan DPD RI masing-masing juga memiliki undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga perwakilan tersebut. Sehingga pada akhirnya ketiga lembaga legislatif, yakni MPR, DPR, dan DPD memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang tugas dan fungsinya, tidak lagi bergabung dalam UU MD3 seperti sekarang ini. Seperti diketahui, pengaturan kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur melalui UU No. 13 Tahun 2019

tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Jauh sebelumnya, pada Oktober 2022, Bamsoet sebenarnya sudah melempar usulan pembentukan undang-undang tentang MPR. Dalam keterangan tertulis pada Senin, 10 Oktober 2022, Bamsoet sudah menyebut perlunya pengaturan tiga lembaga negara (MPR, DPR, DPD) melalui undang-undang tersendiri. Usulan pengaturan ketiga lembaga itu sebenarnya sudah bergulir sejak 2018-2019. Malah, Bamsoet menyebut, sudah ada naskah akademik pembentukan UU tentang MPR.

### **Amanah Konstitusi**

Menurut Bamsoet, pemisahan undang-undang lembaga perwakilan rakyat merupakan amanah dari konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Dia menunjuk Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan

diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Begitu pula dengan DPR yang diatur dalam Pasal 19 UUD NRI Tahun 1945. Sementara DPD diatur dalam Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, konstitusi secara tidak langsung mengamankan agar ketiga lembaga negara itu diatur lebih lanjut dalam UU.

Dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penggunaan frasa 'diatur dengan undang-undang' dalam rumusan pasal atau ayat menekankan bahwa pengaturan tersebut memerlukan adanya UU tersendiri. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945 dapat diartikan diperlukan adanya UU tersendiri yang mengatur tentang MPR, DPR, dan DPD.

Pendapat senada juga dikemukakan Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Dia mengungkapkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah saatnya diatur dengan satu undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang tentang MPR. Dengan undang-undang ini maka



kewenangan, tugas pokok, dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat.

“Saya pikir MPR memang perlu memiliki undang-undang tersendiri atau UU khusus tentang MPR. Karena itu, kita sedang mengupayakan penyusunan rancangan undang-undang tentang MPR,” kata Sjarifuddin Hasan kepada *Majelis*.

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menjelaskan, dengan pembentukan UU tentang MPR ini maka MPR akan diatur dengan UU tersendiri, dan tidak lagi masuk atau diatur dalam UU MD3 seperti saat ini. Kewenangan, tugas, dan fungsi MPR memang telah diatur dalam UU MD3 (UU No. 17 tahun 2014, yang telah beberapa kali direvisi, terakhir UU No. 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 tahun 2014). Namun, hanya beberapa pasal saja yang mengatur tentang MPR. Sebaliknya, UU MD3 mengatur secara lengkap tentang DPR dan DPD.

Menurut Syarief Hasan, UU MD3 belum mengatur banyak hal tentang MPR, seperti alat-alat kelengkapan di MPR. “Misalnya, kita ingin membentuk Badan Kehormatan MPR, atau lainnya memerlukan payung hukum. UU tentang MPR ini nanti bisa menjadi payung hukum. Karena itu, saya pikir pembentukan UU tentang MPR ini gagasan yang bagus,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Dukungan juga disampaikan anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena. Menurut Idris Laena, MPR adalah lembaga negara yang secara yuridis sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sesuai Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, kewenangan MPR adalah dapat mengubah dan menetapkan UUD, serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya. Ketentuan Pasal 3 tersebut berbunyi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

“Jadi secara filosofis MPR memiliki kewenangan tertinggi di antara lembaga-lembaga negara yang lain. Maka, untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsinya, wajar bila MPR diatur dengan undang-undang tersendiri, atau UU tentang MPR. Jika perlu DPR dan DPD juga memiliki undang-undang tersendiri, karena DPR dan DPD adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama namun dengan kewenangan yang berbeda,” katanya kepada *Majelis*.

Tak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno, juga menyebut perlunya UU tentang MPR. Mengutip dari Pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” “Kalimat... diatur lebih lanjut dengan undang-undang’ memang memerintahkan pengaturan tentang MPR dengan sebuah undang-undang,” ujarnya kepada *Majelis*.

Namun, untuk pembentukan UU tentang MPR, Hendrawan mempertanyakan lebih dahulu apakah pengaturan tentang MPR dalam UU MD3 seperti saat ini sudah memadai atau belum. Atau, apakah dengan pengaturan dalam UU MD3 yang sekarang MPR menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsinya?

“Jadi, sebenarnya isunya bukan disatukan atau dipisah UU-nya. Jika UU MD3 yang sekarang tidak memadai maka harus dilakukan revisi. MPR harus melakukan kajian yang mendalam dan usulan yang tegas dan didukung naskah akademik yang kuat. Fraksi-fraksi di MPR akan meyakinkan fraksi-fraksi di DPR yang notabene berasal dari partai yang sama, untuk mendorong bergulirnya revisi tersebut,” jelas anggota Badan Pengkajian MPR ini.



Idris Laena



**Hendrawan Supratikno**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

### Isi UU Tentang MPR

Mengenai isi dari UU tentang MPR, Bamsuet mengemukakan, selain tentang mekanisme pelantikan presiden dan/atau wakil presiden, dalam UU tentang MPR nantinya akan mengatur beberapa hal lainnya. Antara lain, tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis sebagai penegak kode etik terhadap setiap anggota MPR, Sidang Tahunan MPR setiap 16 Agustus yang dilaksanakan secara tersendiri, tidak bergabung dengan Sidang Tahunan DPR maupun DPD, serta eksistensi pimpinan MPR RI yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR, bukan melalui berita acara.

Sama halnya, Syarif Hasan juga menyebut isi UU tentang MPR adalah beberapa hal tentang MPR yang selama ini belum diatur dalam UU MD3. Selain mengatur tentang kewenangan, tugas, dan fungsi MPR, UU tentang MPR juga berisi aturan mengenai alat kelengkapan MPR, Badan Kehormatan MPR, Sidang Tahunan MPR, dan lainnya. "Dengan adanya UU tentang MPR ini maka MPR diatur secara khusus dalam UU, sehingga menjadi UU *lex specialis*. UU tentang MPR ini akan mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi MPR serta alat-alat kelengkapan MPR, Badan Kehormatan MPR, dan lainnya. Jadi memang UU ini nanti banyak mengatur tentang MPR yang selama ini belum masuk dalam UU MD3," jelasnya.

Idris Laena juga mengungkapkan hal yang sama. "Banyak hal yang perlu diatur terkait dengan kewenangan, tugas, dan fungsi

MPR," ujar Ketua Badan Penganggaran MPR ini. Pengaturan itu misalnya terkait dengan Sidang Tahunan MPR, pembentukan badan-badan termasuk Badan Kehormatan MPR, jumlah dan komposisi Pimpinan MPR, MPR sebagai penafsir konstitusi, dan sebagainya.

Tak jauh berbeda, Hendrawan Supratikno melihat beberapa aspek yang harus diperjelas dan dipertegas dalam pembentukan UU tentang MPR. "Ada beberapa hal yang menurut saya memang harus diperjelas dan dipertegas. Misalnya, tentang Sidang Tahunan MPR, pelantikan presiden dan wakil presiden, mekanisme lebih detail tentang perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan lain-lain. Karena itu memang perlu kajian tentang hal-hal apa saja yang memperjelas ranah dan operasionalisasi kewenangan MPR," paparnya.

Lebih lanjut Hendrawan mengungkapkan, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi, karena itu sangat tepat bila predikat yang dilekatkan pada MPR sebagai 'lembaga negara dengan kewenangan tertinggi'. Namun, predikat itu belum diletakkan dalam ekosistem kelembagaan negara yang menganut asas penataan horizontal fungsional, bukan lagi vertikal hirarkhis. "Maka harus dipikirkan secara jernih. Kalau tidak maka terjadi banyak tumpang tindih karena sebagian besar anggota MPR adalah anggota DPR, dan kita tidak menganut sistem bicameral yang tuntas," jelasnya.

Bagaimana proses pembentukan UU tentang MPR itu sendiri? Syarif Hasan mengungkapkan, pembentukan UU tentang

MPR harus tetap mengacu pada UU MD3. Tetapi, UU tentang MPR nanti akan mengatur dan mempertegas apa yang belum diatur dalam UU MD3. "Kita ingin satu UU sebagai payung hukum yang khusus mengatur tentang MPR tetapi tidak keluar dari apa yang sudah diatur dalam UU MD3," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Syarief Hasan menambahkan, dalam proses pembuatan UU dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: Pertama, diusulkan oleh DPR sebagai hak inisiatif; dan, kedua, diusulkan oleh pemerintah. Dalam proses ini, MPR sedang memulai dengan melakukan kajian-kajian untuk penyusunan naskah akademik untuk penyusunan RUU tentang MPR. "Jadi kita yang memasukkan usulan RUU tentang MPR," sebutnya.

Proses pembentukan UU tentang MPR sampai diusulkan ke DPR hingga dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Syarif Hasan berharap, proses pembentukan UU tentang MPR hingga dibahas di DPR bisa berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama. "Karena (UU tentang MPR) ini menyangkut kepentingan bersama, saya berharap tidak membutuhkan waktu lama. Sehingga sudah bisa berlaku pada MPR periode mendatang," katanya.

Harapan yang sama juga dikemukakan Hendrawan Supratikno. Dia berharap, naskah akademik tentang RUU MPR atau revisi UU MD3 segera disosialisasikan ke berbagai pihak. "Bila benar Badan Pengkajian MPR sudah memiliki naskah akademik tentang RUU MPR atau revisi UU MD3, semua anggota MPR harus mendapat penyegaran terhadap isi kajian tersebut. Ini bisa dijadikan fokus kegiatan FGD, Dengar Pendapat Masyarakat (DPM), atau Asmas (Aspirasi Masyarakat) yang selama ini menjadi program kegiatan MPR," katanya.

Bagi Hendrawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan dengan rencana pengajuan RUU tentang MPR. "Yang penting dikembangkan adalah sinergi kelembagaan dalam konfigurasi sistem ketatanegaraan kita. Jangan ada lembaga yang diberikan dana yang besar, tetapi tidak mempunyai fungsi dan kontribusi yang jelas, alias lembaga dengan peran aksesorial-seremonial belaka," ucapnya. □

DER/BSC

# Tiga Landasan Pembentukan UU Tentang MPR

Sebagai sebuah lembaga kedaulatan rakyat, MPR memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting. Karena itu, perlu penguatan terkait dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya. Maka, sepantasnya apabila MPR diatur secara lebih khusus dalam undang-undang tersendiri.

Ide dan gagasan pembentukan Undang-Undang (UU) Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah hal baru. Ide dan gagasan itu sudah lama muncul. Bahkan, Badan Pengkajian MPR telah melakukan kajian mengenai pembentukan UU Tentang MPR. Kajian itu telah diterbitkan dalam sebuah buku berjudul "Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR" yang terbit pada tahun 2017. Pada waktu itu, Badan Pengkajian MPR di bawah kepemimpinan Dr. Bambang Sadono, SH., MH., dan pimpinan lainnya, yaitu Dr. T.B. Hasanuddin, H. Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, dan Soenmanjaya.

Secara ringkas, buku tersebut merupakan himpunan pemikiran mengenai urgensi dan analisis perlunya pembentukan Undang-Undang tentang MPR. Sebagai sebuah lembaga kedaulatan rakyat, MPR memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting. Karena itu, perlu penguatan terkait dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya. Maka, sepantasnya apabila MPR diatur secara lebih khusus dalam undang-undang tersendiri. Dengan kata lain, perlu instrumen atau perangkat hukum yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusi MPR.

Dari buku itu disebutkan ada tiga alasan (landasan) pembentukan UU tentang MPR. Berikut nukilan dari buku tersebut, yaitu: **Pertama**, alasan filosofis. Artinya, pertimbangan atau alasan yang melatarbelakangi sebuah peraturan atau undang-undang adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sebuah peraturan perundang-undangan niscaya mengandung landasan (alasan) filosofis. Dengan kata lain, ada kesepadanan

antara cita-cita filosofis masyarakat Indonesia dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam sebuah undang-undang. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa sehingga peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat berusaha untuk mengejawantahkan



prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai *Staatfundamentalnorm* bangsa Indonesia, Pancasila harus selalu menjiwai dan mendasari dari segenap kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi Bintang Pemandu (leistar) arah kebijakan nasional.

Landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Tentang MPR terkait dengan masalah kewenangan MPR sebagai lembaga perwakilan dan penerima mandat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang paling tua dan bermutasi beberapa kali (mulai dari BPUPKI sampai dengan MPR saat ini) adalah

lembaga mandataris rakyat yang memiliki *legal personality* yang terwujud dalam wewenang, tugas, dan fungsi MPR. Untuk itu, MPR memerlukan strategi yang bersifat integratif mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi MPR secara kelembagaan dalam hal melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya.

MPR memiliki posisi istimewa, bukan merupakan lembaga representative seperti halnya DPR dan DPD, bukan pula sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif seperti halnya DPR. Oleh karena itu, perlu dan masuk akal apabila dibuat undang-undang tersendiri yang mengatur MPR terlepas dari lembaga lainnya. UU itu dalam rangka memperkuat kinerja dan wewenang serta tugas MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Kedua**, alasan (landasan) yuridis. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur tentang MPR. Kedua pasal tersebut menjadi dasar legalitas dan sebagai amanat MPR dalam menyelenggarakan wewenang, tugas, dan fungsinya. Bila dicermati ketentuan Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 maka terdapat amanat pengaturan lebih lanjut mengenai MPR itu diatur dengan undang-undang. Pasal 2 tersebut juga dapat dipahami bahwa tugas MPR yang harus bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.

Ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Sedangkan ketentuan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan wewenang dan tugas MPR, yaitu: berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 3 tersebut berbunyi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 tersebut sesungguhnya harus dapat dipahami sebagai *constitutional imperative*, bahwa (i) pengaturan lebih lanjut mengenai MPR

memang harus dibuat dengan undang-undang; (ii) untuk terselenggaranya amanat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 itu khususnya dan ketentuan pasal-pasal lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945 itu maka wewenang, tugas dan fungsi MPR serta tata cara penyelenggaraannya harus diperjelas dan dipertegas serta dioptimalkan, termasuk memperjelas dan mempertegas serta mengoptimalkan kelembagaan MPR itu sendiri dengan terbentuknya alat pendukung, yaitu Sekretariat Jenderal dan badan-badan. Maka, MPR memang sudah seharusnya diatur dengan undang-undang tersendiri, karena dengan undang-undang itu tentu akan semakin jelas dan tegas serta optimal dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.

Oleh karena itu, sudah saatnya MPR diatur dengan undang-undang tersendiri mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang sudah mengalami perubahan mendasar dan mengingat pula permasalahan yang dihadapi rakyat dengan adanya perubahan mendasar konstitusi tersebut. Dengan pengaturan yang tersendiri untuk MPR itu diharapkan dapat mengoptimalkan wewenang, tugas, dan fungsi MPR agar hukum di Indonesia dihormati, dan hukum adalah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

**Ketiga**, alasan (landasan) sosiologis.

Penguatan kewenangan MPR memang sangat diperlukan terkait dengan beberapa isu berdasarkan ide dan gagasan yang berkembang di publik. Misalnya, perlunya penguatan kewenangan MPR untuk menjadikan MPR sebagai lembaga sinkronisasi sehingga dapat meminta lembaga-lembaga negara yang ada, seperti DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Komisi-Komisi Negara untuk menyampaikan laporan akuntabilitas publik atas kinerjanya di dalam Sidang Tahunan MPR.

Selain itu, pada praktiknya, MPR telah membentuk badan-badan serta lembaga yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan wewenang MPR. Melalui Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR, MPR telah membentuk tiga badan dan satu lembaga, yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Lembaga Pengkajian.

Untuk menjabarkan semuanya masih diperlukan suatu penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk mengakomodir proses pembentukan Undang-Undang Tentang MPR secara terpisah. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengakomodir aspirasi masyarakat secara luas serta sebagai sarana untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang MPR. □

**BSC**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MBA** Wakil Ketua MPR RI

## Urgensi UU MPR Perlu Dikaji Secara Mendalam

**S**ELAMA ini, kelembagaan MPR dan lembaga negara legislatif lainnya seperti DPR dan DPD diatur melalui UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, belakangan muncul usulan agar ketiga lembaga itu masing-masing diatur dengan undang-undang tersendiri. Kewenangan, tugas, dan fungsi pokok ketiga lembaga negara (MPR, DPR, DPD) memang lebih tepat diatur melalui UU tersendiri. MPR telah memulai langkah untuk mewujudkan pembentukan UU tentang MPR.

Dalam dua kali Rapat Pimpinan, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang MPR. Dalam Rapat Pimpinan pada Jumat, 20 Januari 2023, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan, Rapim memberi amanah kepada Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani untuk menjadi koordinator dalam menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang MPR.

Kemudian, pada Rapim MPR yang

digelar Senin, 27 Februari 2023, Bamsoet kembali menyebut perlunya UU tentang MPR berkaitan dengan dibutuhkannya Ketetapan MPR yang bersifat *beschikking* untuk pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Sehingga presiden dan wakil presiden memiliki dasar hukum yang kuat berupa Ketetapan MPR, bukan lagi semata berdasarkan dokumen berita acara pelantikan dan surat keputusan KPU.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MBA., ikut menghadiri dua kali rapat pimpinan itu. Untuk mengetahui lebih jauh soal pembentukan UU tentang MPR ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini. Berikut petikannya.

Salah satu keputusan Rapim MPR pada akhir Januari 2023 adalah menugaskan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani untuk memulai langkah-langkah penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang MPR (RUU tentang MPR). Bagaimana menurut Bapak, apakah MPR perlu diatur dalam UU

tersendiri? Adakah urgensinya?

Sebagai lembaga tinggi negara, tentu saja tugas yang diembannya sangat penting buat perjalanan bangsa dan negara. Salah satunya yang merupakan kewenangan tertinggi adalah menetapkan dan mengubah UUD. Lalu ada kewenangan lagi, yakni melantik Presiden dan Wapres RI.

Tentu semua tugas dan kewenangan ini membutuhkan perangkat aturan tersendiri agar terfokus. Dalam berbagai kesempatan sudah saya katakan bahwa sudah saatnya MPR diatur dengan satu undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang tentang MPR. Dengan undang-undang ini maka kewenangan, tugas pokok dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat.

Salah satu alasan MPR ingin menyusun RUU tentang MPR adalah karena UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hanya sedikit mengatur tentang MPR (hanya beberapa pasal saja). Padahal banyak hal terkait dengan MPR seperti tugas dan fungsi,

**pembentukan badan, etika anggota MPR, dan sebagainya. Semua perlu diatur dengan UU, sehingga perlu UU khusus tentang MPR sebagai payung hukum. Apa tanggapan Bapak?**

Memang UU MD3 itu belum secara detail mengatur tentang MPR. Jadi, memang harus diusulkan oleh pemerintah dan DPR agar membuat UU yang lebih komprehensif, menyeluruh, tentang MPR. Kalau itu dilakukan maka MPR akan bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Pandangan dan usulan ini (UU tentang MPR) sudah disepakati bersama semua Pimpinan MPR tinggal di follow up saja. Walaupun UU MPR ini gagasan dan wacana yang bagus, memang perlu dilakukan kajian akademisnya dulu. Mudah-mudahan ini terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**Selama ini Sidang Tahunan MPR hanya diatur dalam Tata Tertib MPR, bukan dalam UU MD3 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. UU MPR bisa menjadi payung hukum penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR bagi penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Apa pendapat Bapak?**

Ya, selama ini Sidang Tahunan MPR hanya dipayungi melalui Tata Tertib MPR saja. Nah, dengan UU maka agenda ini (Sidang Tahunan) akan memiliki legal standing yang lebih kuat lagi, sekali pun Tata Tertib MPR itu dibuat berdasarkan Undang-Undang.

**Satu hal lagi, tentang komposisi dan jumlah pimpinan MPR. Beberapa kali UU**



**MD3 direvisi untuk mengakomodir perubahan jumlah pimpinan MPR (dari 5 orang pimpinan berubah menjadi 8 pimpinan, dan sekarang 10 orang pimpinan). UU tentang MPR ini juga akan mengatur jumlah pimpinan MPR?**

Ya, semua yang menyangkut MPR akan diatur di dalam UU MPR, termasuk jumlah dan komposisi Pimpinan MPR. Pimpinan MPR itu akan menggambarkan kekuatan politik yang ada di MPR dan DPR. Intinya, yang terbaiklah yang akan kita gunakan dan terapkan apakah lima orang pimpinan atau seperti sekarang 10 pimpinan.

Jumlah Pimpinan MPR yang sekarang itu merepresentasikan semua kekuatan politik yang ada plus perwakilan daerah. Intinya, nanti akan kita olah, semestinya jumlah pimpinan itu idealnya berapa orang, makanya itulah UU MPR ini perlu kajian lagi secara

lebih mendalam.

**Apa yang harus disiapkan untuk penyusunan RUU tentang MPR? (Badan Pengkajian MPR sebenarnya pernah memiliki naskah akademik untuk penyusunan RUU MPR). Perlukah masukan dari pihak lain (akademisi, pakar hukum tata negara, tokoh partai politik, masyarakat umum, dan sebagainya)? Kemudian, siapa yang akan mengusulkan RUU tentang MPR?**

Ya, sangat dibutuhkan kajian yang komprehensif dari berbagai sisi. Masukan dari elemen bangsa seperti para akademisi, pakar tata negara, para tokoh nasional, parpol dan lainnya di Indonesia sangat perlu. Sehingga nanti masukan-masukan tersebut akan diolah di Badan Kajian MPR untuk kemudian dibuat draf RUU-nya yang diusulkan oleh Pemerintah atau DPR.

**Bagaimana posisi UU MD3 bila MPR memiliki UU tersendiri? Ada kemungkinan mendorong lembaga DPR atau DPD menuntut hal yang sama. Kalau itu terjadi, lalu bagaimana nasib UU MD3?**

Maka dari itulah sebelumnya dilakukan terlebih dahulu kajian yang mendalam dengan melibatkan elemen bangsa lainnya, seperti akademisi dan para pakar. Jika ini sudah dilakukan maka nanti akan terlihat urgensi UU MPR perlu ada atau tidak, dan bagaimana dengan UU MD3 serta apakah perlu juga menyusul UU DPR dan DPD.

**Bagaimana kemungkinan MPR memiliki UU tersendiri, apakah bisa mendorong polemik atau penolakan dengan alasan MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi, seperti pada masa Orde Baru, dan alasan politis lainnya?**

Menurut saya tidak akan mendorong polemik. UU ini hanya untuk mengonsentrasikan tugas dan kewenangan MPR, bukan melakukan amandemen UUD untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Nanti kita lihat saat kita lakukan diskusi dengan masyarakat dan elemen bangsa lainnya, apakah UU MPR ini akan memunculkan penolakan dan polemik, apa pula pendapat mereka. Jika rakyat sudah setuju dan menganggap UU MPR ini berdampak baik buat bangsa dan negara, maka ya sudah mudah-mudahan akan lancar dan tidak terjadi masalah. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Pengganti Antar Waktu Anggota MPR RI**

# Bamsoet Ajak Para Pemangku Kepentingan Jaga Kondusifitas Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengajak seluruh anggota MPR turut terlibat di tengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan riil melalui kerjasama erat dengan pemerintah.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa dalam menghadapi tahun politik 2023 ekonomi Indonesia ditandai pertumbuhan yang cukup baik, mencapai 5,31%. Tertinggi sejak 2014 dan menandai Indonesia telah mampu mengelola tantangan New Normal pasca pandemi Covid-19.

Pencapaian besar di akhir tahun 2022 juga ditutup dengan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sukses memegang presidensi G-20. Dilanjutkan dengan terpilihnya Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023, yang berarti Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara akan meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan visi besar, yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

“Tidak hanya agenda kenegaraan, saya sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama para pecinta olahraga dan mobilitas otomotif juga bangga, karena di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia terus diberikan kepercayaan

menjadi tuan rumah berbagai event kejuaraan motorsport bergengsi dunia. Setelah di tahun 2022 lalu kita sukses menjadi tuan rumah MotoGP, World Superbike, MXGP, Formula E, hingga Asia Pacific Rally Championship, di tahun 2023 ini kita akan kembali mendapatkan kepercayaan serupa. Bahkan telah ditambah dengan kehadiran F1 Powerboat di Danau Toba yang sukses diselenggarakan akhir pekan lalu,” ujar Bamsoet usai melantik anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu, Ahmad Syaifullah Malonda, dari Kelompok DPD RI, Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di balik berbagai keberhasilan tersebut bangsa Indonesia juga harus tetap waspada. Mengingat tahun ini dunia juga dihadapkan pada situasi ekonomi global yang sulit. Meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat melalui The Fed pada 1 Februari 2023 hingga 4,75% untuk mencegah inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, berpotensi memicu arus balik modal ke negara negara maju. Sehingga berpotensi membuat gejolak pasar





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

di negara-negara berkembang.

"Ditambah perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai hingga saat ini, juga akan memperluas krisis energi dan pangan yang menjadikan harga kebutuhan pokok dunia

terus meroket," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menerangkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga kepercayaan internasional yang menguat

tersebut harus menjadi bekal dalam menatap Indonesia yang lebih baik di masa depan. Karenanya, pada Pileg dan Pilpres nanti diharapkan terpilih calon-calon anggota legislatif yang berkualitas, sekaligus terpilih pemimpin terbaik yang dapat menakhodai Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Di sinilah pentingnya kerjasama segenap pemangku kepentingan untuk memastikan agar kondusifitas bangsa dapat dipertahankan. Seluruh anggota MPR harus turut terlibat di tengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan riil melalui kerjasama erat dengan pemerintah. Sehingga, roda pemerintahan dapat berjalan stabil meskipun kita tengah disibukkan dengan agenda demokrasi nasional," pungkas Bamsuet. □

Senam Sehat Bersama Masyarakat

# Sjarifuddin Hasan Ajak Meningkatkan Silaturahmi Dengan Berolahraga

Covid-19 telah berlalu, saatnya kembali melaksanakan aktivitas, termasuk olahraga. Dengan berolahraga badan menjadi sehat, sehingga siap menyongsong masa depan.

**W**AKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., atau biasa disapa Syarif Hasan, mengajak masyarakat untuk kembali menggairahkan kegiatan berolahraga. Karena olahraga berimbas pada kesehatan dan peningkatan daya tahan tubuh. Olahraga juga berguna untuk mengurangi beban hidup, dan menghindarkan diri dari stres. Dengan berolahraga, masyarakat akan sehat, jasmani serta rohaninya.

Apalagi saat ini pandemi Covid-19 sudah semakin melandai. Sehingga ruang-ruang publik sudah kembali dibuka, dan aktivitas masyarakat sudah normal sebagaimana biasa, termasuk dalam berolahraga. Dengan kembalinya masyarakat aktif berolahraga niscaya akan menambah keyakinan diri dalam menata serta menghadapi masa depan.

“Jangan lupa, olahraga juga mampu meningkatkan silaturahmi, persatuan dan kesatuan. Ini sangat penting, apalagi di saat kita memasuki tahun-tahun politik. Mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan aktivitas berolahraga,” ajak Syarif Hasan.

Ajakan tersebut disampaikan Syarif Hasan usai melaksanakan senam sehat bersama masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dilaksanakan di pelataran GOR Pajajaran Kota Bogor, Ahad (26/2/2023) dari pagi hingga siang hari. Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim beserta sejumlah anggota DPRD Partai Demokrat Kota Bogor.

Aktivitas berolahraga, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, ini juga berimbas pada sektor kehidupan yang lain. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Terbukti, di tempat-tempat yang ramai masyarakat berolahraga, di situ para pelaku UMKM menjalankan kegiatan bisnisnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Artinya, kegiatan berolahraga juga turut meningkatkan putaran roda perekonomian.

“Olahraga juga memajukan industri. Bayangkan berapa banyak orang membeli pakaian dan peralatan olahraga, semua itu tak bisa dilepaskan dari kegiatan industri.

Artinya, semakin banyak orang melakukan olahraga, semakin tinggi kebutuhan terhadap peralatan berolahraga, dan itu membuka peluang pasar bagi dunia industri,” pungkasnya.

Senam sehat yang diinisiasi Syarif



Hasan itu mampu menyedot perhatian ribuan warga Bogor dan sekitarnya, untuk ikut dalam berolahraga. Padahal, pagi sebelum senam berlangsung, cuaca di Kota Bogor kurang bersahabat. Langit mendung disertai gerimis tebal membuat masyarakat yang sudah hadir memilih untuk berteduh di bangunan yang ada di sekitar lokasi. Beruntung, tidak terlalu lama berselang langit berubah menjadi semakin cerah. Sehingga

senam sehat pun segera dilaksanakan.

Berbagai hadiah doorprize diberikan. Mulai dari kompor gas, ricecooker, televisi, sepeda gunung, mesin cuci, kulkas, hp, motor listrik, hingga hadiah utama berangkat umroh. Semua itu membuat masyarakat semakin antusias dan terus mengalir hingga menjelang siang. Beberapa peserta yang memperoleh hadiah tampak terharu. Mereka tidak menyangka

bakal memperoleh hadiah yang tidak diduga. Seperti yang dirasakan ibu Sujana, peserta yang memperoleh sepeda motor listrik. Ia terlihat emosional, berkali-kali mengusap air mata karena rasa bahagia. Sujana juga berulang-ulang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Syarif Hasan yang telah menyelenggarakan acara senam sehat. □

MBO

## Penetapan HET Gabah dan Beras

# Syarief Hasan: Pemerintah Harus Memerhatikan Kesejahteraan Petani

“Disepakatinya harga bawah gabah Rp 4.200 per-kilogram dan harga batas atas Rp 4.550 per-kilogram akan merugikan petani,” ungkap Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan.

**W**AKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, menyesalkan kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah dan beras. Pasalnya, penetapan HET tersebut jauh di bawah standar, yakni hanya Rp 4.550 per-kilogram.

Syarief Hasan menilai, disepakatinya harga bawah gabah Rp 4.200 per-kilogram dan harga batas atas Rp 4.550 per-kilogram akan merugikan petani. “Hal ini dikarenakan kebijakan ini cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani,” ujar Syarif Hasan.

Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, hingga kenaikan biaya upah pekerja dan buruh tani harusnya menjadi acuan Bapanas dalam menetapkan HET sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan sebanding dengan tanggungan dan pengeluaran para petani, khususnya petani kecil.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi HET gabah dan beras. “Pemerintah harus mengevaluasi sehingga petani tidak merugi. Bagaimana bisa, Presiden memiliki visi swasembada pangan, tetapi petani tidak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diperhatikan kesejahteraannya karena harga beli hasil pertaniannya sangat rendah,” ungkap Syarif Hasan.

Ia juga mempertanyakan alasan Bapanas lebih memilih mengundang korporasi dibandingkan dialog dengan petani. “Bapanas jangan hanya berkoordinasi dengan korporasi pangan yang sudah besar, tetapi juga harus berdialog dengan

petani dan kelompok-kelompok tani yang ada. Jangan hanya korporasi yang diuntungkan, tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali,” ungkap Syarif Hasan.

Syarief Hasan menyebut, penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani. “Sangat disesalkan ketika memasuki panen raya di berbagai daerah, namun petani malah tidak merasakan keuntungan. Kesejahteraan petani harus diperhatikan sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia,” katanya.

Guru Besar bidang Manajemen UMKM ini juga menyebut, pelibatan UMKM pangan harusnya dilakukan Pemerintah. “Pemerintah juga harusnya melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. HET yang ditetapkan Pemerintah harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil,” ujar Syarif Hasan.

Menurut Syarif Hasan, Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah menaikkan HET gabah dan beras. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi,” tutup Syarif Hasan dengan tegas. □

Pendidikan Budi Pekerti

# Lestari Moerdijat: Penting dalam Pembangunan SDM Nasional

Pembangunan sektor sumber daya manusia (SDM) nasional harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dan pengamalan budi pekerti setiap anak bangsa dalam keseharian.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**B**ERBAGAI upaya untuk mencetak anak bangsa yang berdaya saing dan berbudi pekerti yang baik harus mampu direalisasikan dalam proses pembangunan SDM nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2).

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menempatkan pembangunan SDM menjadi salah satu program prioritas pada tahun ini.

Tiga isu utama dalam program tersebut, yakni: penurunan angka kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan revitalisasi vokasi.

Menurut Lestari, ketiga isu utama program pembangunan SDM nasional itu harus benar-benar bisa direalisasikan lewat kerja sama semua pihak.

Apalagi, ujar Rerie—sapaan akrab Lestari—berdasarkan catatan Badan

Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%).

Sementara itu data BPS juga menyebutkan penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka dari sektor pendidikan tahun 2019-2021 adalah lulusan SMK dan diploma (vokasi). Lulusan dari jenjang SMK menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbanyak, dengan kisaran 10%-14%, lalu diploma di kisaran 6%-8%. Sedangkan universitas 6%-7%. Adapun jenjang SMP ke bawah berkisar 2%-6%.

Selain itu, berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka stunting anak balita nasional mencapai 24,4% pada 2021 dan

Pemerintah memasang target prevalensi stunting nasional menjadi 14% pada 2024.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan SDM nasional itu harus menjadi perhatian semua pihak, karena di era yang sarat perubahan di masa datang negeri ini membutuhkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya pembangunan SDM nasional itu juga mengedepankan pendidikan budi pekerti bagi setiap anak bangsa.

Sehingga, tegas Rerie, pembangunan SDM nasional tidak hanya mampu mencetak anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing, tetapi juga memiliki akhlak mulia dengan mengenal, menyadari dan menghayati pentingnya nilai-nilai moral yang baik. □

Terima Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution

# Bamsoet Siap Jadikan Rumah Aspirasinya Cabang LPSK di Daerah

Dengan menggandeng anggota MPR yang tersebar di seluruh Indonesia, LPSK bisa mengoptimalkan pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau korban.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan membuka cabang LPSK di berbagai daerah dengan bekerjasama dengan Rumah Aspirasi yang dimiliki oleh para anggota MPR RI di daerah pemilihannya masing-masing. Saat ini anggota MPR RI berjumlah 711 anggota yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136

anggota DPD RI.

“Dengan menggandeng anggota MPR yang tersebar di seluruh Indonesia, LPSK bisa mengoptimalkan pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau korban. Masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan sebagai saksi atau korban tidak harus datang langsung ke Jakarta. Tetapi, bisa mendatangi cabang LPSK yang berada di Rumah Aspirasi anggota MPR RI,” ujar Bamsoet usai

menerima Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, di Jakarta, Rabu (15/2/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini dirinya memiliki Rumah Aspirasi di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7 yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Rumah Aspirasi berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan dirinya dalam menyerap keinginan serta gagasan dari masyarakat. Berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat tersebut akan menjadi dasar perjuangan di Parlemen agar bisa terformulasi dalam kebijakan negara.

“Di tahap awal Rumah Aspirasi saya yang berada di Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara siap digunakan sebagai cabang LPSK di daerah tersebut. LPSK bisa memanfaatkan salah satunya sebagai Pusat Pengaduan dan Penanggulangan Korban Kekerasan Seksual, khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Kasus kekerasan seksual ini masih banyak dijumpai di berbagai daerah,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sepanjang tahun 2022 LPSK menerima 7.777 permohonan perlindungan saksi dan korban. Jumlah tersebut meningkat sebesar 232% dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 2.341 permohonan.

“Dari jumlah tersebut, ada 6.104 pengajuan yang memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga bisa ditindaklanjuti dengan penelaahan. Jumlah pemohon terbanyak terkait tindak pidana pencucian uang, di mana ada 3.725 kasus mengenai investasi ilegal robot trading. Sementara, jumlah pemohon terbanyak kedua adalah ihwal pelanggaran HAM berat sebanyak 600 pemohon,” pungkas Bamsoet. □



**Hadiri Pelantikan HIPMI**

# Bamsoet Ajak Pengusaha Muda Kampanyekan Belanja Produk Dalam Negeri

HIPMI juga perlu mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam memasifkan hilirisasi sumber daya alam Indonesia, khususnya dari sektor minyak, gas, mineral, serta batu bara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sejak tahun lalu mengkampanyekan belanja produk dalam negeri. Khusus untuk belanja pemerintah pusat dan daerah dari APBN dan APBD yang telah dikeluarkan untuk belanja produk dalam negeri di sepanjang tahun 2022 jumlahnya telah mencapai Rp 762 triliun. Bahkan, Amerika Serikat sejak Januari 2023 telah “mengikuti” langkah serupa dengan mengkampanyekan secara masif terkait belanja produk dalam negerinya sendiri. Indonesia patut bangga karena telah mulai setahun sebelumnya.

“Memiliki jumlah pengurus pusat hingga 239 orang, dengan 236 ribu anggota aktif yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Himpunan Pengusaha Muda In-

donesia (HIPMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Akbar Himawan Buchari punya peran besar untuk mendukung gerakan belanja produk dalam negeri. Sehingga tidak hanya pemerintah, swasta juga bisa ikut terlibat di dalamnya,” ujar Bamsoet usai menghadiri pelantikan BPP HIPMI 2022-2025 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (20/2/23).

Selain Presiden Joko Widodo, turut hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Ketua DPD RI Sul-

tan Bachtiar Najamudin. Hadir juga pendiri HIPMI Abdul Latief, serta Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menambahkan, HIPMI juga perlu mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam memasifkan hilirisasi sumber daya alam Indonesia, khususnya dari sektor minyak, gas, mineral, serta batu bara. Walaupun mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, Presiden Joko Widodo tetap tidak bergeming. Karena itu, segenap elemen bangsa seperti HIPMI harus mendukung langkah pemerintah tersebut. Dari hilirisasi, setidaknya dapat menciptakan sekitar 9,6 juta lapangan kerja serta menghasilkan pemasukan negara hingga USD 715 miliar.

Hilirisasi sangat penting, mengingat Indo-

nesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Tahun 2021, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton. Diperkirakan 37,04% nikel di dunia berada di Indonesia. Sebanyak 90% cadangan nikel Indonesia tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan

Maluku Utara.

“Indonesia juga memiliki cadangan batubara berlimpah mencapai 31,69 miliar ton pada 2021, yang menjadikan kita sebagai produsen batu bara terbesar kedua di dunia setelah Cina. Cadangan batubara terbesar ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 13,61 miliar ton. Indonesia juga

menempati urutan ke-6 sebagai penghasil emas terbesar di dunia, kemudian tembaga menempati peringkat ke-7 dan gas alam menempati peringkat ke-13 di dunia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, oleh karena itu pasca dilantik, BPP HIPMI harus dapat langsung “tancap gas” bekerja keras. Khususnya dalam membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasional sekaligus menjadi penggerak pendukung keberlanjutan kesinambungan pembangunan nasional.

“Awal yang baik telah dilakukan HIPMI dengan melakukan terobosan meluncurkan HIPMI GO, super apps yang dapat menangkap peluang berbagai ekonomi digital. Sekaligus berfungsi sebagai pengembangan SDM, akses pasar, akses pembiayaan, akses perizinan dan regulasi, serta riset dan development. HIPMI GO juga bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menjadi mitra LKPP, penyaluran KUR, pembuatan NIB, dan berbagai program kerja lainnya,” pungkas Bamsoet. □



Terima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi

# Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Haji Indonesia - Arab Saudi

Selain kerjasama di bidang haji, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan. Mengingat potensi perdagangan Indonesia - Arab Saudi sangat besar, dan perlu didorong agar terus meningkat.

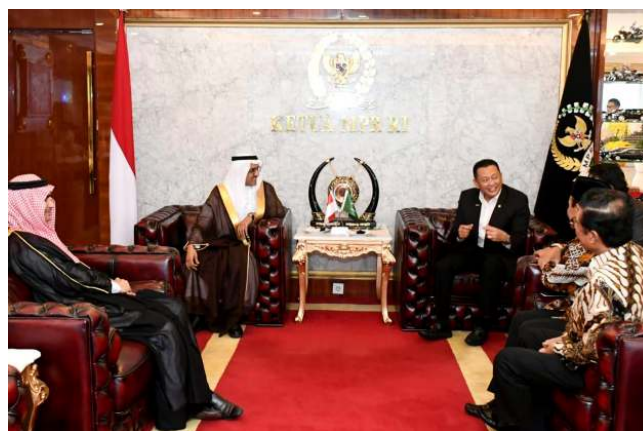


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, meminta kesediaan Kerajaan Arab Saudi agar bisa kembali memberikan tambahan kuota jemaah haji bagi Indonesia. Mengingat penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, mencapai 238 juta jiwa atau sekitar 12,5% dari penduduk muslim dunia.

"Kita juga apresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi yang selama ini senantiasa memberikan perhatian besar terhadap Indonesia. Terbukti pada tahun 2023 ini kuota haji Indonesia mencapai 221.000 orang, terbesar di dunia. Namun, jumlah tersebut masih belum bisa mengakomodir tingginya minat haji dari Indonesia. Dengan penambahan kuota haji diharapkan dapat memangkas masa tunggu keberangkatan haji Indonesia dari yang saat ini rata-rata 20 hingga 30 tahun, agar bisa menjadi di bawah 10 tahun," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (1/3/23).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, serta Counsellor Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Abdullah Yahya Alhamrani.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong agar pembangunan Indonesian House di Makkah, Arab Saudi, yang digagas pemerintahan

Presiden Joko Widodo sebagai kompleks apartemen/tempat tinggal jemaah haji atau jemaah umrah Indonesia, bisa segera terealisasi dengan dukungan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Lahan yang diberikan oleh Arab Saudi untuk pembangunan Indonesian House berupa hak sewa 99 tahun.

"Namun, terdapat peraturan dari Arab Saudi yang memberikan kewenangan pemerintah (Royal Commission for Makkah

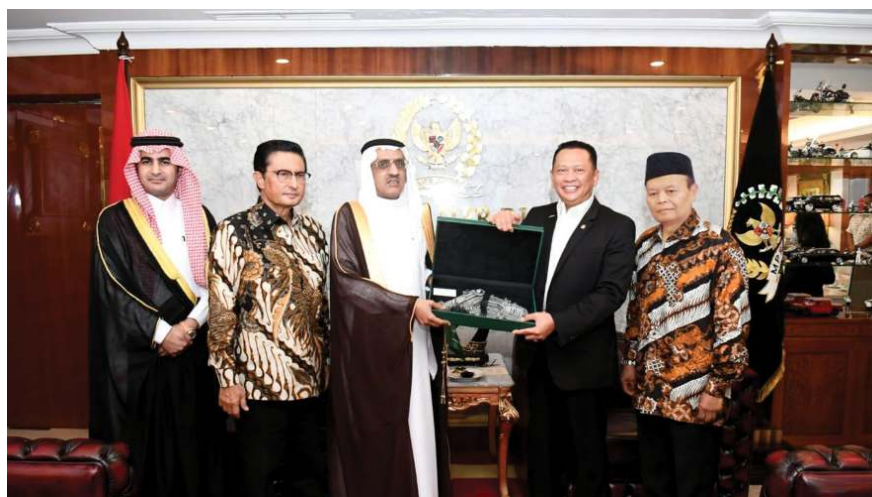






FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

and Holy Sites/RCMC) untuk dapat mengambil lahan tersebut sewaktu waktu. Sehingga belum dapat menjamin kepastian bahwa dalam kurun waktu 99 tahun lahan tersebut digunakan oleh Indonesia. Karena itu, kita perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas hal ini," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, selain kerjasama di

bidang haji, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan. Mengingat potensi perdagangan Indonesia - Arab Saudi sangat besar, dan perlu didorong agar terus meningkat.

"Salah satunya dengan mempermudah akses masuk produk-produk Indonesia ke Arab Saudi, terutama produk halal. Beberapa perusahaan Indonesia telah mendaftarkan produk mereka ke Saudi Food and Drugs

Authority (SFDA), namun hingga sekarang SFDA belum memberikan persetujuan. Karena itu, melalui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, kita berharap persetujuan SFDA dapat segera diterbitkan, khususnya untuk produk perikanan yang dibutuhkan jamaah haji Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menerangkan, Indonesia juga memiliki banyak kesempatan bagi Arab Saudi untuk berinvestasi di berbagai sektor. Salah satunya dalam proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Khususnya di sektor infrastruktur, fasilitas publik, dan energi terbarukan. Sehingga bisa semakin meningkatkan investasi Arab Saudi di Indonesia yang pada tahun 2022 lalu baru berjumlah sekitar USD 1,7 juta.

"Kita juga mendorong penguatan kolaborasi antara Public Investment Fund Saudi dengan Indonesia Investment Authority. Selain itu, kita juga memastikan realisasi proyek pembangkit listrik tenaga surya di Saguling dan Singkarak. Proyek senilai USD 104,95 juta ini merupakan tindak lanjut MoU antara PLN dengan ACWA Power tahun lalu," pungkaskan Bamsoet. □



Terima Pengurus Alumni Doktor Hukum Unpad

# Bamsoet Didapuk Jadi Ketua Dewan Pembina

PADIH Unpad hadir untuk mawadahi keinginan para alumni program Doktor untuk saling bersilaturahmi, bercengkrama, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang juga alumni program Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung diminta menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad (PADIH Unpad). Keberadaan PADIH Unpad merupakan wadah yang memfasilitasi para alumni doktor ilmu hukum agar dapat berbagi pengetahuan dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia, dengan mengedepankan semangat kekeluargaan.

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran merupakan salah satu program doktor ilmu hukum terbaik di Indonesia.

Berdasarkan QS World University Rankings 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran masuk ke dalam 5 besar terbaik Program Studi Hukum di Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum pada Program Doktor Universitas Padjadjaran juga memperoleh peringkat akreditasi "A" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berlaku sejak 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2025.

"Unpad telah melahirkan banyak alumni yang memiliki peran penting pada level nasional maupun internasional, dan terus memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa Indonesia. Karena itu, PADIH Unpad hadir untuk mawadahi keinginan para alumni program Doktor untuk saling bersilaturahmi,

bercengkrama, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PADIH Unpad, di Jakarta, Rabu (1/3/23).

Para pengurus PADIH Unpad yang hadir, antara lain Ketua Umum Rildo Ananda Anwar, Wakil Ketua Ahmad Muliadi dan Yuli Harsono, Sekretariat Ade Renaldi dan Fatahillah Ramli.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, misi PADIH Unpad, antara lain sebagai sarana silaturahmi dan lumbung Informasi alumni, sebagai laboratorium alumni dalam mengembangkan Intelektual, usaha dan jaringan, sebagai rumah aspirasi dan kontribusi aktif bagi kemajuan Unpad, sebagai rumah aspirasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, serta sebagai entitas perjuangan menjadikan Unpad sebagai perguruan tinggi negeri yang unggul tingkat nasional dan internasional.

"PADIH Unpad mengusung nilai dasar organisasi, RESPECT, yakni: responsibility (tanggung jawab), excellence (keunggulan), scientific rigor (ketelitian ilmiah), professionalism (sikap profesional), encouragement (semangat), creativity (kreativitas), dan trust (kepercayaan)," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, PADIH UNPAD memiliki berbagai macam bidang keahlian. Diantaranya, perbankan dan keuangan, dan penyelesaian kredit bermasalah, bisnis dan korporasi, ketenagakerjaan dan imigrasi ketenagakerjaan, kepailitan dan likuidasi.

"Ditambah asuransi dan reasuransi, hak kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, desain, hak paten serta teknologi informasi, litigasi perdata dan komersial, litigasi perusahaan, perselisihan ketenagakerjaan, pertanahan, perpajakan, praktek pajak dan perencanaan," pungkas Bamsoet. □



# Prestasi Olahraga Hanya Bisa Dicapai Melalui Pembinaan Berkelanjutan

Olahraga adalah prestasi yang diraih secara bersama-sama, dengan pola pembinaan dan latihan secara berkala.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menyampaikan selamat dan apresiasi tinggi kepada Jakarta LavAni Allo Bank. Apresiasi disampaikan setelah LavAni berhasil memenangkan putaran kedua PLN Mobile Proliga 2023 di GOR UNY Yogyakarta, Sabtu malam (18/2/2023). Kemenangan itu diraih setelah mengandaskan rival terberatnya Jakarta Bhayangkara Presisi tiga game tanpa balas (25-15, 40-38 dan 25-22)

Keberhasilan, tim bola voli yang dipimpin Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, itu memastikan LavAni menjadi tim ranking teratas menuju final four yang digelar di Gresik Jawa Timur. Kemenangan itu juga menjadikan LavAni sebagai salah satu tim terfavorit yang dijagokan bakal keluar sebagai juara PLN Mobile Proliga 2023.

“Sukses ini menjadi bukti keberhasilan Pak SBY membina dan mengarahkan tim voli yang didirikannya pada 2019. Mudah-mudahan LavAni bisa mengulang keberhasilan yang sudah dicapai pada 2022, menjadi juara Proliga,” harap Syarif Hasan, begitu Sjarifuddin Hasan biasa disapa.

Komentar itu disampaikan Syarif Hasan

usai menyertai SBY menyaksikan pertandingan antara Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi. Pertandingan antara LavAni melawan Bhayangkara berlangsung ketat. Saling susul point terus terjadi, khususnya pada set kedua, sebelum akhirnya LavAni unggul 49-38 melalui lima belas kali jus.

Pembinaan dan pengarahan SBY terhadap LavAni, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, itu bisa menjadi preferensi bagi siapapun yang menekuni dan memiliki keberpihakan pada olahraga.

Karena pembinaan olahraga harus dilakukan dari bawah dan dikelola secara profesional. Tidak bisa dilakukan secara instan.

“Siapapun yang memiliki keberpihakan terhadap cabang olahraga harus mengerjakan seperti apa yang sudah dilakukan Pak SBY. Setiap hari, secara terus-menerus beliau melakukan pembinaan dan memberi motivasi kepada para atlet muda. Sehingga pada waktunya mereka bisa bermain dengan baik,” kata Syarif Hasan lagi.

Persiapan SBY membangun LavAni agar mampu bersaing di cabang bola voli nasional, kata Syarif Hasan, sudah dilakukan sejak lama. Dan, ketika LavAni muncul sebagai juara Proliga tahun 2022 banyak yang kaget. Apalagi, sukses tersebut dilakukan dengan menyingkirkan tim-tim yang lebih dulu eksis dan memenangkan Proliga.

“Intinya adalah pembinaan, pemberian motivasi dan peluang yang luas kepada semua atlet untuk berkembang. Itulah kunci keberhasilan LavAni, dan itulah yang dilakukan Pak SBY selama sehari-hari, berminggu, bulan, dan tahun sampai akhirnya LavAni sebesar sekarang. Disegani oleh kawan dan lawan,” pungkasnya. □

MBO



Rapim Gabungan Pimpinan MPR RI

# Perlunya TAP-MPR Bagi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Sistem pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat tidak serta merta menghilangkan wewenang MPR untuk melantik calon presiden dan calon wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum menjadi Presiden dan Wakil Presiden.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, Rapat Pimpinan MPR telah menerima dan menyetujui hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR terkait pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dikembalikan secara konsisten sesuai kewenangan konstitusional MPR RI sebagaimana diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (2). Selanjutnya akan dibawa dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD.

Hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR tersebut, yakni sebagai pelaksanaan wewenang melantik presiden dan/atau wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun

1945: “MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”, maka MPR perlu mengeluarkan Ketetapan yang bersifat Penetapan (beschikking) tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Sehingga presiden dan/atau wakil presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat, berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja.

“Pembentukan ketetapan dan mekanisme tata cara pelantikan presiden dan/atau wakil presiden tersebut perlu penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR dan

Peraturan Tata Tertib MPR, yang akan dirumuskan dan disusun Badan Pengkajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Ditargetkan dalam 6 bulan kedepan sudah bisa selesai,” ujar Bamsuet usai Rapat Pimpinan MPR, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III MPR, Jakarta, (27/2/23).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan kajian Badan Pengkajian MPR RI, sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat tidak serta merta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menghilangkan wewenang MPR untuk melantik calon presiden dan calon wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum menjadi presiden dan wakil presiden. Mengingat kewenangan presiden dan wakil presiden melekat pada jabatannya, bukan pada orangnya.

“Keputusan KPU tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hanyalah menetapkan bahwa yang bersangkutan adalah pasangan calon terpilih karena suara yang diperolehnya. Untuk melaksanakan kewenangan sebagai presiden dan wakil presiden maka pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang KPU tersebut perlu ditetapkan dan dilantik oleh MPR sesuai kewenangan konstitusionalnya,” jelas

Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, penetapan (TAP-MPR) yang dimaksud adalah *beschikking*, bukan *regelling*. Karena penting untuk menjadi dasar dan mengubah status hukum pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih.

“Ketetapan MPR ini merupakan *conditio sine qua non* (harus ada) dalam rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” tambah Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menerangkan, pembentukan ketetapan dan mekanisme tata cara pelantikan presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR RI perlu penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut dalam UU tentang

MPR RI dan Peraturan Tata Tertib MPR RI, yang akan dirumuskan dan disusun oleh Badan Pengkajian MPR RI bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Ditargetkan dalam enam bulan kedepan sudah bisa selesai.

“Kehadiran UU tentang MPR RI sangat penting, mengingat DPD RI sudah menyiapkan RUU tentang DPD RI, begitupun dengan DPR RI. Sehingga pada akhirnya ketiga lembaga legislatif, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang tugas dan fungsinya, tidak lagi bergabung dalam UU MD3 seperti yang saat ini terjadi,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, selain tentang mekanisme pelantikan presiden dan/atau wakil presiden, dalam UU tentang MPR RI dan Peraturan Tata Tertib MPR RI tersebut nantinya akan mengatur beberapa hal lainnya.

Antara lain, tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis sebagai penegak kode etik terhadap setiap anggota MPR, Sidang Tahunan MPR RI setiap 16 Agustus yang dilaksanakan secara tersendiri, tidak bergabung dengan Sidang Tahunan DPD maupun DPR serta eksistensi pimpinan MPR RI yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR RI, bukan melalui berita acara.

“Adapun terkait prosesi sambut dan pisah presiden - wakil presiden, sebagaimana yang sudah dicontohkan dengan baik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyambut Presiden Joko Widodo, kita akan dorong agar menjadi kelaziman. Selain melalui konvensi ketatanegaraan, hal tersebut juga bisa diperkuat melalui Peraturan Tata Tertib MPR RI yang dapat memfasilitasi agar presiden yang akan digantikan dengan presiden penggantinya bisa melakukan pisah sambut di Istana Negara. Sehingga rakyat bisa melihat peralihan kepemimpinan berjalan dengan suka cita,” pungkas Bamsoet. □



Putusan PN Jakarta Pusat Menunda Pemilu

# Ahmad Basarah: Putusan Itu Bertentangan dengan Konstitusi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda Pemilu jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas menyebutkan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan meng-hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dia berpendapat gugatan Partai Prima seharusnya diselesaikan dengan UU Pemilu, bukan hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum.

“Putusan pengadilan negeri yang meminta KPU menunda Pemilu segera jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara jelas menyebutkan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Padahal, hakim dalam memutus perkara juga harus berpedoman kepada UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi,” tandas

Ahmad Basarah, menyikapi putusan PN Jakpus itu, Kamis (2/3/23).

Pengadilan Negeri Jakpus Kamis mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan partai tersebut pada 8 Desember 2022 dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU yang menetapkannya sebagai partai dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Padaahal, setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Akibat kecerobohan itu, PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda Pemilu.

“Menghukum Tergugat untuk tidak

melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi putusan yang diketok oleh ketua majelis T. Oyong dengan anggota Bakri dan Dominggus Silaban itu.

Ahmad Basarah menjelaskan, sengketa pemilu pada dasarnya adalah permasalahan yang tunduk pada lex spesialis (hukum yang bersifat khusus) tentang hukum pemilu, dalam hal ini UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Partai Prima yang merasa dirugikan oleh verifikasi administrasi KPU hingga tidak lolos ke tahap verifikasi faktual seharusnya merupakan sengketa proses pemilu yang harus diproses lewat upaya hukum ke PTUN,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Doktor ilmu hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu menambahkan, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan bahwa sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka semua gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Karena ada upaya banding oleh KPU, maka putusan PN Jakpus itu belum berkekuatan hukum tetap. Artinya tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tandas Ahmad Basarah.

Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menegaskan dukungannya kepada KPU untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan PN Jakpus itu, dan tetap konsisten melaksanakan tahapan pemilu yang sudah disepakati bersama Pemerintah dan DPR. Upaya banding ini dinilai Ahmad Basarah sebagai langkah yang tepat dan beralasan menurut hukum. □

## Syarief Hasan: Bentuk Peningkaran & Pelanggaran Konstitusi

Meskipun Putusan PN Jakpus ini masih dapat dilakukan upaya hukum, namun terlalu banyak energi bangsa akan dihabiskan. Ini jelas bukan perkara sepele dan remeh-temeh.

**W**AKIL Ketua MPR, Syarief Hasan, menilai, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas gugatan Partai Prima dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst adalah bentuk nyata dari kekeliruan berpikir dan peningkaran terhadap amanat konstitusi.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tegas-tegas menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Rumusan norma ini telah jelas mengantar bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun. Artinya, jika pemilu dilaksanakan pada 2019 maka pemilu berikutnya wajib diselenggarakan pada tahun 2024. Maka Putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu, yang berujung pada pelaksanaan Pemilu pada 2025 adalah bentuk pelanggaran konstitusional yang nyata.

“Putusan PN Jakpus yang berakibat pada pelaksanaan pemilu di tahun 2025 ini sungguh sangatlah aneh dan patut dipertanyakan. Ada apa tiba-tiba Pengadilan Negeri memutuskan perkara kepemiluan, yang dalam hal ini sengketa proses merupakan kompetensi Bawaslu dan PTUN, atau sengketa hasil yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, kok Pengadilan Negeri yang ambil alih? Ini belum pernah terjadi, sehingga sangatlah wajar Putusan PN Jakpus ini amatlah mengejutkan. Jika persoalannya pada kapasitas berpikir maka sudah seharusnya Komisi Yudisial memeriksa Majelis Hakim yang memutuskan ini. Jangan sampai rakyat berpikir putusan ini sudah direncanakan dan disengaja,” ujar politisi senior Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, sengketa kepemiluan bukanlah yurisdiksi Pengadilan Negeri, atau bisa dikatakan Hakim PN Jakpus telah

melampaui kewenangannya (*ultra vires*), sehingga harusnya perkara ini sedari awal dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan Putusan PN Jakpus ini seakan membuka 2 kemungkinan kotak pandora. Apakah sudah sedemikian parahnya politisasi hukum, sampai-sampai lembaga yudisial digunakan untuk menjustifikasi kepentingan politik tertentu. Atau bisa juga ini karena kurangnya

Lebih lanjut, Syarief Hasan menekankan, meskipun Putusan PN Jakpus ini masih dapat dilakukan upaya hukum, namun terlalu banyak energi bangsa yang akan dihabiskan. Ini jelas bukan perkara sepele dan remeh-temeh. Ini adalah kecelakaan hukum yang sangat memilukan. Kewibawaan hukum dipertaruhkan dan akan sangat mungkin dikangkangi oleh kepentingan tertentu,” ujar Menteri Koperasi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemahaman dan kompetensi hakim dalam membuat putusan. Jika ini soalnya, pendidikan hukum bagi para hakim tentu menjadi pertanyaan lainnya. Semoga saja ini karena hakim PN Jakpus keburu sembrono dan tidak cermat membuat putusan.

“Ingatlah putusan ini membawa implikasi yang sangat serius terhadap kehidupan ketatanegaraan dan kenegaraan secara luas. Tahun 2024 kita akan menyongsong suksesi kepemimpinan di semua tingkatan: pusat dan daerah, eksekutif dan legislatif. Putusan PN Jakpus ini hanya akan menyisakan dinamika kontraproduktif dalam perjalanan bangsa. Kita semua akan disesaki ketidakpastian, bagaimana wajah demokrasi dan hukum di republik ini?,” katanya.

dan UKM di era Presiden SBY ini.

Oleh karenanya, Syarief Hasan mendesak Komisi Yudisial untuk memeriksa Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Kita juga berharap, Pengadilan Tinggi mengatensi betul perkara ini, jangan sampai ketidakcakapan atau (kesengajaan?) merusak wibawa hukum. Ingatlah, rakyat tidak akan diam melihat penyimpangan, apalagi jika konstitusi telah diingkari. Segala bentuk kesalahan harus diluruskan atau jika itu adalah kesewenang-wenangan maka harus dilawan.

“Rakyat menolak Putusan PN Jakpus yang berimplikasi pada penundaan pemilu di tahun 2025. Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, harus betul-betul bijak dan tegas untuk

membatalkan Putusan PN Jakpus ini. Jangan bermain-main atau mempermainkan demokrasi dan konstitusi,” tutup Syarief Hasan. □

## HNW: Putusan PN Jakpus Langgar Konstitusi dan UU Pemilu

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut dalam menangani perkara tersebut.

hanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi terutama juga secara jelas melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu. Saya mempertanyakan kompetensi hakim yang memutus perkara tersebut. Wajarnya, Komisi Yudisial memeriksa hakim yang memerintahkan penundaan Pemilu itu,” tukasnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (2/3).

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, menjelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi: ‘Pemilihan umum

maka menjadi harga mati bahwa pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 2024, bukan tahun 2025 sebagaimana amar putusan PN itu,” jelasnya.

Apalagi, lanjut HNW, dengan ditundanya pemilu hingga Juli tahun 2025, sebagaimana amar putusan PN, akan menimbulkan pelanggaran ketentuan Konstitusi lainnya terkait masa jabatan presiden, yang sesuai dengan pasal 7 UUD NRI 1945 akan selesai pada Oktober 2024. Sehingga kalau pemilu ditunda hingga Juli 2025 akan terjadi kekuasaan Eksekutif (Presiden dan para Menteri) dan Legislatif (DPR, DPD dan MPR) yang tidak memiliki basis legitimasi konstitusional. “Bila demikian maka akan terjadi chaos politik yang membahayakan eksistensi dan kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tukasnya.

Selain itu, HNW juga menilai bahwa PN Jakarta Pusat seharusnya tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut dalam menangani perkara tersebut. Ia merujuk kepada aturan dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengarahkan sengketa proses pemilu itu diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri (peradilan umum).

“Di ketentuan tersebut secara spesifik diatur apabila ada sengketa antara KPU dan Parpol terkait dengan verifikasi partai politik, maka diselesaikan di PTUN. Sangat jelas dan tegas aturannya seperti itu. Jadi pengadilan negeri seharusnya tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut apalagi dengan amar putusan yang membuat gaduh, yang potensial ditunggangi oleh mereka yang masih bermanuver untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dengan penundaan Pemilu. Maka wajar bila para pakar HTN, Mantan Ketua MK, dan aktivis yang terhimpun dalam Perludem tegas menolak keputusan Hakim PN Jakarta Pusat itu,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW memaparkan bahwa pembentuk UU Pemilu menyadari bahwa adanya hal khusus dalam perkara-perkara menyangkut pemilu, sehingga Mahkamah Agung (MA) dapat membentuk Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu di PTUN, sebagaimana diamanatkan Pasal 472. Majelis khusus ini diisi oleh para hakim yang mempunyai pengetahuan yang luas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengkritik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang “memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu, dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang konsekwensinya Pemilu 2024 ditunda,” sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dikoreksi oleh pengadilan di atasnya.

“Putusan PN Jakarta Pusat tersebut bukan

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.’

Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak diucapkannya putusan, tak sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Karena, menurut HNW, pemilu yang akan datang baru bisa diselenggarakan pada akhir Juli tahun 2025. Itu jelas melanggar ketentuan UUD bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Dengan amar putusan PN itu, pemilu tidak bisa diselenggarakan 5 tahun sekali, karena pemilu terakhir dilaksanakan pada 2019,



mengenai pemilu.

“Jadi, hakim yang memutuskan perkara terkait Pemilu seperti itu bukan sembarangan hakim. Dia harus memiliki pengetahuan luas tentang pemilu. Maka kalau para hakim tersebut memiliki pengetahuan luas tentang pemilu mustahil mereka akan membuat putusan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU tentang Pemilu seperti yang terjadi dengan amar putusan menunda pemilu oleh hakim PN Jakarta Pusat itu,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga baru saja membuat putusan yang sesuai Konstitusi, yaitu menolak gugatan para pihak terkait pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 periode. Maksudnya, MK menegaskan bahwa sesuai UUD NRI Tahun 1945, Pemilu termasuk Pemilihan Presiden tetap dilaksanakan pada tahun 2024, lima tahun sesudah diadakannya Pemilu yang terakhir tahun 2019, bukan diundur hingga 2025 seperti diputuskan oleh PN Jakarta Pusat. “Hakim yang menguasai masalah Pemilu tentunya memahami esensi keputusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, sehingga tidak malah membuat putusan yang tak sejalan dengan Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

HNW mengatakan, putusan yang membuat gaduh ini mestinya tidak dibuat, karenanya penting segera dikoreksi dan dibatalkan di tingkat banding oleh pengadilan tinggi. HNW mengapresiasi sikap KPU yang langsung menyatakan banding, itu berarti putusan PN itu belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tahapan Pemilu tetap harus terus dilaksanakan. Ia juga berharap, KPU dapat benar-benar menjadikan peristiwa gugatan ini sebagai koreksi atas celah ketidak profesionalannya, agar tidak terulang lagi pada tahapan Pemilu berikutnya.

“Agar KPU benar-benar fight untuk menjaga agar agenda pemilu tidak terganggu, dan ketentuan Konstitusi tetap ditaati. Dan, juga perlu ada perbaikan bagi KPU agar kinerja selanjutnya lebih profesional dan tidak melakukan kesalahan yang berpotensi membuat gaduh dan terhambatnya pelaksanaan pemilu, juga menghindarkan tidakpercayaan rakyat terhadap pemilu, dan untuk menyelamatkan legitimasi hasil Pemilu,” pungkasnya. □

## Arsul Sani Raih Gelar Doktor Hukum dari Collegium Humanum, Polandia

**W**AKIL Ketua MPR RI Arsul Sani diwisuda sebagai doktor hukum (doctor of laws) dengan predikat sangat memuaskan (cum laude) dari Collegium Humanum - Warsaw Management University, Polandia. Arsul Sani meraih predikat doctor hukum melalui perjuangan cukup panjang. Dia memulai program doktor-nya di Department of Law, Glasgow School for Business and Society, GCU - Scotland sebelum terpilih sebagai anggota DPR-RI tahun 2014.

Dalam disertasi berjudul: “Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings,” Arsul, antara lain, mengkritisi sejumlah studi sebelumnya tentang sejarah terorisme di Indonesia, dan perbedaan proses hukum dalam kasus-kasus pidana yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme.

Kritik-nya tentang penulisan sejarah terorisme di Indonesia terkait dengan sejumlah studi yang menyebutkan bahwa awal terorisme dikaitkan dengan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Padahal, perbuatan teror yang kemudian masuk dalam pengertian terorisme telah dimulai menjelang pemberontakan PKI Madiun oleh pengikut atau pendukung PKI, yang kemudian melahirkan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.

Menurut Arsul, seharusnya sejarah terorisme di Indonesia dicatat dengan perbuatan teror oleh pengikut PKI, baru diikuti oleh pengikut DI/TII yang terjadi setelah pemberontakan PKI Madiun.

Bahasan kritis kedua yang menjadi obyek penelitian Arsul adalah sejumlah kasus hukum di mana terjadi perbedaan perlakuan dan proses hukum atas tindak pidana yang sama-sama memenuhi unsur terorisme. Dalam beberapa kasus di Aceh, pasca perjanjian Helsinki, penegak hukum



menerapkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun dalam kasus-kasus yang sama-sama memenuhi unsur terorisme di Papua, UU Terorisme ini tidak diterapkan, dan para pelakunya hanya dikenakan tindak pidana umum dalam KUHP.

Bahkan, lebih jauh dalam disertasi-nya, Arsul mengkritisi keragu-raguan Pemerintah dan jajaran penegak hukum sampai sekarang untuk mempergunakan UU Terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, padahal Pemerintah sendiri telah melabeli kelompok ini sebagai kelompok sparatis-teroris (KST) sejak pertengahan tahun 2021. □



**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**

Ketua MPR RI

## Merespons Pesan Anak Desa Tentang Pembangunan SDM

**P**EMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) masih berselamatkan sejumlah masalah mendasar. Beragam data resmi terkini memberi bukti tentang kecenderungan itu. Jika tidak segera ditangani sejak dini dengan sungguh-sungguh, ragam permasalahan itu akan mempersulit upaya mewujudkan bonus demografi yang kualifaid pada dekade 2040-an.

Sudah diungkap berulang kali bahwa Indonesia akan mendapat bonus demografi pada dekade 2040-an. Bonus demografi itu memberi gambaran bahwa 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif. Kalau lebih dari 100 juta jiwa usia produktif itu kualifaid seturut kebutuhan zamannya, dia tidak sekadar solutif, melainkan juga menjadi fondasi kokoh bagi aspek ketahanan nasional. Sebaliknya, jika komunitas usia produktif itu tidak terampil atau tidak berkeahlian, mereka menjadi angkatan kerja yang akan membebani negara.

Maka, kalkulasi tentang bonus demografi dekade 2040-an itu hendaknya dimaknai sebagai peringatan sekaligus faktor pendorong untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun SDM sejak dini. Tentu saja perencanaan dan program yang dijabarkan dalam pembangunan SDM itu harus beradaptasi dengan perubahan zaman, serta berpijak pada proyeksi atau perkiraan akan kebutuhan keahlian serta kompetensi di masa depan. Karena persaingan di masa depan diasumsikan akan sangat ketat, pembangunan SDM harus berfokus pada tekad

menyiapkan dan menghadirkan angkatan kerja yang kualifaid seturut kebutuhan zamannya.

Karena itu, gagasan serta semangat mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 pun menjadi sangat relevan bagi negara untuk memberi perhatian ekstra pada aspek pembangunan SDM. Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan dengan berfokus pada pembangunan empat pilar. Sudah barang tentu Pembangunan SDM demi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pilar utama. Dengan SDM yang kualifaid, Indonesia pada saatnya ditargetkan mampu meraih status negara maju karena skala dan nilai perekonomiannya masuk jajaran empat besar dunia.

Untuk mewujudkan aneka target Indonesia Emas 2045 itu, semua komponen bangsa diajak untuk realistis memahami di mana posisi bersama saat ini, terutama tentang progres pembangunan SDM dewasa ini. Suka tidak suka, harus diakui bahwa sejumlah masalah mendasar masih terbentang nyata. Ragam masalah itu bisa dijumpai di mana saja, di pelosok-pelosok desa hingga kota-kota besar, termasuk Jakarta. Dan, semua itu menjadi penjelasan bahwa masih begitu banyak masyarakat yang belum dijangkau atau dilayani oleh proses pembangunan yang sedang berjalan hingga sekarang ini.

Ragam permasalahan itu bisa dilihat dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistika (BPS).

Ada data tentang kemiskinan ekstrim, termasuk di Jakarta dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Data atau catatan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) juga harus mendapat perhatian khusus. Menurut BKKBN, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Angka kematian bayi mencapai 24 per 1.000 kelahiran, sedangkan angka kematian ibu tercatat 230 per 100 ribu kelahiran hidup.

Dari data BPS pula setiap orang bisa mengetahui bahwa banyak bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) gagal tumbuh ideal karena menderita kurang gizi kronis (stunting). Menjelang akhir Januari 2023, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa prevalensi stunting masih di kisaran 21,6 persen pada 2022.

Pembangunan SDM pun masih diwarnai dengan kasus anak-anak putus sekolah. BPS mencatat fakta tentang peningkatan jumlah anak-anak yang putus sekolah pada 2022. Anak putus sekolah terdapat pada semua jenjang pendidikan, dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka putus sekolah disebabkan banyak faktor, seperti kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan hingga faktor kesehatan.

Perubahan pola kegiatan belajar-mengajar akibat Pandemi Covid-19 pun berdampak kepada banyak anak. Sekolah daring menghadirkan konsekuensi biaya yang masih sulit dijangkau oleh banyak orang tua. Misalnya, karena keterbatasan penghasilan orang tua, anak-anak kesulitan memiliki perangkat digital, termasuk untuk membeli kuota internet.

Akhirnya, pesan anak-anak dari desa yang ditujukan kepada pemerintah sangat layak untuk disimak. Esensi pesan itu masih tentang sulitnya membangun SDM. Anak-anak dari banyak desa masih mengalami sejumlah kesulitan untuk, misalnya, sekadar belajar atau menempuh perjalanan ke sekolah. Anak-anak itu mengalami kesulitan karena pemukiman di desanya belum dialiri daya listrik. Anak-anak lainnya menghadapi sejumlah rintangan untuk pergi ke sekolah karena infrastruktur di desanya tidak memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak adanya jembatan

untuk menyeberangi sungai.

“Pak Jokowi tolong bantu kami, kami sudah lelah belajar pakai lampu minyak tanah. Tolong kasih kami listrik,” pinta dua murid sekolah dasar dari sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, belum lama ini, sebagaimana dikutip dari *Kompas.Com*. Mereka, tentu saja, juga belum terjangkau jaringan internet. Dari desa lain, para pelajar minta pemerintah membangun jembatan agar mereka bisa menyeberangi sungai dengan aman dan nyaman dalam perjalanan menuju sekolah.

Persoalan lain yang juga harus disikapi adalah kesulitan orang muda dan anak-anak untuk masuk dalam arus proses transformasi digital. Ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni hendaknya segera dipercepat. Cakupan jaringan internet hendaknya dapat menjangkau semua wilayah tanah air, dengan kualitas jaringan yang dapat diandalkan. Soalnya, masih begitu banyak sekolah belum terjangkau jaringan internet dan ribuan sekolah lainnya belum mendapat aliran daya listrik.

Fakta ini hendaknya mendapat perhatian khusus, karena sekolah dan kampus menjadi wadah bagi anak-anak dan orang muda menimba ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertransformasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Demi terwujudnya target Indonesia Emas 2045, tidak boleh ada warga negara yang minim akses untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi, tidak berlebihan jika jaringan internet di dalam negeri dapat menjangkau 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota dan 83.381 desa.

Pesan dari anak-anak desa itu memberi gambaran tentang sebagian masalah riil dalam lingkup pembangunan SDM. Rangkaian masalah riil itu harus segera direspons agar pada saatnya nanti semua komunitas anak bangsa kualifaid mewujudkan profil Indonesia Emas 2045. □

## Menghitung Biaya Perjalanan Haji

Terjadi kesepakatan antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp 49,8 juta. Dalam rapat juga disepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diputuskan sebesar Rp 90 juta. Sebelumnya diusulkan oleh Menteri Agama besaran Bipih di angka Rp 69 juta dan BPIH Rp 98,8 juta. Apa pendapat wakil rakyat terhadap keputusan final biaya haji itu?

**Ahmad Muzani**, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra

### Ini Merupakan Keputusan Politik

**M**ENYAMPAIKAN terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Agama karena telah menetapkan, ongkos naik haji (ONH) diturunkan menjadi Rp 49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta. Para Ibu dan Bapak yang terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya. Sementara untuk jemaah haji tahun 2021-2022 untuk bisa berangkat hanya menambah Rp 9 juta. Sementara untuk jemaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH sebesar Rp 49 juta.

Meskipun angka itu belum ideal, tapi ini sudah menjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jemaah haji kita. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, dan tentu saja kepada Presiden Jokowi.

Turunnya biaya haji dari 69 juta menjadi 49 juta itu karena keputusan politik. Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji itu bisa ditekan. Kerja-kerja inilah yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke-15 tahun.

Jadi politik itu adalah pangkal dari semua keputusan. Politik adalah ujung dari semua urusan rakyat. Partai politik adalah sebuah institusi penting dalam pengambilan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara. Partai politik tugasnya adalah penyambung lidah rakyat.

Maka ketika pemerintah mengumumkan kenaikan biaya haji yang membuat banyak orang terkaget-kaget ketika Kementerian Agama mengumumkan, biaya haji reguler menjadi Rp 69 juta. Padahal (biaya haji) yang lalu di bawah Rp 40 juta. Atas dasar itu, kami memerintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ONH reguler naik tidak

terlalu tinggi. Dan, akhirnya diputuskanlah ONH reguler menjadi Rp 49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta.

Rakyat Indonesia yang sudah mengantre puluhan tahun untuk naik haji, mereka kebanyakan adalah orang-orang kecil. Mayoritas dari mereka adalah pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan orang-orang kecil lainnya yang sedikit demi sedikit menabung untuk berhaji di usia tuanya. □

AWG

**Bukhori Yusuf**, Anggota MPR Fraksi PKS

## Masih Memberatkan Jamaah

**A**NGGOTA Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyatakan, penolakannya terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2023. Hal ini disampaikan Bukhori dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu (15/02).

Alasan penolakan biaya BPIH dan Bipih tahun 2023 seperti diusulkan Kemenag, salah satunya karena nominal biaya haji tahun ini dirasa masih memberatkan masyarakat. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, di mana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat maka akan sangat memberatkan jemaah.

Sebenarnya, biaya yang harus dibebankan langsung kepada jemaah (Bipih) sebesar Rp 49.812.700,26, masih terlalu besar di tengah beban masyarakat yang sangat berat. Hal demikian belum mencerminkan rasa keadilan bagi calon jemaah haji 2023.

Fraksi PKS belum puas dengan kinerja BPKH selama ini. Kinerja BPKH jauh dari harapan, karena hingga saat ini capaian



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dana manfaat rata-rata hanya menyentuh kisaran 3,5 hingga 7% per tahun, padahal biaya yang diperlukan setiap tahunnya lebih dari Rp 9 triliun. Meski pengelolaan keuangan haji yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, tetapi pola pembiayaan terhadap penyelenggaraan haji tetap masih saja dilakukan dengan kurang efisien.

Bukhori menyatakan, ketidaksiapannya terhadap penyesuaian biaya komponen pembentuk BPIH akhir yang diajukan Pemerintah. Terhadap lima komponen

pembentuk BPIH tersebut, yakni penerbangan, perhotelan, permakanan, masyair, dan durasi waktu penyelenggara haji, pemerintah dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, fraksinya memandang usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, selama ini dalam merasionalisasi lima komponen penyumbang terbesar BPIH sebagaimana yang disinggung di atas kami nyatakan belum memuaskan. □

AWG

Pelantikan Pengurus GM FKPPi Kabupaten Malang

# Ahmad Basarah Ajak GM FKPPi Waspada Penumpang Gelap Demokrasi

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, minta kader GM FKPPi turun ke desa-desa dengan program-program nyata, karena garda terdepan ketahanan nasional ada di desa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPi), Ahmad Basarah, mengajak pengurus dan anggota GM FKPPi untuk tidak surut satu langkah pun untuk mengawal dan mengamalkan ideologi Pancasila dan eksistensi NKRI di tengah suhu politik yang cenderung memanas jelang Pemilu 2024. Ia mengingatkan, telah beberapa kali terjadi politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) oleh penumpang gelap demokrasi yang memanfaatkan momentum kampanye pemilu lalu. Gerakan yang mempolitisasi perbedaan SARA dalam setiap momentum pemilu tersebut telah terbukti sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Beberapa tokoh partai politik juga tidak segan-segan secara terbuka mengamplifikasi politik identitas saat momentum pemilu hanya demi kepentingan elektoral.

“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa akibat lemahnya kaderisasi dan pola rekrutmen di tubuh internal partai politik, sejumlah besar kontestan lalu menggunakan politik SARA dan politik identitas saat berkampanye. Ini bukan kesimpulan saya, melainkan kesimpulan organisasi Per-

kumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),” tegas Ahmad Basarah, dalam orasinya saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang GM FKPPi Kabupaten Malang masa bakti 2022 – 2027 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (7/3/23).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Angraini, pernah menyampaikan kesimpulan organisasi yang dipimpinnya bahwa maraknya politik benuansa SARA serta politik identitas di banyak kampanye pemilihan kepala daerah akibat lemahnya kaderisasi di tubuh banyak parpol. “Jadi, pertaruangannya bukan lagi soal program, visi dan misi para kandidat, tetapi lebih soal isu SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan keberagaman,” kata Titi dalam diskusi bertajuk “Tahun Politik yang Menentukan: Prosedural belum Substansial” di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Ahmad Basarah menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian Perludem itu, persatuan dan kesatuan bangsa sedang berada dalam ancaman, sebab ujaran kebencian akan sangat marak selama proses kampanye berlangsung. Bahkan, kata dia, sangat mungkin di tengah politisasi SARA itu, secara diam-diam atau terbuka akan masuk propa-

ganda ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Dalam kondisi seperti itu, kader-kader GM FKPPi harus mewaspada bahwa sebagai anak biologis dan ideologis TNI dan Polri harus sigap menghadapi dan melawan gerakan ideologi politik yang akan meruntuhkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945,” tegas Ahmad Basarah.

Dalam acara yang bertajuk “Berjuang Bergerak Bergotong Royong Untuk Persatuan Bangsa” itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pelantikan pengurus GM FKPPi yang dilakukannya bukanlah sekadar formalitas distribusi jabatan, melainkan wujud nyata hadirnya organisasi GM FKPPi untuk memperkuat ketahanan nasional dari gempuran ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia.

“Untuk itulah saya minta kepada kader GM FKPPi untuk turun ke desa-desa dengan program-program nyata karena garda terdepan ketahanan nasional ada di desa,” ujar Ahmad Basarah.

Sementara itu, Bupati Malang H.M. Sanusi yang secara resmi menyerahkan bantuan satu unit ambulans untuk GM FKPPi Cabang Kabupaten Malang berharap, organisasi anak-anak purnawirawan tentara dan polisi ini bisa bergerak cepat saat masyarakat membutuhkannya. Misalnya, saat terjadi bencana alam atau situasi darurat lainnya.

“GM FKPPi harus terlibat aktif memajukan daerah Malang Raya. Saya sedang bergerak cepat mempromosikan desa wisata di Malang. GM FKPPi saya harapkan dapat terlibat dalam program-program pembangunan Kabupaten Malang,” pinta Sanusi.

Hadir dalam acara itu Dandim 0818/Malang-Batu Letnan Kolonel Inf Taufik Hidayat, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Komandan Lanud Abdurrahman Saleh Kolonel Pnb Fairyanto, dan Ketua PD XIII GM FKPPi Jatim, R Agoes Soerjanto. □



## Beragam Budaya Menyambut Bulan Puasa

Menjelang bulan puasa, Ramadan, di berbagai tempat, masyarakat menyambut bulan suci dengan berbagai macam budaya dan tradisi. Kebiasaan itu sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Mereka mencontoh kebiasaan Sunan, Sultan, Ulama, menjelang puasa satu bulan penuh. Tradisi dan budaya yang dilakukan oleh warga masyarakat itu membuat Ramadan menjadi semarak dan meriah.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**B**ERIKUT budaya dan tradisi yang masih dilakukan oleh umat Islam menjelang Ramadan.

### Dugderan

*Dugderan* merupakan tradisi tahunan masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah, sebelum Ramadan. Di *kebudayaan.pdkjateng.go.id* diuraikan secara jelas tradisi itu. Menurut cerita pada 1881 M di masa Bupati KRMT Pubraningrat, berkembang sebuah tradisi berupa arak-arakan menyambut bulan Ramadan, masyarakat menyebut dengan istilah *Dugderan*. Setelah umat Islam melaksanakan salat ashar, tepat sehari menjelang Ramadan, pukulan bedug Masjid Besar Kauman terdengar, disusul dengan penyulutan meriam di halaman Kabupaten Kanjengan. Bedug mengeluarkan bunyi “dug” dan meriam mengeluarkan bunyi “der” yang berkali-kali, dan akhirnya menjadi istilah *Dugderan*.

Dalam *website* tersebut lebih lanjut diceritakan, masyarakat berbondong-bondong keluar setelah mendengar suara *dug* dan *der* di alun-alun masjid. Lalu keluarlah bupati dan imam masjid besar (Kyai Tafsir Anom) memberi sambutan dan pengumuman. Tujuan diciptakannya tradisi itu ialah untuk mengumpulkan segenap lapisan masyarakat dalam suasana suka cita untuk bersatu, berbaur, dan bertegur sapa tanpa pembedaan.

Prosesi *Dugderan* terdiri dari tiga agenda, yakni: Pasar malam *Dugderan*, prosesi ritual pengumuman awal puasa, dan kirab budaya *Warak Ngendog*. Ketiga agenda itu menjadi satu kesatuan tradisi *Dugderan* dan masih dilestarikan hingga kini.

Dijelaskan dalam *website* itu bahwa *Warak Ngendog* merupakan sebuah karya fenomenal berupa seekor binatang khayalan yang menarik perhatian masyarakat sekitar, serta sebagai simbol tradisi *Dugderan* yang diadakan menjelang Ramadhan. *Warak ngendog* adalah salah satu unsur utama tradisi *Dugderan*.

Diceritakan, pada dahulu kala *Warak Ngendog* dikenal sebagai hewan mitologi yang sakti oleh warga Semarang. Bentuknya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

adalah perpaduan kambing pada bagian kaki dan naga di bagian kepala, serta buraq di bagian badannya. Kata “Warak Ngendog” berasal dari dua kata, *Warak* yang artinya “Wara” atau suci dan *Ngendog* yang artinya bertelur. Diartikan bahwa siapa saja yang menjaga kesucian di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala. *Warak Ngendog* pun dari dulu hingga kini dijadikan sebagai maskot Kota Semarang.

*Dugderan* seperti dijelaskan dalam *kebudayaan.pdkjateng.go.id* juga dimaknai sebagai afirmasi dalam mengokohkan keimanan serta rasa syukur bisa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan suka

cita, namun tetap sederhana. Selain itu, tradisi *Dugderan* sebagai edukasi bagi anak-anak untuk melaksakan ibadah puasa. Bentuk edukasi lainnya yang terdapat dalam perayaan tersebut dilambangkan dengan *Warak Ngendog* yang bermakna, seseorang haruslah suci, bersih dan memantapkan ketaqwaan kepada Allah dalam menjalani puasa. □

### Padusan

*Padusan* berasal dari kata *adus* yang berarti mandi. *Padusan* merupakan tradisi masyarakat Jawa (Jawa Tengah dan Yogyakarta) untuk menyucikan diri,







membersihkan jiwa dan raga, dalam menyambut datangnya bulan suci. Tradisi yang merupakan warisan leluhur dilakukan secara turun-temurun ini dijalani dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Tujuan dari *Padusan* ini adalah agar saat Ramadan datang kita dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin ([indonesia.go.id](http://indonesia.go.id)).

Diceritakan dalam website itu, bila ditelisik lebih jauh, *Padusan* memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai media untuk merenung dan instropeksi diri dari berbagai kesalahan yang telah dibuat pada masa lalu. Oleh karena itu, semestinya ritual ini dilakukan seorang diri di tempat yang sepi.

Dalam sepi diharapkan muncul kesadaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kondisi hening akan hadir keyakinan dan kesadaran untuk melangkah memasuki bulan Ramadan yang suci sebagai pribadi yang lebih baik lagi.

Akan tetapi, seperti diceritakan dalam [Indonesia.go.id](http://Indonesia.go.id) itu, akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran nilai terhadap ritual yang merupakan tradisi leluhur ini. *Padusan* yang semestinya dilakukan seorang diri, kini telah berubah menjadi mandi, keramas atau berendam beramai-ramai di satu mata air, sehari sebelum menjalani ibadah puasa Ramadan. Ritual yang semestinya bersifat sakral ini pun telah berubah menjadi komoditi pariwisata. □

### Kuramasan

Bila di Jawa Tengah dan Yogyakarta ada *Padusan* maka di Kampung Adat Miduana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada *Kuramasan*. Dalam [travel.kompas.com](http://travel.kompas.com), 27/03/2022, diungkapkan, tradisi *Kuramasan* dilakukan dengan mandi besar atau keramas sehingga bernama *Kuramasan*. Tempat *Kuramasan* berada di Sungai Cipandak. *Kuramasan* biasa dilakukan menjelang bulan Ramadan.

Dalam liputan website itu diceritakan, saat *Kuramasan* sejak pagi hingga tengah hari, para warga mendatangi Sungai Cipandak, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Sebelum prosesi mandi massal, warga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memanjatkan niat dan doa yang dipimpin oleh pemimpin adat. Setelah didoakan, warga turun ke sungai tanpa melepas baju. Setelah selesai mandi, warga sekaligus membersihkan sungai dari sampah dengan mengangkatnya ke pinggir sungai.

Selanjutnya [travel.kompas.com](http://travel.kompas.com) menceritakan, rangkaian *Kuramasan* dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama yang disebut dengan mayor di tepi sungai. Semua prosesi dilakukan dengan gotong royong penuh suka cita oleh masyarakat adat Miduana. *Kuramasan*, sebagaimana dijelaskan dan dalam web itu, mengandung makna

menyucikan diri menjelang bulan suci Ramadan. Bagi warga adat Miduana, Ramadan adalah bulan yang sangat sakral dan agung. Untuk itu penting membersihkan diri secara lahir dan batin menyambut bulan suci. Harapannya, warga Kampung Adat Miduana dapat menjalani bulan Ramadan dengan kondisi suci secara lahir dan batin. □

### Meugang

Dalam *Wikipedia* disebut *Meugang* adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. *Meugang*



atau *Makmeugang* adalah tradisi menyembelih hewan kurban berupa kambing atau sapi dan dilaksanakan setahun tiga kali, yakni Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai ratusan. Selain kambing dan sapi, masyarakat juga menyembelih ayam dan bebek.

Dijelaskan dalam website itu, *Meugang* di desa biasanya berlangsung satu hari sebelum bulan Ramadan atau hari raya, sedangkan di kota berlangsung dua hari sebelum Ramadan atau hari raya. Biasanya masyarakat memasak daging di rumah, setelah itu membawanya ke mesjid untuk makan bersama tetangga dan warga yang lain.

Diceritakan *Wikipedia*, tradisi ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu di Aceh. *Meugang* dimulai sejak masa Kerajaan Aceh. Pada tahun 1607-1636 Masehi, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kemakmuran rakyatnya dan rasa terima kasih kepada rakyatnya. Setelah Kerajaan Aceh ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873, tradisi ini tidak lagi dilaksanakan oleh raja. Sebab telah mengakar dalam kehidupan masyarakat maka *Meugang* tetap dilaksanakan hingga saat ini dalam kondisi apapun. Tradisi *Meugang* juga dimanfaatkan oleh pahlawan Aceh dalam bergerilya, yakni daging sapi dan kambing diawetkan untuk perbekalan.

Di *Wikipedia* disebut esensi *Meugang*. Setiap perayaan *Meugang*, seluruh keluarga atau rumah tangga memasak daging dan disantap oleh seisi rumah. Pantang jika keluarga tidak memasak daging pada hari *Meugang*. *Meugang* memiliki nilai religius karena dilakukan pada hari-hari suci umat Islam. Masyarakat percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan wajib disyukuri dalam bentuk tradisi *Meugang*. □

## Megengan

Bila di Aceh ada *Meugang* maka di masyarakat Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta ada *Megengan*.

Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan. Di *Wikipedia* disebutkan, kata *Megengan* diambil dari bahasa Jawa yang artinya *ngempet* (menahan). Tradisi ini mengingatkan kepada umat Islam bahwa sebentar lagi akan memasuki Ramadan.

Ada banyak versi dari tradisi *Megengan*. Di sebagian masyarakat Jawa, dalam *Megengan* mereka saling mengirim makanan dalam *besek* (kotak yang terbuat dari bambu), sekarang diganti dengan kotak kardus atau bentuk lainnya, kepada tetangga. Di antara mereka saling kirim. Jadi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

saat *Megengan* makanan berlimpah.

Versi yang lain, seperti diceritakan dalam *Wikipedia*, masyarakat berbondong-bondong berziarah kubur membersihkan makam serta menaburi bunga di atasnya dan tidak lupa mendoakannya. Setelah itu, *Megengan* dimulai pada waktu petang hari dengan dihadiri oleh masyarakat. Masyarakat di suatu tempat, rumah atau balai pertemuan duduk bersila di atas tikar. Di hadapan mereka terdapat berbagai macam sajian tradisional sebagai sajian untuk acara *Megengan*. Salah satu pihak, yang dituakan, selanjutnya mengungkapkan kajat-nya (keinginan, hajat). Setelah itu dilantunkan doa supaya mereka diberikan keselamatan, rejeki, kebahagiaan, dan kesehatan dari Allah.

*Megengan* selain biasanya dilakukan dari

rumah ke rumah juga ada yang dilaksanakan di musholla atau masjid. Para warga membawa ambengan-nya masing-masing ke langgar atau masjid, dan mereka melakukan doa bersama yang dipimpin oleh seorang *sesepuh* lingkungan. □

## Mohibadaa

*Mohibadaa* merupakan tradisi turun-temurun yang dilestarikan para perempuan di Gorontalo, khususnya menjelang bulan Ramadan. Tradisi unik ini dilakukan para perempuan Gorontalo untuk menjaga dan mempercantik kulit mereka selama Ramadan.

Lebih lanjut tentang *Mohibadaa* yang diulas dalam *kumparan.com*, *Mohibadaa* dilakukan dengan cara membalurkan masker yang terbuat dari rempah-rempah. Ramuan masker tersebut, yaitu tepung beras, *humopoto* (kencur), *bungale* (bangle), dan *alawahu* (kunyit). Untuk mendapatkan khasiat maksimal, disarankan menggunakan campuran tepung beras ketan agar hasil adonan masker lebih halus.

Dalam website tersebut diungkap, untuk membuatnya pun sederhana dan cukup mudah. Cara membuat ramuan *Mohibadaa* juga cukup sederhana. Pertama, beras ketan direndam. Kedua, beras yang sudah direndam kemudian ditumbuk bersama aneka rempah hingga tercampur halus, seperti tepung. Ketiga, ramuan *Mohibadaa* siap



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dioleskan ke wajah.

Lebih lanjut diceritakan, jika tidak ingin repot, paket rempah tradisional ini bisa dibeli di pasar tradisional dengan harga sekitar Rp 15 ribu per pakatnya. Perawatan kecantikan kulit wajah secara tradisional ini sebetulnya dapat dilakukan kapan pun, namun di Gorontalo tradisi *Mohibadaa* ini menjadi lebih ramai saat bulan puasa atau bulan Ramadan.

Menurut paparan dalam website itu, karena biasanya pada saat puasa kulit akan cenderung lebih kering dan kusam, menggunakan masker *Mohibadaa* ini dapat membuat kulit lebih segar, tidak kering, dan

sehat berseri. Selain itu, manfaat lainnya adalah dapat membuat kulit lebih kencang dan menghilangkan kerutan. □

### Nyorog

Dalam [dinaskebudayaan.jakarta.go.id](http://dinaskebudayaan.jakarta.go.id) diulas, *Nyorog* adalah tradisi masyarakat Betawi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan yang dilakukan dalam tradisi *Nyorog* adalah berbagi bingkisan makanan ke sanak saudara dan keluarga yang tinggalnya berjauhan. Sebab, masyarakat Betawi pada zaman dulu memiliki tempat tinggal yang berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Pada masa itu antara

rumah satu dengan rumah lainnya dibatasi oleh hutan atau kebun yang luas.

Dijelaskan dalam website itu, bingkisan makanan yang dikirimkan dalam tradisi *Nyorog* ini berupa kue-kue, atau bahan makanan mentah, yaitu gula, susu, kopi, sirup, beras, ikan bandeng, dan daging kerbau. Terkadang bingkisan dari *nyorog* itu berupa makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang, misalnya saja sayur gabus pucung.

Lebih lanjut diceritakan, tradisi ini dilakukan sebagai tanda penghormatan dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Biasanya dilakukan oleh anak muda atau pasangan yang baru menikah ke orang tua mereka masing-masing.

Menurut asal muasal (dikutip dari berbagai sumber), *Nyorog* berasal dari tradisi 'Sedekah Bumi' dan 'Baritan'. Keduanya merupakan ritus upacara adat yang merupakan refleksi dari interaksi manusia, lingkungan, dan kepercayaan kepada Sang Pencipta.

Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa, masyarakat sering membawakan makanan untuk sesajen yang akan dipersembahkan kepada Dewi Sri yang merupakan simbol dari kemakmuran. Kegiatan tersebut dijadikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Dewi Kemakmuran.

Kemudian setelah datangnya Islam, tradisi *Nyorog* dijadikan simbol penghormatan dan silaturahmi kepada orang yang lebih tua atau para sesepuh kampung yang dihormati. Ada pun sumber lain yang menyebutkan, tradisi *Nyorog* telah dilakukan masyarakat Betawi sejak tahun 1800-an. Tradisi *Nyorog* diperkenalkan para wali saat menyebarkan ajaran Islam.

Dalam [dinaskebudayaan.jakarta.go.id](http://dinaskebudayaan.jakarta.go.id) lebih lanjut dikatakan, tradisi *Nyorog* tak hanya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, ada yang dilakukan menyambut Idul Fitri atau Lebaran. Tradisi *Nyorog* juga bisa ditemukan dalam prosesi upacara pernikahan. Biasanya, pihak keluarga mempelai laki-laki mendatangi keluarga mempelai perempuan sebelum lamaran



dengan membawa sorogan atau bingkisan makanan. □

### Nyadran

*Nyadran* adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Salah satunya yang diadakan oleh masyarakat Demak, Jawa Tengah. Tradisi *Nyadran* dilakukan pada bulan ruwah menjelang bulan puasa. Biasanya *Nyadran* dilakukan di makam leluhur atau makam tokoh yang banyak berjasa bagi syiar agama pada masa lampau. Demikianlah ulasan tentang *Nyadran* yang termuat di *kebudayaan.pdkjateng.go.id*.

Lebih lanjut dikatakan, tradisi itu memiliki makna simbolis, yakni hubungan diri orang Jawa dengan para leluhur, sesama manusia, dan dengan Tuhan. Tradisi *Nyadran* intinya berupa ziarah kubur pada bulan Sya'ban (Arab), atau *Ruwah* dalam kalender Jawa. Ziarah dengan membersihkan makam leluhur, memanjatkan doa permohonan ampun, dan tabur bunga menjadi simbol bakti dan ungkapan penghormatan, serta terima kasih seseorang terhadap para leluhurnya. Makna yang terkandung dalam persiapan puasa di bulan Ramadan, yakni supaya mendapatkan berkah dan ibadah yang dilakukan diterima Allah. Lewat ritual *Nyadran*, masyarakat Jawa melakukan penyucian diri.

Dijelaskan dalam website itu, *Nyadran* dan ziarah kubur sendiri berbeda, di mana waktu pelaksanaan ritual *Nyadran* ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas di daerah tersebut. Di hampir semua desa, pihak yang berwenang menentukan waktu *Nyadran* adalah juru kunci atau sosok yang paling dituakan dalam masyarakat. *Nyadran* dilakukan secara bersama dengan melibatkan semua warga desa. Ritual *Nyadran* biasa dilakukan di dua pusat bangunan desa, yakni makam dan masjid. Setelah melakukan bersih makam, acara beralih pada kenduri yang biasanya di gelar di masjid atau makam desa. Sebagaimana kenduri pada umumnya, dilakukan dengan berdoa dan makan nasi berkatan, berupa nasi tumpeng dengan lauk ingkung ayam, urapan, buah-buahan, serta jajan.



FOTO-FOTO: ISTMIMEWA

Lebih lanjut diulas, di beberapa desa di Demak yang tradisi *Nyadran*-nya masih kuat, masyarakat meletakkan aneka sesaji dalam sebuah tenong, yaitu nampun bulat yang terbuat dari anyaman bambu, dengan alas daun pisang atau daun jati. Satu tenong dikepong beberapa orang sekaligus. Ketika acara doa atau tahlilan selesai, maka mereka akan makan beramai-ramai. Makna simbolis dari ritual *Nyadran* atau Ruwahan, yakni saat memasuki bulan Ramadan atau puasa, mereka harus benar-benar bersih dengan cara berbuat baik pada sesama dan lingkungan sosialnya. Melalui rangkaian tradisi *nyadran* itulah orang Jawa, khususnya masyarakat Demak, akan merasa lengkap dan siap untuk memasuki

Ramadan, bulan suci yang penuh berkah itu. Sebab, bagi orang Jawa, *Nyadran* juga berarti sebuah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan, serta menunjukkan bakti kepada para leluhur mereka. □

### Arwah Jamak

Dalam *suaramerdeka.com* dikatakan *Arwah Jamak* adalah tradisi yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan orangtua, leluhur, ataupun sanak saudara yang telah meninggal. Doa tersebut akan dibacakan bersama-sama atau berjamaah menjelang datangnya bulan Ramadan atau 10 hari





terakhir pada malam ganjil puasa Ramadan.

Dalam website lebih lanjut disampaikan, umumnya warga yang ingin arwah leluhurnya ingin didoakan memberikan sedekah uang untuk tiap satu nama arwah, sekaligus menyerahkan selebar nama orang yang telah meninggal. Uang yang terkumpul selanjutnya untuk menyantuni anak yatim piatu.

Menurut sejarahnya, tradisi *Arwah Jamak* konon sudah ada sejak zaman Sunan Kalijaga dan dilakukan oleh umat Islam secara turun-temurun hingga sekarang. Di website itu terulas dari NU online, Pengasuh Pesantren Asrama Pelajar Islam (API) Tegalrejo, Magelang, KH. Yusuf Chudlori mengatakan, tradisi *Arwah Jamak* atau mengirim doa secara massal kepada sesama muslim yang telah meninggal dunia, terutama kepada orang tua yang telah wafat adalah amalan ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah. Sehingga *Arwah Jamak* tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Gus Yusuf, panggilan akrab KH. Yusuf Chudlori, mengingatkan, amalan atau tradisi *Arwah Jamak* yang sudah mentradisi di lingkungan Nahdliyin ini harus dilestarikan, sebab *Arwah Jamak* merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran berbuat baik kepada orang tua atau *birrul walidain*. “Birrul walidain itu tidak mengenal putus waktu, berbuat baik kepada orang tua harus dilakukan oleh anak baik saat orang tua masih hidup atau ketika sudah meninggal,” kata Gus Yusuf. □

### Dandangan Kudus

*Dandangan* merupakan tradisi peninggalan dari Sunan Kudus yang bernama Syech Jafar Shodiq yang merupakan pemimpin tertinggi soal agama di wilayah Kudus pada abad 16. Sunan Kudus sangat disegani dan diakui dalam hal penguasaan ilmu agama, khususnya Fikih dan Falaq. Oleh sebab itu, beliau sangat mengerti dan ahli tentang penetapan tanggal Ramadan. Paparan mengenai *Dandangan* itu termuat dalam [kebudayaan.pdkjateng.go.id](http://kebudayaan.pdkjateng.go.id).

Diceritakan dalam website itu, pada waktu itu, setiap menjelang bulan Ramadan,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

banyak orang berkumpul di sekitaran Masjid Menara, yaitu Masjid AlAqsa, untuk menanti pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan tanggal 1 Ramadan. Orang yang ingin mendengar pengumuman itu sangat banyak, dan datang dari segala penjuru. Karena di sekitar masjid itu ramai, maka banyak yang berjualan makanan dengan istilah *mremo* (aji mumpung), yakni orang yang berjualan karena ada kesempatan dan banyak orang yang membutuhkan pada saat itu.

Lebih lanjut disampaikan kepada pembaca, penentuan tanggal 1 Ramadan ditandai

dengan penabuhan bedug di Menara Masjid. Karena bunyi bedug dang...dang...dang... maka tradisi pengumuman penentuan tanggal 1 Ramadan itu dinamakan Tradisi *Dandangan*. Biasanya tradisi ini dilaksanakan 10 hari sebelum tanggal 1 Ramadan, banyak orang yang datang untuk berjualan dari berbagai kota. Masyarakat Kudus bahkan orang di luar Kudus juga banyak yang datang untuk berbelanja. □

### Bakar Batu

Umat Islam Wamena di Kota Jayapura, Papua, menjelang Ramadan memiliki tradisi



Bakar Batu atau *Barapen*. Bakar Batu yang dilakukan disebut sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga mereka bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan.

Di *sindonews.com* diungkapkan, daging yang dimasak bukan lagi daging babi seperti layaknya adat bakar batu di pegunungan Papua. Untuk umat muslim daging babi diganti dengan daging yang halal dikonsumsi, seperti daging ayam, sapi, atau daging kambing.

Diceritakan dalam web itu, pengurus Masjid Firdaus Asso, Firman Asso, mengakui, jika tradisi bakar batu menggunakan daging halal sudah berlangsung sejak dulu. Sebagai umat muslim, pihaknya juga memegang erat aturan agama. "Sejak nenek moyang kami yang sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu, jadi kami kalau bakar batu ya ganti dengan daging ayam, sapi atau daging kambing," ucapnya seperti dalam website itu yang rilis pada 25 April 2021.

Lebih lanjut disampaikan, bulan Ramadan menjadi berkah juga untuk pihaknya. Berbagai pihak kerap datang dan memberikan bantuan. □

### Gebyuran Bustaman

*Gebyuran Bustaman* merupakan salah satu tradisi menjelang bulan Ramadan yang masih dipertahankan hingga kini. Tradisi ini berada di Semarang, tepatnya di Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah. Tradisi yang berawal dari kebiasaan Kyai Bustam ini dilakukan sebelum bulan puasa. Kyai Bustam memandikan atau menggebyur cucunya di sumur. Di mana sumur itu adalah cikal bakal Kampung Bustaman yang berdampingan dengan mushola. Air dari sumur itu tidak pernah kering meski kemarau. Ulasan tentang *Gebyuran Bustaman* itu termuat di *kebudayaan.pdkjateng.go.id*.

Lebih lanjut dalam website tersebut disampaikan, sebelum *gebyuran* dimulai, ditandai dengan pemukulan kentongan dan diumumkan melalui *speaker* mushola yang dilanjutkan dengan perang air. Sejak



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

2013, *Gebyuran* itu bertambah variasi dengan air yang dimasukkan plastik atau balon dan diberi bubuk warna-warni. Acara dimulai setelah Ashar dan berakhir menjelang Magrib. Semua yang terlibat tidak boleh marah jika basah kuyup tersiram air.

Dijelaskan dalam *kebudayaan.pdkjateng.go.id*, *Gebyuran* tak hanya bermaksud membersihkan badan, tapi juga secara batin, yakni menjaga emosi menahan amarah dan memaafkan. *Gebyuran* memiliki makna sebagai penghapus kesalahan selama setahun, dan disimbolkan dengan cara

mencorengkan bedak cair di wajah warga dan pengunjung. Air itu disiramkan pada warga hingga bedaknya hilang, sebagai simbol peluntur kesalahan dan kekhilafan.

*Gebyuran* ini tak hanya diikuti warga setempat, tapi oleh siapapun yang berniat hadir pada momen tersebut juga diperbolehkan. Berganti tahun, tradisi ini secara umum ditandai dengan doa bersama. Prosesi *Gebyuran* diakhiri dengan menyantap Nasi *Gudangan* bersama, setelah sebelumnya membersihkan semua sampah selama perang air berlangsung. □

AWG



## Tsany Hermawan

BEM Universitas Ahmad Dahlan

### Perekonomian Rakyat Harus Ditingkatkan

**S**EBAGAI negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia harus memerhatikan perekonomian rakyatnya. Sebab, tanpa pemerataan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia maka sama saja tidak mengimplementasikan Pancasila.

Di Indonesia, ekonomi syariah sangat sejalan dengan Pancasila, sehingga penerapannya tidak bertentangan atau saling kontradiktif. Dari hasil riset kami sebagai mahasiswa, ekonomi syariah bisa menjawab seputar pemerataan ekonomi umat dan rakyat secara keseluruhan.

Saya berharap, ekonomi syariah di Indonesia terus ditumbuhkembangkan menjadi salah satu elemen yang mampu menjawab tantangan bangsa, bahkan tantangan global. Untuk menjawab tantangan bangsa itu semestinya semua unsur bersatu padu, bersinergi untuk menghadapinya.

Intinya atau pada akhirnya semua upaya yang dilakukan, seperti penerapan ekonomi syariah di Indonesia, akan berdampak baik buat kesejahteraan rakyat. □

DER



## Imam Nawawi

Ketum Pemuda Hidayatullah

### Organisasi Pemuda Perlu Diperluas



**P**EMUDA atau generasi muda dan milenial adalah elemen bangsa yang sangat diharapkan muncul dengan segala keunggulannya, untuk mengisi berbagai tampuk kepemimpinan daerah dan nasional di Indonesia masa depan.

Tapi, kita masih sangat prihatin karena masih banyak kita melihat atau mendengar berbagai perbuatan negatif yang dilakukan pemuda. Untuk itu, solusinya adalah organisasi kepemudaan perlu diperluas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Organisasi kepemudaan yang positif sangat membantu pemuda mencari jati dirinya yang sesuai dan berakhlak, serta mampu mengasah kemampuan kepemimpinan pemuda. Kemampuan ini sangatlah penting untuk mempersiapkan mereka di masa depan.

Untuk itu, saya berharap, pemerintah pusat dan daerah mendukung dan memberi kesempatan kepada berbagai organisasi pemuda untuk berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang ada pada masing-masing organisasi kepemudaan. Apalagi tahun politik 2024 akan semakin dekat, ini kesempatan pemuda untuk belajar seputar perpolitikan. □

DER

Wanhandrik Tahalu, Guru di Daerah Terpencil

# Terus Mengabdikan Tanpa *Batas*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**B**ERTUGAS sebagai pendidik, apalagi di daerah terpencil tidaklah adalah sebuah tantangan. Ibarat tinggal di hutan lebat, butuh keberanian yang sangat. Bila menjadi guru di daerah terpencil mesti membawa perbekalan yang cukup, termasuk, misalnya, parang yang tajam. Agar, bisa memangkas daun dan pohon liar yang menutupi jalan.

Setidaknya, itulah yang ditemui Wanhandrik Tahalu (35) saat pertama kali mengajar di SD Negeri 1 Ilomata, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada 2007 silam. Mulanya, ia diminta oleh kepala sekolah melatih siswa SD baris-berbaris untuk menghadapi lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, setelah lomba selesai, kepala sekolah malah memberitahu bahwa nama Wanhandrik sudah ada dalam daftar absen para guru SD Negeri 1 Ilomata, Kecamatan Boliyohuto. Artinya, Wanhandrik diterima menjadi guru dan akan mengajar kelas III.

"Bapak kepala sekolah tahu kalau saya anggota paskibra, makanya saya diminta melatih baris-berbaris. Tetapi setelah selesai, saya malah diminta mengajar kelas tiga. Itu dilakukan begitu saja, saya dikasih SK untuk mengajar," kata Wanhandrik memulai

ceritanya kepada Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Malam harinya, bapak dua putri hasil pernikahannya dengan Elvin Ngabito menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi pada siang hari itu kepada bapaknya. Tak dinyana, sang bapak yang kala itu menjabat sebagai kepala desa mendukung Wanhandrik untuk mengambil kesempatan tersebut. Apalagi, saat itu Wanhandrik juga tidak memiliki

pekerjaan setelah tamat dari SMA 1 Boliyohuto. Bahkan ketika sadar, gaji yang diperoleh dari kegiatannya mengajar hanya Rp. 100 ribu/bulan, ayahnya bergeming dan terus memberi semangat kepada anaknya.

"Kamu mengajar itu bukan semata-mata hanya mengejar uang. Tapi niatkanlah bahwa pekerjaan itu akan membuatmu memiliki catatan amal di hadapan-Nya. Sehingga kelak di kemudian hari kamu juga







memiliki bekal untuk hidup di akherat,” kata Wanhandrik mengulangi nasihat yang dulu diberikan ayahnya.

Sejak itu lelaki kelahiran Paguyaman, 8 April 1987, tersebut makin giat mengajar. Ia tak peduli berapapun uang yang diterima sebagai gaji. Apalagi, saat itu ia masih bujangan, sementara jarak sekolah ke rumah hanya sejengkal, dan tinggal melangkah sehingga tak membutuhkan biaya.

Setelah dua tahun mengajar, tepatnya pada 2009, Wanhandrik mulai bisa bernafas lega. Saat itu ia terpilih menjadi guru honorer daerah (Honda), sehingga berhak atas tunjangan dari Pemda sebesar Rp 500 ribu/bulan. Nilai tersebut sangat lumayan untuk ukuran warga yang tinggal di pedalaman.

“Saya tidak menghabiskan seluruh penghasilan saya. Saya tabung sebagian, dan sebagiannya lagi saya serahkan pada mama, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata putera pertama empat bersaudara pasangan Abdul Rahman Tahalu (alm) dan Yana Datu.

### Motor Mogok

Konsekuensi pengangkatan dirinya menjadi guru Honda, Wanhandrik musti mengikuti keputusan Pemda dalam penempatan dirinya, termasuk untuk pindah tempat mengajar. Dan, itu benar-benar terjadi pada 2011. Pada tahun 2011 itu Wanhandrik dipindahkan ke SD Negeri 4 Satap Bilato, Desa Tau Laa, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Sekolah tersebut berjarak 3,5 Km dari rumahnya dan untuk sampai di tempatnya mengajar, harus menyeberang sungai menggunakan sampan.

Semula, perpindahan itu terasa biasa-biasa saja. Tetapi di tengah jalan ternyata ada banyak persoalan yang membuat jarak yang relatif dekat itu menjadi terasa terjat. Motor tua yang dibeli Wanhandrik dari hasil kebiasaannya menabung ternyata lebih sering bermasalah. Mogok dan selalu susah dihidupkan. Selain itu, belum adanya jembatan yang melintas di atas sungai menuju ke sekolah membuat Wanhandrik harus

menitip motor di dangau kebun jagung.

“Dari situ saya berjalan sejauh lima ratus meter, kemudian naik sampan dan saat turun sudah sampai di sekolah. Tetapi kalau hujan, saya sering basah kuyub. Bahkan saya juga pernah dijemput memakai perahu melalui laut, saat air sungai sangat besar dan saya hadir di sekolah,” kata alumni Fakultas Manajemen Universitas Negeri Gorontalo itu.

Beruntungnya, di tempat yang baru ini Wanhandrik segera mendapati orang-orang baik yang menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Ia juga menjumpai anak-anak yang gemar bermain voli, sehingga memberinya kesempatan untuk semakin akrab. Dan, yang tak kalah penting, ia menemukan para pelajar yang selalu membutuhkan kesabarannya mengajar. Juga pertolongannya untuk mencharge handphone, karena kampung di mana sekolah itu berada belum dialiri listrik.

“Karena banyak teman, saya sering menginap di rumah mereka sehingga tidak pulang setiap hari. Tetapi, bila tiba saat pulang ke rumah, satu tas saya penuh dengan HP milik murid-murid, mereka minta tolong untuk di-charge,” ungkapnya.

Kini, Wanhandrik semakin yakin dengan jalan hidup yang dilalui. Meski tak jarang, kawan serta kerabatnya ada yang mempersoalkan masalah guru honorer dan jumlah gaji yang diterimanya. Tetapi ia yakin bahwa mengajar bukan semata mencari gaji. Apalagi, Wanhandrik juga masih bisa bertani cabai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. □

MBO

Seminar Nasional ‘Urgensi Pendidikan Tinggi’ di Papua

HNW  
**Pendidikan Salah Satu Pintu**  
 Masuk Mewujudkan Papua Maju Sejahtera



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**APUA sebagai bagian dari Indonesia adalah kawasan pulau atau Provinsi yang sangat dipentingkan. Bumi Cendrawasih ini memiliki peran panjang dan heroik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari era pergerakan kemerdekaan hingga saat ini.

Di sisi lain, terutama era kekinian, Papua diwarnai dengan berbagai dinamika yang sangat luar biasa. Dinamika ini sangat dalam hingga menyentuh nuansa kebersamaan dan persatuan yang perlu terus dijaga dan dirawat dengan harmonis. Dalam duka kita akibat gempa di Jayapura dan kekerasan KKB di Dunga, kita mencatat berbagai perkembangan signifikan di Papua.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, menurut Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc.MA., Papua memerlukan komitmen dan kenegarawanan untuk tetap merengkuh dan menjaga agar kebersamaan dalam konteks NKRI, tetap selalu bisa diwujudkan, disukseskan, untuk maju sejahteranya Papua dan warganya. “Salah satu pintu besar untuk merealisasikan semua itu adalah melalui jalur pendidikan,” ujar HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid.

Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan hal itu, dalam pemaparannya saat menjadi pembicara

kunci dalam acara Seminar Nasional bertema ‘Urgensi Pendidikan Tinggi dan Tantangan Masa Depan Papua Setelah Otsus Perubahan’ yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan UPMJ dan Yayasan Al Barakah Abepura. Dalam kesempatan yang sama juga berlangsung Launching & Pelantikan Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Papua Madani Jayapura (UPMJ).

Acara yang digelar di Ballroom Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/2/2023), ini juga dihadiri Plh. Gubernur Provinsi Papua Dr. H.M. Ridwan Rumasukun, SE., MM., Ketua Yayasan Al Barakah H. Maddu Mallu, SE., MBA., Rektor UPMJ Dr. Syarifuddin, SE., M.Si., Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Sanusi Uwes, Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Suriel Mofu, Forkopimda Prov. Papua, dan para Kepala Sekolah SMA, SMK, serta para dosen perguruan tinggi di Prov. Papua sebagai peserta.

Begitu pentingnya bidang pendidikan sebagai pintu besar mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI, sebagai Pimpinan MPR, HNW sangat menyambut baik dan mendukung serta bangga dengan terus berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan di Papua, termasuk lembaga pendidikan tinggi, yang jumlahnya terus meningkat. Salah satunya adalah dengan berdiri



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dan disahkannya Universitas Papua Madani Jayapura (UPMJ).

Masyarakat Papua, lanjut anggota Komisi VIII DPR Frkais PKS ini, patut bersyukur bahwa pemerintah RI dan DPR sangat memerhatikan pendidikan di Papua. Hingga dalam perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disahkan DPR pada Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-5 Tahun Sidang 2020-2021, ada beberapa poin penting yang bisa meningkatkan kualitas dan

kuantitas pendidikan di Papua.

Pada Pasal 34, dana Otsus Papua dinaikkan menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional pertahun dan akan dibayarkan sampai tahun 2041 dengan jumlah diperkirakan sebesar Rp.234,6 Triliun. Jumlah tersebut lebih dari kucuran dana Otsus Papua dua dekade lalu yang hanya sebesar Rp.101,2 Triliun.

Untuk mengupayakan dan menjaga agar dana tersebut dipergunakan dengan benar,

Pasal 36 mewajibkan alokasi anggaran sebagai berikut: Untuk pendidikan sebesar 35%, kesehatan 25%, untuk infrastruktur 30%, dan sebesar 10% untuk pemberdayaan masyarakat adat.

“Angka-angka tersebut memberikan penegasan bahwa ada political will yang sangat kuat dari pemerintah pusat dan DPR RI untuk meningkatkan dana Otsus dan lebih spesifik peningkatan untuk bidang pendidikan rakyat Papua. Bahkan, alokasi yang 35% itu lebih tinggi dari ketentuan UUD yang menetapkan 20% APBN/APBD untuk pendidikan. Ini sesuatu yang luar biasa, saya harap pemimpin, wakil rakyat, media dan masyarakat Papua menjaganya, mengawalinya, dan menggunakannya sebagai mana mestinya untuk kemaslahatan, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh warga Papua,” pungkasnya. □

## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama BKMT

# Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan pandangan bahwa arus globalisasi dan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, turut memiliki andil pada terjadinya degradasi moral, bukan saja menjadi kekhawatiran para tokoh masyarakat atau generasi tua. Dengan pandangan senada, generasi muda bangsa juga menjadikan isu-isu terkait moralitas sebagai perhatian utama yang perlu disikapi secara serius.

“Hasil survei Good News From Indonesia (GNFI) bersama Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada Juli 2022, diketahui bahwa tiga dari empat isu utama yang menjadi perhatian mayoritas generasi muda adalah isu-isu yang berkaitan dengan persoalan moralitas, antara lain pelecehan seksual 13,7%, penyebaran berita hoaks 9,5%, dan degradasi moral dan ideologi 8,4%,” ujar Bamsoet dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), secara virtual dari Jakarta, Senin (20/2/23).

Turut hadir, antara lain Ketua Umum BKMT Syifa Fauzia, Sekretaris Umum BKMT Andalusia Eka Setiyawati, serta para peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI,

sekaligus peserta Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh BKMT.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, degradasi moral adalah sebagian dari sekian banyak persoalan yang akan dihadapi, seiring laju perkembangan zaman. Berbagai persoalan kebangsaan itu, antara lain mewujud pada masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama secara komprehensif, di mana ajaran agama dimaknai secara sempit, tergerusnya sikap toleransi, berkembangnya paham ekstremisme, bahkan munculnya sikap dan perilaku yang menegasikan Pancasila sebagai dasar negara.

Merujuk pada fakta sejarah, ketika pendidikan Pancasila dihapuskan dari mata pelajaran pokok dalam dunia pendidikan, dan pemaknaan Pancasila diserahkan pada mekanisme ‘pasar bebas’, telah menyebabkan absennya negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa. Tercermin pada publikasi berbagai hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018, di mana 63% guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain, 3% anggota TNI terpapar paham ekstremisme, 19,4% PNS

atau ASN tidak setuju Pancasila, dan 7 kampus terindikasi terpapar ekstremisme agama.

“Gambaran di atas semakin menegaskan pentingnya pendidikan karakter bangsa yang dilakukan secara intens, masif, dan berkesinambungan. Pandangan inilah yang mendorong MPR untuk senantiasa berupaya untuk menanamkan pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, dirinya turut mengapresiasi perjalanan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang kini memasuki usia ke-42 tahun. Selama 42 tahun berkiprah, BKMT tetap solid dan sukses membangun syiar keagamaan dan ilmu pengetahuan. Sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi lebih dari 400 Kabupaten di seluruh penjuru Nusantara, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.

Dari aspek regulasi, keberadaan Majelis Taklim memiliki rujukan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya mengatur mengenai pendidikan keagamaan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Majelis Taklim secara eksplisit diakui sebagai lembaga pendidikan non-formal.

“Kehadiran Majelis Taklim mampu mengisi ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal, khususnya pendidikan moralitas. Di tengah deras arus globalisasi dan lompatan kemajuan teknologi yang menafikkan adanya filtrasi arus informasi yang dapat menggerus nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, kehadiran Majelis Taklim sebagai sumber pendidikan keagamaan adalah sebuah hal yang patut disyukuri,” pungkas Bamsoet. □

## Kampung Wawasan Kebangsaan Angkatan I

# Basarah Khawatir Penetrasi Ideologi Asing Bermula dari Desa yang Lemah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, menganjurkan agar ketahanan desa secara sosial, budaya, politik, ekonomi, dan terutama ideologi terus diperkuat agar ketahanan negara juga semakin kuat. Jika ketahanan desa-desa melemah, ideologi asing dikhawatirkan mudah masuk lalu melakukan penetrasi ideologis yang membahayakan negara.

"Pasal 78 ayat (3) UUU No. 6 tahun 2014 tentang Desa jelas mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan di desa harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Semua hal positif yang berkembang di desa-desa itulah kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus diperkuat," tegas Ahmad Basarah dalam forum "Penyelenggaraan Kampung Wawasan Kebangsaan Angkat I" di Provinsi Banten, Senin (20/2/23).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, salah satu contoh kearifan lokal adalah terbangunnya suasana guyub penuh

persaudaraan di antara penduduk desa berdasarkan adat istiadat, kepercayaan, serta agama yang dianut di desa tersebut. Ahmad Basarah bangga bahwa di Provinsi Banten, misalnya, indeks kerukunan umat beragama terus naik secara positif selama lima tahun terakhir, mulai dari 60,7 pada 2017 naik jadi 65,9 pada 2018, lalu puncaknya

naik jadi 69,6 pada 2021.

"Namun demikian, saya masih mendengar ada bibit ekstremisme di provinsi ini. Misalnya, di Menes, para pelaku ekstremisme pernah mencoba melakukan penusukan terhadap mantan Menkopolkukam Wiranto. Saya juga mendengar ada kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon dan Maja. Di



sinilah kearifan lokal harus terus diperkuat,” tegas Ahmad Basarah.

Dalam acara yang dihadiri Pejabat Gubernur Banten, Almuktabar, Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Putranto Gator Sri Handoyo, dan Camat Tigaraksa Rahyuni itu, Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan, desa-desa di seluruh Indonesia adalah ujung tombak penyelenggaraan pembangunan nasional yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Itulah sebabnya pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong semua desa untuk maju dengan menyalurkan dana desa yang sangat besar.

“Di Tahun 2022 saja, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 68 triliun. Ini dana yang besar. Namun perlu saya ingatkan, hendaknya dana sebesar itu jangan hanya dipakai untuk membangun infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur ideologi. Jangan dikira penguatan ideologi tidak penting,” pesan Ahmad Basarah.

Untuk itu, doktor bidang hukum tata negara lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu mengaku sangat gembira Provinsi Banten mendorong terbentuknya kampung-kampung wawasan kebangsaan di banyak tempat. Dengan strategi yang dimotori Kepala Badang Kesbangpol Provinsi Banten Ade Riyanto itu, Ahmad Basarah optimistis Banten akan menjadi provinsi teladan dengan ketahanan ideologi yang dapat diandalkan.

“Apalagi ke depan, Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham sudah bersepakat akan mendorong para kepala desa di seluruh Indonesia untuk menjadi hakim-hakim desa agar persoalan-persoalan di desa bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jika para kepala desa itu tidak punya ketahanan ideologi yang kuat, bagaimana mungkin mereka akan menjadi paralegal yang mumpuni,” jelas Ahmad Basarah.

Sejalan dengan pernyataan Ahmad Basarah, Pejabat Gubernur Banten Almuktabar dalam sambutannya mengaku punya agenda yang terstruktur, sistematis dan masif dalam memperkuat wawasan kebangsaan sampai titik terdepan di kampung-kampung. “Kami sangat sadar, jika desa-desa kuat secara ekonomi, politik, juga budaya, maka kami di tingkat provinsi juga bisa tidur tenang,” jelas Almuktabar. □

## Kunjungan Santri Ponpes Darut Taqwa Ponorogo

# HNW Mengajak Para Santri Lanjutkan Peran Ulama Pahlawan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA, mengapresiasi kunjungan para santri Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/2/2023). Di hadapan sekitar duaratus peserta Wisata Pendidikan Santri Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo itu, Hidayat Nur Wahid berharap, kunjungan ini memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. “Agar para santri makin mempersiapkan diri dengan tekun belajar supaya nantinya siap lanjutkan peran para ulama pahlawan bangsa, antara lain dengan terjun ke dunia politik, termasuk menjadi anggota dan pimpinan lembaga legislatif,” katanya.

Bersama para santri yang diterima di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta itu, hadir pula Direktur Pendidikan Putra Ponpes Darut Taqwa, Drs. H. Ahmad Thobronni, M.Pd., selaku pimpinan delegasi, serta hadir pula dua anggota Fraksi PKS MPR RI, yaitu: Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med.,

dan Amin AK., M.M.

Menurut Hidayat, yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor itu, keberadaan para santri di lembaga legislative itu akan melanjutkan kiprah alumni pondok pesantren yang sekarang ini sudah terlebih dahulu berperan di MPR, DPR dan DPD RI. Mereka juga bisa menjadi solusi bagi persoalan bangsa, seperti yang dilakukan para santri sebelumnya. Dan, juga melanjutkan peran yang dilakukan oleh para santri dan ulama pada era perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI dan menyelamatkan NKRI.

Sebagaimana dahulu dilakukan oleh Ulama NU, seperti KH. Hashim Asyari, KH Wahab Hasbullah yang mengumandangkan Fatwa dan Resolusi Jihad, dan Ulama dari Muhammadiyah seperti KH. Abdul Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo yang menyerukan Amanat Jihad, yang keduanya adalah dalam rangka mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh kolonialis Belanda dll. Para santri juga, kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

melahirkan Laskar Santri untuk melaksanakan Fatwa dan Amanat Jihad tersebut.

“Tahun 2004 saya jadi Ketua MPR. Waktu itu, untuk pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu yang terpilih adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), padahal beliau hanya didukung partai kecil. Akibatnya, suasana politik memanas dan berpotensi menimbulkan kerawanan. Lazimnya, setelah dilantik, presiden menyampaikan pidato tetapi saat itu suasananya tidak memungkinkan. Sesuai kaedah Islam yang saya pelajari di Pondok Pesantren, saya sampaikan ke Pak SBY bahwa yang sunah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Sukses pelantikan Presiden dan pergantian kekuasaan secara damai adalah wajib, sementara pidato adalah sunah. Maka Saya minta Pak SBY untuk menyampaikan

pidatonya nanti di istana saja. Agar tidak ada kejadian hal-hal yang bisa gagalkan pelantikan Presiden. Alhamdulillah, Pak SBY bisa mengerti, dan berkat kaedah itu, pelantikan berjalan lancar, tidak menimbulkan kekisruhan,” kata Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW.

Keberhasilan menghindarkan keributan yang berpotensi terjadi pada pelantikan presiden hasil pemilu 2004, menurut HNW, didapat dari pengalamannya selama berada di pondok Gontor. Dulu, selama belajar di pondok, HNW banyak mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari olahraga, belajar kelompok, latihan pidato, hingga jadi pengurus organisasi. Bahkan kebiasaan itu terus berlanjut saat ia meneruskan pendidikannya di Universitas Madinah.

“Ikutilah semua kegiatan di pondok dengan

tekun dan senang hati. Jangan dimaknai sebagai kegiatan yang membosankan atau malah membebani. Semua itu akan menjadi tabungan positif dan memberi makna dan pelajaran bagi profesionalitas perjalanan hidup kita dikemudian hari,” ungkap anggota DPR RI dapil Jakarta II meliputi luar negeri, Jakarta Pusat dan Selatan.

Selain pengalaman pribadi, HNW juga menyampaikan beberapa partisipasi para santri yang sudah dilakukan di ranah legislatif. Seperti lahirnya UU tentang Pesantren pada tahun 2019. UU tersebut kini menjadi payung hukum bagi seluruh ponpes di Indonesia. Dan, menjadikan pesantren sebagai entitas Pendidikan yang legal, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya.

“Kalau tidak ada orang-orang pesantren di DPR siapa yang akan membuat UU ini. Terbukti setelah itu ada penandatanganan dana abadi pesantren oleh Presiden untuk peningkatan kualitas Santri. Sekalipun realisasinya tetap harus dikawal lagi,” kata Hidayat lagi.

Di lingkungan fungsi dan tugas MPR, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengungkapkan, keberadaan santri berkontribusi menghadirkan ayat 3 dari Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, tentang Pendidikan. Pasal 31 ayat 3 itu berbunyi: ‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU’.

“Ini penting agar pelaksanaan Pendidikan Nasional kita selaras dengan tujuan kemerdekaan, ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur yang menyertainya yang menghadirkan kecerdasan berbasis iman, taqwa dan akhlak yang mulia. Sekali lagi, inilah manfaatnya bila lembaga-lembaga negara diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi memadai, punya keterikatan yang dalam dengan pesantren, umat dan pendidikan Islam, mereka akan bekerja dan berkolaborasi untuk kepentingan umat dan bangsa dengan melanjutkan peran para Ulama Pahlawan Bangsa. Dan, para santri bisa melakukannya dan yang penting terus mempersiapkan diri untuk dapat melanjutkannya,” pungkas HNW. □



Diskusi Sistem Pemilu

# Dave Akbarshah Fikarno: “Jangan Lucuti Sistem Terbuka”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**ALAM pemilu tidak ada sistem yang sempurna, pasti ada plus minus, kurang lebihnya. Ada yang dikecewakan dan ada pula yang dipuaskan. Dari semua sistem yang ada, sistem pemilu yang menganut proporsional terbuka merupakan sistem terbaik. Sistem terbuka mampu memberikan otoritas, kesempatan, kepada rakyat untuk menentukan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi wakilnya, baik di DPRD

maupun DPR.

Berbicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, (22/2/2023), Dave yang anggota MPR/DPR dari Partai Golkar ini menegaskan, dirinya kerap mengatakan bahwa sistem Pemilu yang sudah berjalan, sistem terbuka, jangan dilucuti lagi.

“Bangsa ini pernah mengalami pemilu dengan sistem tertutup. Itu terjadi pada Pemilu tahun 1955, 1971, 1975, 1982, 1987,

1992, 1997, 1999. Pada Pemilu 2004 sudah menggunakan sistem campuran, terbuka dan tertutup, dan pada tahun 2009 sudah menggunakan sistem terbuka,” ungkap Dave dalam diskusi bertema: “Sistem Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Pancasila” tersebut.

Selanjutnya Dave menjelaskan, Pemilu menggunakan sistem terbuka, dari tahun 2009, 2014, hingga 2019 merupakan kemajuan demokrasi di mana benar-benar memberikan kesempatan yang terbuka kepada rakyat untuk memilih calonnya.

“Dengan sistem terbuka rakyat bisa memilih, menentukan calonnya, dengan bebas. Jangan sampai hanya untuk kepentingan elit oligarki sistem yang sudah bagus dirusak dan dikembalikan ke masa lalu. “Golkar berhasil menggalang partai lain untuk tetap menjaga sistem proporsional terbuka”, tuturnya.

Menurut Dave, Golkar sebenarnya tidak bermasalah bila sistem tertutup digunakan. “Bagi Golkar sistem apapun tidak masalah bila diterapkan”, ungkapnya. Dari Pemilu 1971 hingga 2004 yang menggunakan sistem tertutup, menurut Dave, Golkar tetap bisa survive. Meski demikian, dia menegaskan, partainya tidak berpikiran untuk kepentingan elit partai. Golkar tetap ingin masyarakat bisa







memiliki hak untuk memilih dan menyampaikan pandangannya dengan bebas dan luas.

Dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat bisa mengenal calon wakil rakyat. Menurutnya, masyarakat harus tahu kita dan masyarakat harus merasakan manfaat kehadiran kita di dapil. “Salah satu fungsi anggota parlemen adalah fungsi aspirasi. Kalau kembali ke sistem tertutup maka aspirasinya akan berkurang bahkan hilang,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap, jangan sampai demokrasi ini diberangus, diputus, dihilangkan sehingga tidak ada lagi pendekatan-pendekatan ke masyarakat.

Pembicara lain dalam diskusi itu, Wahyu Sanjaya, membenarkan apa yang dikatakan oleh Dave bahwa kalau tidak ada sistem pemilu yang sempurna. “Sistem yang sudah ada, sistem terbuka, sudah baik,” ujar anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Dengan sistem terbuka, lanjut Wahyu Sanjaya, tingkat partisipasi pemilih sudah terbaik karena rakyat ingin melihat calon yang mereka dukung bisa terpilih. “Kalau dikembalikan ke sistem tertutup, kesempatan bagi rakyat untuk mengenal calonnya menjadi berkurang”, tuturnya.

Dia mengungkapkan bahwa bangsa ini telah berjuang demi tegaknya reformasi. Bila kembali ke sistem tertutup maka hal demikian mengkhianati reformasi. Dia menegaskan, sistem terbuka atau tertutup sebenarnya domainnya ada di DPR, bukan di tempat lain (MK).

Pengamat Politik Ujang Komarudin yang juga hadir sebagai pembicara menuturkan, sistem terbuka banyak nilai baiknya. Hanya orang-orang yang bekerja dan dekat dengan rakyatlah yang akan terpilih. “Bila menggunakan sistem tertutup maka hal yang demikian akan menutup calon-calon dari kalangan aktivis dan orang-orang yang benar bekerja di lapangan”, ujarnya.

“Tak hanya itu kembali ke sistem tertutup akan mengembalikan bangsa ini ke masa Orba”, tambahnya. □

## Kunjungan Majelis Muzakarah Ustazah ‘Daru Quthni’

# HNW: Parlemen Wadah Perjuangkan Kemaslahatan Umat, Bangsa, dan Negara

**W**AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA., menerima kunjungan atau audiensi sekitar 15 ustazah yang tergabung dalam Majelis Muzakarah Ustazah ‘Daru Quthni’, pimpinan Ustazah Dr. Hj. Ida Sajidah Dhiyauddin, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Kepada para ustazah, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa mereka sedang berada di kompleks MPR, DPR, dan DPD. Gedung ini sangat terbuka untuk semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, para santri, pelajar, mahasiswa bahkan sampai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pelajar SD sudah sering berkunjung ke Rumah Rakyat ini.

Tidak hanya sekedar berkunjung, berwisata, berdialog, anggota Komisi VIII



Terima Pengurus IMM

# Bamsoet Ajak Tingkatkan Wawasan Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana penyelenggaraan Tanwir XXXI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan tema “Bergerak Bersama Membangun Peradaban”. Diselenggarakan pada 14-16 Maret 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dirinya berharap, melalui acara tersebut IMM dapat mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dan bergotong royong dalam bergerak memajukan kualitas bangsa dan negara.

“Terlebih saat ini kita telah menapakkan kaki pada fase bonus demografi, di mana komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif. Diperkirakan, mayoritas, sekitar 70% dari kelompok usia produktif tersebut adalah generasi muda berusia 15-44 tahun,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus IMM, di Jakarta, Rabu (15/2/23).

Pengurus IMM yang hadir, antara lain Sekretaris Jenderal Zaki Nugraha, Bendahara Umum Riyan Betra Delza, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Baikuni Al-Shafa, Ketua Bidang Ekonomi dan

Kewirausahaan M. Zaki Mubarak, Wakil Sekjen Ihya Rizqi, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Rimbo Bugis dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Tri Laksono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, generasi muda memiliki peran penting dan strategis, baik sebagai agen perubahan, kontrol sosial, kekuatan moral, sebagai penjaga dan pelestari nilai kebangsaan, maupun sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Singkatnya, generasi muda adalah faktor kunci yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan.

“Penting kita sadari sepenuhnya, bahwa masa depan tidak hadir secara tiba-tiba. Masa depan dibentuk, dibangun, dan ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Masa depan bangsa dan negara dicapai melalui tahapan pembangunan, dengan melewati berbagai tantangan kebangsaan, dan berproses melalui dinamika zaman,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengingatkan, fenomena kekerasan dan vandalisme, faham radikal, sikap intoleran, dan berbagai arus pemikiran yang menegasikan ideologi serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia, begitu mudahnya terbawa arus globalisasi yang mendompleng kemajuan teknologi informasi, dan menyasar generasi muda bangsa.

“Hadirnya virus ideologi yang merongrong kehidupan generasi muda memang tidak mudah untuk kita diagnosa secara kasat mata, namun dapat kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita. Begitu pula dalam gaya hidup, cara berpakaian, bersikap dan bertingkah laku, ada kecenderungan menjadikan budaya asing sebagai kiblat dan rujukan. Karena itu, membekali generasi muda kita dengan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, untuk melindungi jati diri dan identitas kebangsaan kita di masa depan, menjadi sebuah keniscayaan,” pungkas Bamsoet. □



Terima Pengurus BEM PTNU

# Bamsoet Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya merawat serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Terlebih saat ini kondisi perdamaian dunia terus bergejolak. Terlihat dari rilis Institut Ekonomi dan Perdamaian (Institute for Economics and Peace) yang mencatat indeks perdamaian global yang terus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2% selama kurun

waktu 14 tahun terakhir.

“Saat ini, ketika kita sedang mendorong komitmen global untuk menjaga semangat perdamaian, di belahan bumi yang lain konflik bersenjata masih terus berkecamuk. Tidak hanya perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan ratusan ribu korban tewas dan puluhan juta warga mengungsi, melainkan juga di beberapa negara lainnya yang hingga saat ini masih berjibaku menghadapi konflik,” ujar Bamsoet usai

menerima pengurus BEM PTNU Se-Nusantara di Jakarta, Rabu (15/2/23).

Pengurus BEM PTNU Se-Nusantara hadir antara lain Presidium Nasional Wahyu Al Fajri, Sekretaris Nasional Khabib Al-Fatah, Ketua Lembaga Sosial Sufyan, dan Ketua Lembaga Pendidikan Irham Ar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menerangkan, intoleransi telah menyebabkan kebebasan beragama di seluruh dunia mengalami tekanan. Hari Toleransi Internasional setiap tanggal 16 November yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berangkat dari kenyataan bahwa sikap intoleransi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama, adalah ancaman yang harus disikapi bersama oleh komunitas global.

“Banyak negara, termasuk negara-negara maju di Eropa, masing-masing pernah mengalami masa di mana kekerasan atas nama agama menjadi bagian dari sejarah kelam. Karena itu, sangat penting untuk senantiasa mengampanyekan sikap toleransi yang juga dibarengi dengan moderasi dalam kehidupan beragama,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini bersyukur di Indonesia nilai toleransi beragama dan politik masih cukup tinggi. Jajak Pendapat Litbang Kompas dalam rangka Hari Toleransi Internasional 16 November 2022 melaporkan, 72,6% responden menilai masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi.

“Meski begitu kita tidak boleh lengah. Tantangan untuk menjaga nilai toleransi tidak ringan, terutama toleransi beragama dan toleransi politik yang senantiasa berpotensi menggerus kohesi kebangsaan kita. Karena itu, dalam Mukernas BEM PTNU Se-Nusantara nanti, perlu ditegaskan agar generasi muda bangsa bisa senantiasa menjunjung tinggi toleransi dalam setiap sektor kehidupan,” pungkas Bamsoet. □



## Kunjungan Pelajar SMA Negeri 28 Jakarta

# “Jangan Pernah Berhenti untuk Bermimpi”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ESEMPATAN para pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi kini semakin terbuka. Bukan hanya bagi pelajar di kota besar dan dari keluarga mampu saja, tetapi pelajar yang berasal dari daerah terpencil dan dari keluarga kurang mampu pun memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kesempatan para pelajar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa terjadi karena pemerintah memberikan

bantuan beasiswa. Pemerintah juga membantu para mahasiswa melakukan penelitian agar mereka cepat menyelesaikan sarjananya. Penyelesaian studi tidak akan terbengkalai karena alasan tidak memiliki dana untuk melakukan penelitian.

“Jumlah beasiswa yang diberikan kepada para pelajar itu terus bertambah. Itu artinya kesempatan bagi pelajar di daerah terpencil dan dari keluarga tak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga tetap terbuka. Karena itu jangan

pernah berhenti untuk bermimpi untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Anggota Badan Pengkajian MPR RI Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

Pernyataan itu disampaikan Andi Yuliani Paris saat menerima kunjungan, sekaligus penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pelajar SMA Negeri 28 Jakarta. Pertemuan itu berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (8/2/2023). Rombongan pelajar SMA Negeri 28 dipimpin Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Drs. Maryono.

Semakin besarnya kesempatan para pelajar, khususnya dari daerah terpencil maupun dari keluarga kurang mampu, menempuh pendidikan tinggi, menurut politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN), ini sesuai amanat UUD NRI tahun 1945. Karena, baik dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 maupun Pasal 28C, negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Saya di dapil Sulsel II sudah sering mendorong dan memfasilitasi para pelajar serta mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya juga mendorong pemasangan listrik di rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Dan, memasang internet di SMA yang belum memiliki jaringan. Semua itu mendapat respon yang sangat antusias dari masyarakat,” kata Andi Yuliani lagi.

Pada kesempatan itu, Andi Yuliani mengingatkan perlunya pelajar, terutama yang sudah memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024. Karena itu, jauh-jauh hari para pelajar juga harus mengenali calon-calon anggota DPR yang akan bertarung pada pemilu nanti. Ini penting agar pemilihan terhadap para calon didasari dengan alasan yang benar. Bukan seperti memilih kucing dalam karung.

“Para pelajar juga harus berani belajar tentang politik. Apalagi yang bercita-cita jadi politikus. Bagaimanapun, generasi muda adalah pemimpin masa depan. Dan, itu sudah bisa dipelajari sejak dini, mulai dari sekarang,” pungkasnya. □



MBO

## Diskusi Empat Pilar Keberlangsungan IKN

# PPHN Bisa Memastikan Keberlanjutan Pembangunan IKN

Keberlanjutan proyek atau program pembangunan itu harus pasti, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**NGGOTA MPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Fauzy, SE, mengatakan, untuk keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara maka perlu diikat dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN ini bisa menjawab keraguan pada masyarakat maupun investor terhadap regulasi yang memberikan jaminan kepastian keberlanjutan proyek atau program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi. Kalau bicara apakah pembangunan IKN bisa atau tidak bisa dilanjutkan? Dalam politik tidak ada sesuatu

yang tidak bisa. Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu, perlu dicari kunci penutupnya sehingga kebijakan (pembangunan IKN) itu tidak bisa lagi diutak-atik. Salah satunya melalui PPHN,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema: “Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara” di Media Center MPR/DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Turut menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI adalah Sekretaris Otorita Ibu Kota

Nusantara, Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H., LL.M.; Jubir PKB Mikhael Benjamin Sinaga; dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari, SH., MH., LL.M.

Fauzi mengakui kadang-kadang muncul ego pada suatu rezim. Rezim pemerintahan berikutnya karena bukan berasal dari rezim yang lama, dengan egonya bisa menjalankan kebijakan yang berbeda dengan rezim sebelumnya. “Dalam hal IKN, ego rezim itu harus ditekan. Karena program pembangunan IKN bukanlah atas nama atau kehendak pribadi seorang presiden, tetapi merupakan produk pemerintahan. Karena itu, program pembangunan IKN harus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ditindaklanjuti, siapapun rezim pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Meski demikian, Fauzi berpandangan, segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi. “Kalau bicara apakah bisa atau tidak bisa, dalam politik tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Semua kemungkinan bisa terjadi. Saya katakan politisi pandai sekali mengutak-atik. Karena itu, perlu dicari kunci penutupnya sehingga kebijakan itu tidak bisa lagi diutak-atik. Salah satunya, melalui PPHN,” tegasnya.

MPR saat ini masih memproses penyusunan PPHN. Yang masih menjadi

persoalan adalah payung hukum PPHN, apakah dimasukkan dalam UUD atau dalam bentuk Ketetapan MPR, artinya melalui amandemen UUD, atau melalui jalan non-amandemen, yaitu melalui UU atau konvensi ketatanegaraan.

“PPHN ini harus dibuat ketika negara dalam suasana sejuk. Bila dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden maka penyusunan PPHN akan dilihat dari sudut pandang politik. Mudah-mudahan setelah 2024 kita bisa melanjutkan pembahasan PPHN,” ujarnya.

Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka

Santos Adiwijaya, juga mengakui pihaknya sering mendapatkan pertanyaan dari masyarakat maupun investor, yaitu bagaimana keberlanjutan pembangunan IKN setelah Pemilu 2024. “Karena itu, perkembangan dan dinamika politik satu dan dua tahun ke depan mendapat perhatian. Tapi, kalau kita sudah memahami bahwa pembangunan IKN ini adalah amanat undang-undang, yaitu UU No. 3 Tahun 2022, maka siapapun presidennya harus menjalankan undang-undang itu. Kecuali jika tidak mau melanjutkan pembangunan IKN maka UU itu harus diubah. Bila tidak direvisi maka bisa dikatakan melanggar UU,” jelasnya.

Menurut Achmad Jaka, untuk membangun sebuah negara memang perlu haluan. Landasan utamanya adalah UUD NRI Tahun 1945. “Inilah kesempatan kita membangun ibu kota negara dengan konsep yang utuh sebagai sebuah ibukota negara. Untuk mewujudkannya perlu proses yang panjang, dan dimasukkan dalam haluan negara untuk membuktikan kita bisa membangun secara berkesinambungan. Kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar memiliki ibu kota negara yang kita banggakan,” katanya.

Sementara itu, Feri Amsari berpendapat, dengan mengacu pada UU maka keberlanjutan proyek pembangunan IKN tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan, tanpa PPHN pun, proyek pembangunan IKN tetap berlanjut. “UU No. 25 Tahun 2004 jauh lebih presisi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari satu pemerintah ke pemerintah berikutnya. PPHN sebenarnya gagasan yang secara teknis telah diterjemahkan lebih detail dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” paparnya.

Feri Amsari menambahkan, kekhawatiran yang ada bukan akan menghentikan proyek mercusuar dan multiyear IKN melainkan ada yang “merekoki” persoalan teknis dengan mengungkit kasus-kasus korupsi dalam proyek atau program pembangunan IKN. “Seringkali nanti korupsi menjadi alat untuk menilai sebuah proyek atau program pembangunan itu benar atau tidak benar. Padahal keberlanjutan proyek atau program pembangunan itu harus pasti, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang,” katanya. □







## Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Rejonegoro

# Fadel Muhammad: Empat Pilar MPR Penjaga Eksistensi Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara besar di dunia. Berbeda dengan negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat, Cina dan India, Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yakni Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan ras yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil.

Selain itu, Indonesia juga sangat kaya akan budaya, agama, adat istiadat. Perbedaan yang besar ini tentu saja harus diikat oleh satu kekuatan yang mempersatukan, yaitu Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka

Tunggal Ika). “Empat Pilar adalah penjaga eksistensi bangsa Indonesia agar tetap utuh dari ancaman perpecahan,” katanya

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini, saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ahad (5/3/2023).

Acara yang digelar di Balai Desa Rejonegoro ini dihadiri oleh Hana Hasanah Fadel Muhammad; Staf Khusus Hasan Shahab; Kepala Desa Rejonegoro, Yamin Hunowu; dan masyarakat sekitar sebagai peserta.

Ditegaskan Fadel Muhammad, tanpa

Empat Pilar sangat tidak mudah menjaga bangsa sebesar Indonesia. Sebab, segala macam tantangan dan masalah, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu mewarnai perjalanan bangsa ini sejak era kemerdekaan hingga saat ini.

“Untuk itulah kami Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 9 orang perwakilan partai-partai dan satu orang yaitu saya sendiri perwakilan DPD, sangat gencar melakukan tugas melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh elemen bangsa sampai ke pelosok daerah hingga desa, seperti Desa Rejonegoro ini. Karena, kami melihat hal itu sangatlah penting,” ujar anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini menjelaskan pentingnya Empat Pilar disosialisasikan, salah satunya adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Tanpa ideologi, seperti manusia hanya tubuh tanpa roh. Selain Pancasila, ada UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi negara Indonesia. UUD adalah pegangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Seluruh peraturan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, seperti undang-undang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Ketika semua peraturan sudah sesuai dengan UUD, maka kehidupan akan berlangsung damai, teratur untuk menuju cita-cita bersama, yakni kesejahteraan untuk semua,” terang Fadel Muhammad.

Di akhir sesi, Fadel Muhammad memberikan apresiasinya kepada masyarakat Gorontalo yang sangat antusias datang menjadi peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR. “Antusiasme rakyat memacu semangat dan menjadi motivasi buat kami. Sepulang dari acara ini, mulailah mempelajari Empat Pilar, lalu implementasikan semua nilai-nilainya untuk diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat,” tandasnya. □



Sarasehan Nasional Pengentasan Buta Aksara Alqur'an.

# Yandri: Dari Gedung Parlemen Kita Gaungkan Pemberantasan Buta Aksara Alqur'an

**R**ATUSAN penggiat Lembaga Pembinaan Literasi Quran (LPLQ) yang datang dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jambi, Bengkulu dan daerah lainnya, pada Ahad, 5 Maret 2023, memenuhi Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Kehadiran mereka sejak pukul 09.00 WIB di komplek parlemen itu mengikuti berbagai macam acara, yakni Sarasehan Nasional Pengentasan Buta Aksara Qur'an Nasional, Pengukuhan Pengurus DPP LPLQ Periode 2023 – 2028, dan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR.

Di tengah ratusan penggiat LPLQ hadir Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto S.Pt., Menteri Perdagangan Dr (HC) Zulkifli Hasan SE., MM., Ketua Umum LPLQ H. Fatholbaary Sitepu SH., dan Sekjen LPLQ Sugiharto Parikesit SH.

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, yang juga Ketua Dewan Pembina LPLQ, mengucapkan selamat datang kepada peserta yang mengikuti berbagai kegiatan di Komplek Parlemen. "Saya haqul yakin masih banyak peserta yang baru kali pertama



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

datang ke sini," ujarnya. "Alhamdulillah hari ini bisa merasakan suasana kompleks parlemen," tambahnya.

Selanjutnya, pria asal Bengkulu itu menjelaskan bahwa dari gedung milik rakyat inilah lahir kebijakan-kebijakan pro umat. "Salah satunya saat ini kita tengah memuliakan Alqur'an," tuturnya.

Berkhidmat pada kegiatan ini, menurut

Yandri, sebagai ladang amal yang baik. "Kita berkhidmat memberantas buta huruf Alqur'an," ujarnya. Yandri haqul yakin siapapu yang menjaga Alquran, insya Allah akan dijaga oleh Allah. "Siapapun yang memuliakan Alqur'an pasti akan dimuliakan oleh Allah," tuturnya. Untuk itu, Yandri mengucapkan selamat kepada pengurus LPLQ yang baru saja dilantik, dan dia berharap pengurus baru bekerja dengan sungguh-sungguh.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendukung dan menginisiasi acara itu, sebab saat ini 72% umat Islam di Indonesia masih mengalami buta aksara Alquran. "Ini sungguh mengkhawatirkan. Bayangkan umat Islam yang mayoritas di Indonesia mengalami persoalan serius seperti ini," paparnya.

Dengan dilantikannya DPP LPLQ, dia berharap kepada semua pihak, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menyambut gerakan ini. Ini penting, karena bila tidak didukung maka gerakan yang ada akan susah berjalan. Buta aksara yang mencapai 72% diakui sangat tinggi. Artinya dua pertiga umat Islam tidak bisa baca Alqur'an.

Menurut Yandri Susanto, bila umat Islam tidak paham dan tidak bisa membaca Alqur'an bagaimana mereka bisa mengerti kitab sucinya. "Sejatinya orang Islam wajib atau fardu ain bisa membaca Al Qur'an," tegasnya. "Untuk itu, kita gaungkan dari Gedung MPR/DPR pemberantasan buta aksara Al Qur'an," tambahnya. Dirinya berharap, gerakan itu akan berjalan di seluruh pelosok tanah air.

Untuk melakukan gerakan pemberantasan buta aksara, LPLQ melatih penggiat organisasi dengan metode khusus di mana orang bisa cepat membaca Alqur'an. "Kita cetak buku panduan yang gampang dipahami," tuturnya. Dan, buku itu kelak akan disebar ke seluruh Indonesia, sehingga gerakan ini benar-benar terasa sampai ke bawah. □



## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Permahi

# Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembangunan dan Penguatan Sistem Hukum Nasional

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, salah satu tantangan kebangsaan yang saat ini masih dihadapi bangsa Indonesia adalah belum optimalnya penegakan hukum. Berdasarkan data World Justice Project yang dirilis pada bulan Oktober 2022, indeks negara hukum Indonesia memiliki skor 0,53, atau 'hanya' meningkat 0,01 poin selama kurun waktu tujuh tahun, dari tahun 2015 dengan skor 0,52.

Selain itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari 2022 mencatat bahwa 33,7% responden menyatakan, penegakan hukum di Indonesia 'buruk' atau 'sangat buruk'. Angka ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Indikator pada Agustus 2022 yang mencatat bahwa 37,7% responden menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai 'buruk' atau 'sangat buruk'.

"Tantangan kebangsaan di bidang hukum tersebut semakin menyadarkan kita akan urgensi untuk menghadirkan hukum yang berkeadilan di tanah air. Hukum harus menjadi common platform, menjadi kesepakatan dan komitmen kolektif, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat selaku subyek hukum, tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali," ujar Bamsoet dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) secara daring di Wisma Kopo Puncak, Bogor Jawa Barat, Senin (6/3/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, untuk itu perlu dilakukan pembaruan hukum yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Saat ini, penerapan e-court dan e-litigation, atau persidangan secara elektronik, sudah tidak lagi menjadi 'barang baru'. Selain itu, ada pula aplikasi smart contract, di mana perjanjian kontrak secara elektronik dilakukan dalam sistem basis data block chain, yang menjalankan klausul kontrak secara otomatis.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kelahiran produk kecerdasan buatan (artificial intelligence) di bidang hukum bernama COIN (Contract Intelligence) yang memiliki kemampuan menganalisa perjanjian kredit dalam waktu yang singkat, dan dengan tingkat akurasi yang optimal, juga turut menandai era di mana teknologi robotik telah menyentuh ranah hukum.

"Aplikasi teknologi dalam ranah hukum tersebut, harus disikapi dengan bijaksana oleh segenap insan hukum. Karena secanggih apapun teknologi robotik, tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggantikan peran sumber daya manusia. Baik dari aspek profesionalisme, dedikasi, kemampuan negosiasi, kebijaksanaan dalam pengambilan putusan, serta sentuhan nilai-nilai kemanusiaan yang semuanya itu tidak akan mungkin tergantikan oleh kecerdasan buatan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indone-

sia ini menerangkan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembangunan hukum dalam konteks Indonesia Emas 2045. Salah satu pilar pembangunan Indonesia Emas 2045, adalah pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, di mana salah satu unsur penopangnya adalah pembangunan dan penguatan sistem hukum nasional.

"Visi Indonesia Emas 2025 merekomendasikan bahwa pembangunan hukum diarahkan bagi terwujudnya masyarakat berbudaya hukum, melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045 diharapkan hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional," urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini memaparkan, kebutuhan hukum masyarakat akan selalu mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Karena itu, produk-produk hukum warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari ratusan tahun, tentunya perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Salah satunya dengan disahkannya RUU KUHP menjadi Undang-Undang pada tanggal 6 Desember 2022. Selain menggantikan regulasi yang telah usang, Undang-Undang KUHP ini juga mengharmonisasikan seluruh undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.

"Di sisi lain, kita juga harus membuka diri bagi hadirnya masukan dan aspirasi dari segenap elemen masyarakat, terkait UU KUHP yang telah disahkan tersebut. Berbagai masukan dan aspirasi tersebut, tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian, atau bahkan perubahan parsial, dalam proses transisi sebelum pemberlakuan UU KUHP tiga tahun lagi," pungkas Bamsoet. □

## Lahan Milik MPR Dipinjampakaikan untuk SD Negeri Cilandak Barat 03 Pagi

**S**EKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR RI, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., bersama Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, M.Pd., melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN) Setjen MPR berupa tanah di SD Negeri Cilandak Barat 03 Pagi, Kompleks MPR, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Ikut menyaksikan penandatanganan tersebut, Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., beberapa pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Setjen MPR, Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, serta Kepala Sekolah dan para guru SD Negeri Cilandak Barat 03 Pagi.

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono menyampaikan beberapa hal. *Pertama*, memberikan penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta dan para guru—baik langsung maupun tidak langsung—sangat merasakan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), di lingkungan SD Negeri Cilandak Barat 03 khususnya, dan bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan umumnya.

*Kedua*, penandatanganan perjanjian pinjam pakai tersebut adalah bagian dari kepedulian dan tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab konstitusi, tetapi tanggung jawab moral sebagai anak bangsa,

untuk menjadikan pendidikan sesuatu yang terdepan, diutamakan. Sehingga, sumber daya manusia yang unggul terus tercipta, tidak terputus karena terjaga kontinuitasnya

Kemudian, ketiga, Ma'ruf Cahyono berharap, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya untuk tetap menjaga sinergitas serta kolaborasi antara Setjen MPR dan Pemprov DKI Jakarta. "Sebab, kita punya tanggung jawab yang sama terkait BMN ini. Selanjutnya, saya harap agar menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut, sehingga tetap dan terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar," ujar Ma'ruf Cahyono.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili Pemprov DKI Jakarta, Nahdiana menyampaikan apresiasi kepada Setjen MPR yang bersedia meminjamkaikan asetnya, berupa tanah untuk sarana pendidikan di wilayah DKI Jakarta.

"Dalam perjalanan waktu, memang pertumbuhan penduduk Jakarta tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, termasuk sekolah dasar (SD). Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan pinjam pakai lahan, seperti dengan Setjen MPR ini. Sekali lagi terima kasih. Ini membuktikan telah terjadi sinergitas yang baik antara Setjen MPR dan Pemprov DKI Jakarta," tandas Nahdiana. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Patung Bung Karno di Kompleks Gedung Parlemen



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**OMPLEKS Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kini makin menampakkan sisi historikalnya, dengan di tempatkannya patung seorang tokoh besar, yaitu Bapak Proklamator dan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno atau Bung Karno.

Posisi patung terletak di tengah taman bunga, persis di depan Gedung Nusantara III. Patung Bung Karno dalam posisi berdiri tegak, tangan kanan di angkat ke atas seperti memberi salam dan tangan kiri tegap memegang tingkat komando.

Di bawah kaki patung, ada prasasti bertuliskan teks pidato Bung Karno pada 1 September 1945 berbunyi: 'Aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan, membuka lebar kelima jarinya, sebagai pencerminan lima dasar negara dan meneriakkan, Merdeka' (Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia). □

DER

## Tim Sepak Bola Setjen MPR Berlaga di Turnamen Gerindra Cup 2023

**T**IM Persatuan Sepakbola (PS) Setjen MPR mengikuti Turnamen Sepakbola Gerindra Cup 2023 yang digelar di lapangan Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Januari 2023. Turnamen Sepakbola Gerindra Cup 2023 ini merupakan rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra.

Ketua Pelaksana HUT ke-15 Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, menyebutkan, peserta yang ambil bagian dalam turnamen sepakbola ini mencapai 27 tim. Peserta terdiri dari tim kesebelasan dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, termasuk sayap-sayap partai, pegawai DPR RI, dan cleaning service.

Dalam pertandingan ini, PS Setjen MPR memang tidak bisa berhasil menempati posisi teratas atau meraih posisi juara pertama, namun dari sudut skill bermain, para skuad PS Setjen MPR boleh dikata cukup baik alias tidak terlalu jelek. □



DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Taufik Basari, SH, LLM, Ketua Fraksi Nasdem MPR RI

## Putusan PN Jakpus Tidak Masuk Akal

**P**UTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan pelaksanaan dan mengulang tahapan Pemilu 2024 memicu polemik, perdebatan, dan kontroversi. Putusan PN Jakpus itu berawal dari gugatan Partai Prima terhadap KPU secara perdata. Gugatan perdata itu teregister dengan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima mengajukan gugatan perdata karena merasa dirugikan KPU yang tak meloloskan partai tersebut dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Dalam sidang putusan pada Kamis (2/3/2023), Majelis Hakim PN Jakpus (T. Oyong sebagai ketua majelis hakim, dengan anggota majelis hakim Bakri dan Dominggus Silaban) yang menangani perkara itu menerima gugatan Partai Prima. Dalam salah satu poin amar putusan (petitum kelima), disebutkan PN Jakpus meminta KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan KPU melaksanakan tahapan pemilu dari awal

selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Jika dikalkulasi, berarti KPU harus mengulang tahapan pemilu pada 9 Juli 2025 mendatang.

Banyak pihak, mulai dari pengamat politik, ahli hukum tata negara, praktisi, hingga menteri merespons putusan PN Jakpus tersebut. Mereka menyuarakan hal yang sama, yakni menilai putusan itu bertentangan dengan konstitusi. Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari pun mengulas putusan PN Jakpus ini. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat dan pandangan Taufik Basari yang juga anggota Komisi III DPR RI, berikut ini penuturannya.

**Bagaimana Bapak melihat putusan PN Jakpus yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan pemilu dan mengulang dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari, yang diartikan sebagai penundaan Pemilu 2024?**

Saya ingin mendudukan lebih dulu persoalan ini sehingga kita bisa melihat secara komprehensif. Pertama, Partai Prima

mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka mencari keadilan. Untuk mencari keadilan, seseorang akan menggunakan berbagai saluran yang tersedia secara hukum. Kita harus menghormati upaya Partai Prima untuk memperjuangkan hak-nya (mencari keadilan) untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Partai ini mempermasalahkan prosesnya, termasuk Sispol, data, dan sebagainya.

Kedua, Partai Prima menggugat secara perdata dengan menggunakan pasal perbuatan melawan hukum (PMH), dan seterusnya. Yang kita permasalahkan bukan gugatan Partai Prima. Kita tidak mempermasalahkan soal gugatan itu. Tapi, yang kita permasalahkan adalah, amar putusan majelis hakim dan pertimbangan hukumnya. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Kita melihat kenapa kemudian majelis hakim mengabulkan petitum nomor lima yang menghukum KPU untuk menghentikan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

proses tahapan pemilu dan memulai dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kalau saja putusannya hanya memerintahkan KPU untuk memverifikasi ulang, memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk mengajukan kembali data-datanya atau bahkan mungkin membuka data dan seterusnya seperti apa yang diinginkan oleh Partai Prima, tentu tidak pernah menjadi masalah dan tidak muncul pertanyaan-pertanyaan. Pangkal soal adalah amar putusan PN Jakpus yang meminta KPU untuk menghentikan proses tahapan pemilu dan memulai dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Inilah yang menjadi masalah.

**Banyak yang berpendapat bahwa Majelis Hakim PN Jakpus tidak**

**memiliki kewenangan memutus sengketa pemilu. Dengan kata lain, putusan Majelis Hakim PN Jakpus telah melebar kemana-mana sampai pada penundaan Pemilu 2024?**

Soal apakah PN Jakpus berwenang, menurut saya sangat clear. PN Jakpus memang tidak berwenang. Tapi kemudian PN Jakpus dan para majelis hakimnya menyatakan diri berwenang. Mengapa? Karena mereka menganggap penggugat sudah menempuh upaya lain. Penggugat sudah ke Bawaslu, PTUN. Gugatannya tidak diterima karena objeknya adalah berita acara. Sementara menurut PN Jakpus, gugatan ke PN objeknya bukan berita acara, melainkan perbuatan melawan hukum.



Dari kewenangan sebenarnya sudah clear. UU sudah jelas menyatakan bahwa sengketa pemilu dan administrasi pemilu diajukan ke PTUN. Pilihan gugatan perdata memang hak dari penggugat dengan objek perbuatan melawan hukum. Tetapi kembali kepada amar putusan tadi. Untuk perkara perdata maka putusannya mengikat para pihak. Orang yang dirugikan berhak atas penggantian baik material berbentuk uang, bisa berbentuk pemulihan keadaan. Karena itu, anggaplah PN Jakpus berwenang, lalu putusannya adalah memulihkan Partai Prima. Itu tidak menjadi persoalan.

Tetapi, ketika putusan majelis hakim kemudian melebar, sampai ke luar dari konteks perdata berakibat pada penundaan pemilu, ini yang menjadi masalah. Wajar kalau timbul pertanyaan-pertanyaan. Kok sampai segitunya majelis hakim mengabulkan petitum yang meminta agar proses tahapan pemilu ini dihentikan, kemudian dimulai dari awal lagi selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Saya coba pelajari pertimbangan majelis hakim. Ternyata, pertimbangan hukumnya tidak memadai. Majelis hakim hanya menguraikan isi dari gugatan, kemudian membenarkan isi gugatan, tanpa ada landasan-landasan hukumnya yang bisa kita rasionalisasikan sebagai alasan untuk menghentikan tahapan pemilu dan memulai dari awal 2 tahun 4 bulan 7 hari. Bahkan, kita juga bertanya-tanya, mengapa muncul angka 2 tahun 4 bulan 7 hari itu. Memang dalam gugatan disebut tahapan pemilu sejak awal sampai pelantikan totalnya adalah 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Kalau misalnya petitum kelima dari gugatan dikabulkan sebagian dan bentuknya adalah memberikan kesempatan atau memberikan ruang bagi KPU untuk menyusun ulang agenda agar memberikan kesempatan bagi partai yang dirugikan untuk mendapatkan haknya, itu masuk akal. Tetapi ketika kemudian amar putusannya mengulang dari awal, sejak perencanaan sampai pelantikan, itu tidak masuk akal. Baik amarnya maupun pertimbangan hukumnya tidak masuk akal. Wajar saja kalau banyak yang bertanya-tanya, ada apa dan







# Ciptakan Sejarah, Konser Tunggal Pertama Perempuan di GBK

**P**ENYANYI Raisa Andriana menggelar konser bertajuk: 'Raisa Live in Concert' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2023. Ini sejarah baru buat Raisa, karena inilah konser tunggal pertamanya selama menapak karier di dunia musik. Dan, ini pula konser solois pertama dilakukan penyanyi wanita di GBK.

Sambutan penggemar Raisa ternyata luar biasa. Bayangkan, tiga hari menjelang konser, sekitar 30 ribu lembar tiket ludes terjual. "Ini konser luar biasa saya, mudah-mudahan lancar dan diberkahi, menghibur penonton," ujar Raisa, saat *Press Conference* menjelang konser.

Artis penyanyi kelahiran Jakarta, 1990, ini mengaku, sebelum pelaksanaan konser, ia beberapa kali mengunjungi venue di GBK untuk penyesuaian diri. "Ga tau gimana, setelah beberapa kali datang, aku merasa ada relationship dengan GBK ini. Seperti sudah menyatu," ujarnya. □

DER



Raisa Andriana

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Gaya Hana Hasanah Dekat dengan Rakyat

**H**ANA Hasanah Shahab Fadel Muhammad tampak begitu luwes berbaur dengan warga masyarakat, terutama kaum ibu. Saat mendampingi Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, yang tak lain suaminya, melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo, pekan kedua Maret 2023, Hanah Shahab ikut berinteraksi dengan kaum ibu di sana.

Bagi warga masyarakat Gorontalo, sosok perempuan kelahiran Jakarta, 1 September 1969, sudah sangat dikenal. Hanah Shahab mendampingi Fadel Muhammad selama dua periode menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo (2001-2009). Selaku Penggerak PKK Provinsi Gorontalo periode 2001-2009, tentunya dia biasa berbaur dengan ibu-ibu di Provinsi penghasil jagung itu.

Saat berinteraksi dengan kaum ibu di desa, Hanah Shahab menggoda dengan pertanyaan seputar undang-undang. Beberapa ibu tampak gelapan menjawab pertanyaan yang dinilai sulit oleh mereka. Agar ibu-ibu relaks, Hanah Shahab kemudian mengajak kaum ibu bernyanyi saja. Dan, Hanah Shahab pun laut bernyanyiria bersama kaum ibu. □

DER



*Hana Hasanah Shahab*



*Hamka Hendra Noer*

## Deg-degan Didatangi Senior

**P**ENJABAT Gubernur Provinsi Gorontalo, Hamka Hendra Noer, langsung menjabat tangan dan memeluk akrab mantan Gubernur Gorontalo yang sekarang menjabat Pimpinan MPR RI, Prof. Fadel Muhammad. Peristiwa itu terjadi saat Wakil Ketua MPR RI, Prof. Fadel Muhammad, melakukan kunjungan ke kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (8/3/2023).

“Silahkan duduk di sini Prof..,” ujar Hamka mempersilahkan mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu. “Wah..saya duduk di sini saja, di situ kan untuk Gubernur, kita follow protokoler saja,” balas Fadel Muhammad seraya tersenyum. “Iya ..Prof silahkan, wah jadi *deg-degan* nih disambangi senior,” canda Hamka.

Kemudian mereka larut dalam perbincangan, terutama seputar perekonomian dunia, nasional dan daerah. Juga mendiskusikan dua kecamatan di Gorontalo sebagai Kawasan Pangan Nasional. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Pantai Parai Telengria Pacitan Eksotisme Kawasan Pantai di Pusat Kab. Pacitan

**H**ARI masih pagi. Matahari masih bersembunyi di ufuk timur. Tapi, di pagi hari itu, Ahad beberapa pekan lalu, alam kurang bersahabat.

Awan mendung di atas kawasan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, membuat sang mentari lebih lama berada di peraduannya. Meski, cuaca kurang mendukung, itu bukan halangan untuk sebagian warga memulai aktivitasnya.

Itulah yang *Majelis*saksikan di Pantai Parai Telengria Pacitan, Jawa Timur. Di pagi itu, terlihat warga melakukan berbagai aktivitas. Tampak penjaga loket tengah menyapu kawasan pintu utama menuju pantai. Beberapa pedagang juga membuka keda-kedai mereka. Ada yang menyediakan makanan dan minuman, barang souvenir, juga kaos dan celana santai. Yang menarik, rata-rata kedai di sana menyediakan kamar mandi dan toilet untuk membilas sisa air dan pasir laut.

Di tempat parkir terlihat ada lima bus yang tengah menikmati kesejukan suasana pagi. Para penumpangnya sudah berhamburan keluar bus laksana laron di saat hujan. Lima bus itu membawa dua rombongan dari Provinsi Jawa Tengah. Yaitu karyawan restoran Ayam Bebek Goreng (ABG) Buntel

Kremes (Bumes) cabang Karanganyar dan Sragen. Serta rombongan pelajar dari SMP Negeri 3 Satu Atap Ngablak, Magelang, Jawa Tengah.

Merasa datang dari tempat yang jauh mereka tak ingin membuang-buang waktu. Baik karyawan restoran Ayam Bebek Goreng Bumes maupun pelajar SMP Negeri 3 Satu Atap Ngablak tak mau berdiam diri. Mereka mengeksplor seluruh kawasan dengan bermain pasir dan berselfi ria.

Tetapi, mereka tak bisa bebas mandi di laut. Di sepanjang pantai terpasang papan peringatan larangan mandi di laut. Karena ombak di Pantai Parai Telengria tergolong sangat besar dan berbahaya.

Pemandangan lain, selain ramainya mengunjung menikmati keindahan Pantai Telengria, di bagian pantai yang lain terlihat Mulyono (57) tengah memunguti kayu yang terdampar di tepian pantai. Mulyono memunguti kayu tersebut untuk dijadikan





kayu bakar. Hampir setiap hari Mulyono memunguti kayu dari tepi pantai itu. Dan, setiap kali datang, ia mampu memungut kayu hingga memenuhi dua keranjang yang ada di motornya, sehingga sarat dengan kayu.

Bagi warga Pacitan, nama Pantai Teleng Ria bukan sesuatu yang asing. Keberadaan pantai ini tidak jauh dari pusat kota, dan itu membuatnya menjadi tujuan utama wisata di Kota 1001 Goa. Pantai Telengria juga tidak hanya akrab bagi warga Pacitan. Mereka yang kerap singgah di Pacitan, nama Pantai Teleng Ria juga bukanlah nama yang asing. Karena itu tidak jarang jika berkunjung ke Pacitan pada hari libur, merekapun memenuhi lokasi wisata ini.

### Merpati Mengikat Janji

Teleng Ria merupakan pantai yang landai disertai pemandangan indah. Di sana

terdapat beberapa petak hutan pinus yang terdapat beberapa petak hutan pinus yang sangkar burung merpati kipas berbulu putih. Pagi itu terlihat sepasang merpati kipas tengah berasik- masyuk meretas janji setia. Si jantan terus mengikuti kemanapun sang betina berjalan, berlari maupun saat terbang.

Di hutan pinus ini juga disediakan beberapa tempat duduk bagi para pengunjung. Terbayang, saat matahari terik, tempat tersebut menjadi kawasan favorit karena mampu melindungi wisatawan dari sengatan matahari. Bukan itu saja, hutan pinus juga terasa lebih nyaman di banding tempat yang lain, karena ketersediaan oksigen yang berlimpah.

Tempat ini begitu instagramabel, dan sayang untuk dilewatkan. Pemandangan syahdunya menyerupai hutan-hutan pinus berukuran besar. Sangat cocok untuk

dijadikan sebagai tempat foto prewedding, tempat berkumpul, reuni, maupun *garden party*.

Selain itu, ada juga pemandangan yang menjadikan ciri khas bagi Pantai Telengria Pacitan. Yaitu, posisi pantainya yang diapit oleh pegunungan Limo sehingga menyerupai huruf U. Pegunungan Limo berdiri angkuh laksana tembok yang menjulang tinggi. Seolah menjadi pintu gerbang raksasa dari laut menuju ke pantai.

Karena posisinya berada di teluk, Telengria kerap menjadi kawasan para pelaut untuk melempar jangkar. Sembari beristirahat mereka menunggu ombak tenang, sebelum melanjutkan perjalanan. Suasana tersebut memberikan pemandangan menarik tersendiri. Mulai dari dini hari hingga pagi menjelang siang.

Sebelum tiba di bibir pantai, pengunjung harus terlebih dahulu melewati padang rumput, yang terhampar laksana permadani hijau. Semua itu menambah keelokan panorama di Telengria. Dan, semakin memacu minat pengunjung untuk segera bermain pasir maupun membasuh muka di pantai Telengria.

Meski ada banyak papan larangan berenang, tapi bagi pecinta surfing, Telengria adalah pilihan yang cerdas. Apalagi bagi para pemula dan mereka yang baru memulai menekuni olahraga ekstrim tersebut. Di sini disediakan persewaan papan surfing sekaligus pelatihnya.

Selain sebagai obyek wisata, kawasan Telengria juga dekat dengan tempat pelelangan ikan (TPI). Sebagian pengunjung kerap memanfaatkan situasi tersebut untuk membeli ikan segar yang baru di tangkap oleh para nelayan. Praktis, tempat ini menjadi kawasan yang ideal untuk dikunjungi, baik dalam kelompok kecil maupun rombongan. □

MBO

Hj. Sri Wulan, SE., MM.

# Memilih Jalan Politik yang Tenang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**C**ITA-CITANYA adalah menjadi peternak, sebagaimana ayahnya. Memiliki sapi dalam jumlah banyak di atas lahan yang luas. Kemudian ia tinggal di sana, sembari mengawasi hewan ternak dan hamparan sawah luas yang ada di sekelilingnya. Nyatanya, keinginan itu tidak pernah tercapai. Ia bukan menjadi penggembala ratusan sapi, seperti yang pernah diinginkan dan bayangkan. Tetapi ia malah menjadi seorang tokoh dari banyak warga, khususnya daerah pemilihan Jawa Tengah III, meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang.

Anehnya, keberhasilan itu tidak pernah dia cita-citakan. Mulanya, ia hanya asal-asalan mengiyakan ajakan temannya, sekedar memenuhi 30% kuota perempuan pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dan, saat namanya benar-benar muncul di Daftar Calon Anggota Legislatif, ia pun baru tersadar.

"Setelah yakin nama saya ada di sana, saya baru minta pendapat keluarga. Ternyata, mereka tidak keberatan dan malah mendukung serta mendoakan agar saya berhasil. Di luar espektasi, ternyata saya bisa terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014 dari Partai Gerindra," kata Hj. Sri Wulan, SE., MM., yang kini anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) MPR RI kepada Majalah *Majelis* saat menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sukses menjadi anggota DPRD Jawa Tengah pada periode pertamanya ikut kontestasi Pileg dari Partai Gerindra, lalu pada Pemilu 2014 Sri Wulan naik kelas. Ia dipercaya Partai Gerindra memperebutkan kursi DPR pusat. Lagi-lagi hasilnya mencengangkan. Ia mampu bersaing dengan sejumlah kontestan yang lebih senior, dan membuatnya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk masa bakti 2014-2019.

Tetapi, di tengah jalan, tepatnya pada 2018, Sri Wulan atau nama Dewi Padi dalam kamus Jawa itu memilih berpisah dengan partai yang sudah membesarkan namanya. Ia kemudian menyeberang ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dan, dia punya alasan untuk pindah perahu.

"Saya mencari jalan hidup yang lebih bahagia, tenang, tanpa beban dan bisa selalu menambah energi, dan itu saya temukan di Nasdem. Di Nasdem saya merasa lebih nyaman dan bisa lebih menikmati arti kehidupan yang saya jalani," kata alumni Magister Jurusan Manajemen pada Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang.

## Menimbang Gula

Sebagai anggota legislatif, sebagian kehidupan perempuan berhijab kelahiran Pati, 8 April atau Jumat 18 Pon 1977, ini tidak



banyak berubah. Ia menjadi sosok yang tetap dekat dengan masyarakat. Terlebih dengan kader, simpatisan, dan pendukungnya. Hampir setiap minggu, Wulan selalu pulang ke dapilnya. Bila ada satu minggu yang terlewat, rasa kangennya kepada masyarakat seketika muncul. Dan, itu membuatnya bergegas untuk kembali ke dapil.

Bagi Wulan, bisa turun ke masyarakat adalah kebahagiaan tersendiri. Berbincang dengan bahasan dan bahasa yang sederhana merupakan hiburan tersendiri. Bahkan, ia kerap merasa bahagia jika mendengar celoteh masyarakat, terlebih bisa membantu mereka

meringankan beban yang menghimpit. Seperti, mengantar masyarakat ke rumah sakit. Atau mengurus BPJS Kesehatan yang bermasalah.

“Saya selalu rindu melihat wajah bahagia masyarakat saat menerima bantuan yang saya serahkan. Cerita mereka menghibur saya, dan sebagai wakil mereka, saya merasa perlu untuk selalu bergaul dan kebersamaan masyarakat,” kata anak pertama empat bersaudara pasangan Sutomo dan Titik.

Setiap kali berada di dapil, Wulan menjalani hidup layaknya masyarakat Pati pada umumnya. Termasuk bila ada undangan atau pertemuan resmi. Dia sering bertemu teman dan tetangga, termasuk



kawan sekolah dan kuliah. Saat bersua dengan aparat pemerintah daerah hingga desa, Wulan menerima kehadiran mereka, seperti saudara sendiri yang sudah lama tidak bertemu.

Ibu tiga anak ini juga masih sering mengisi waktu luangnya dengan hobi menantang alam. Mengendarai mobil *off road*, menjelajah kawasan yang masih perawan maupun lingkungan pedesaan yang bersahaja. Bahkan, Wulan juga kerap membantu ibunya, seorang pedagang kelontong. Karena itu, tak perlu heran saat melihatnya tengah menjaga toko. Atau menakar gula dan menimbang beras.

Karena itu, ketika para anggota dewan sibuk berusaha mendekati konsituen jelang Pemilu 2024, seperti yang terjadi sekarang, Wulan malah bimbang. Ia tidak tahu, harus berapa sering menambah jumlah pertemuannya dengan masyarakat. Ia tidak ingin memaksakan hasrat, kecuali menjaga dan mempertahankan apa yang sudah dilakukan selama ini.

“Pokoknya kita bismillah saja. Selalu menanamkan dalam diri dan pikiran bahwa saya harus optimal. Saya berfikir menanam baik pasti memetik baik. Tinggal *maintenance* semuanya. Saya merasakan ruangan saya ruangan mereka juga, senang susah saya, senang susah mereka juga,” kata Wulan lagi.

### **Hidup Selalu Berputar**

Banyak pertanyaan yang sering disampaikan masyarakat kepada wakilnya di DPR. Begitupun yang ditemui Sri Wulan di daerah pemilihannya. Terlebih jika ada berita-berita viral yang terjadi Jakarta. Atau peristiwa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya, ketika heboh berita kenaikan biaya haji yang disampaikan Menteri Agama beberapa waktu lalu.

Menteri Agama kala itu mengatakan bahwa Ibadah Haji tahun 2023 berpotensi naik mencapai Rp 69 juta, itu mendapat perhatian sangat besar. Banyak anggota masyarakat yang mencoba mencari informasi, terlebih karena mereka juga tahu kalau Sri Wulan adalah anggota Komisi VIII DPR RI, salah satunya membidangi masalah agama dan sosial.

“Waktu itu saya pastikan bahwa Rp. 69 juta adalah usulan pemerintah. DPR, khususnya Fraksi Nasdem, tidak akan memenuhi usulan tersebut. Dan, sekarang terbukti benar, meski tetap naik

namun jumlahnya tidak sebesar yang diminta Menteri Agama. Atau naik Rp 10 juta dari tahun 2022, menjadi Rp 49 juta,” kata Wulan mengisahkan.

Menyangkut demo Kepala Desa dan Aparatur Desa ke Jakarta menuntut perpanjangan masa jabatan, menurut Wulan, adalah sesuatu yang wajar. Peralnya, bagi kepala desa 2-3 tahun pertama merupakan masa penyesuaian. Padahal, tahun berikutnya mereka sudah harus bersiap mengikuti pilkada lagi. Jadi memang wajar jika diberikan perpanjangan masa jabatan.

“Ada masuk akal juga, jika kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan. Tetapi semua bergantung orangnya,” kata Wulan lagi.

Sri Wulan sendiri termasuk orang yang beruntung dalam menjalani hidupnya. Ia berasal dari keluarga yang rukun dan berkecukupan. Sejak kecil hingga usianya sekarang, Wulan tidak pernah merasakan kekhawatiran tidak bisa membayar uang sekolah, seperti halnya anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung. Ia juga tidak pernah merasa khawatir karena rumahnya bocor atau berebut kasih sayang dengan saudara-saudaranya.

Dari ayahnya Wulan belajar menjadi pribadi yang mandiri dan







bertanggung jawab. Ayahnya sering mengajaknya keliling desa, melihat sawah dan sapi. Dengan ayahnya, ia juga kerap bertemu petani dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan cara itu, bapaknya menanamkan kesadaran bahwa hidup tak selamanya harus melihat ke atas. Kadang juga perlu melihat ke bawah, agar tidak sombong dan tetap bersahaja.

Sedangkan dari ibunya, Sri Wulan mencoba memahami dan selalu mensyukuri setiap keuntungan, betapapun kecilnya. Dari ibunya dia dibuat sadar bahwa hidup selalu berputar, kadang di bawah lain waktu di atas. Karena itu, semua harus disyukuri, apapun yang diperolehnya hari ini.

“Aku hanya berfikir akan meneruskan usaha bapak, dipeternakan. Tetapi Tuhan memberi jalan lain. Saya sudah belajar dengan keras, melakukan hal-hal yang tak terbayangkan, termasuk soal partai

dan bertemu konsituen. Alhamdulillah, sejak 2009 selalu menang. Kini saya harus banyak berterima kasih kepada masyarakat yang sudah percaya sejauh ini,” pungkas Wulan. □

MBO

## Biodata

Nama : **Hj. Sri Wulan, SE., MM.**  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pati, 8 April 1977  
 Agama : Islam  
 Status : Menikah (3 anak)

### Pendidikan:

- D3 Manajmen Universitas Islam Indonesia 1997 Yogyakarta
- S1 Manajemen Universitas Islam Indonesia 2011 Yogyakarta
- S2 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang

### Riwayat Pekerjaan:

- Wiraswasta peternakan sapi dan kambing, 2001 - sekarang
- Anggota DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi Partai Gerindra 2009 - 2014
- Anggota DPR RI Dapil Jateng III dari Partai Gerindra 2014 - 2018
- Anggota DPR RI Dapil Jateng III Partai NasDem 2019 - 2024

### Riwayat Organisasi:

1. Kader di Partai Gerindra (2009 – 2018)
2. DPD Partai Gerindra sebagai Bendahara I (2009 – 2012)
3. Pengurus DPP Partai Gerindra Bidang Peternakan (2014 – 2018)
7. Penasihat Sahabat Wulan dapil Jateng III (2013 – sekarang)
8. Bendahara Umum Ikatan Keluarga Kab. Pati di Jakarta (2015 – sekarang)
9. Bendahara Umum Purna Jambore Nasional 92 (2015 – sekarang)
10. Pelindung Paseduluran Rantau Nusantara, Grobogan (2001 – sekarang)
11. Anggota Kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) (2018 – sekarang)
12. Wakil Bendahara Fraksi Partai Nasdem (2022 – sekarang)



Oleh:  
**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI



## Dunia Tanpa Diskriminasi untuk Masa Depan Lebih Baik

**F**ORUM Woman 20 (W20), yang merupakan Engagement Group G20 dalam membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G20 dalam isu perempuan sukses menjalankan misinya dengan memasukkan sejumlah komitmen tentang pemberdayaan perempuan yang disepakati negara-negara G20 dalam KTT G20 di Bali, November lalu.

Dalam rangkaian forum itu slogan W20 Recover Together, Equally menjadi seruan untuk terus bergerak dalam kebersamaan secara setara dalam proses pemulihan pascapandemi baik dalam skala lokal maupun global. Karena, hingga saat ini pemberdayaan bagi perempuan di seluruh dunia terus menghadapi hambatan besar, terutama selama pandemi Covid-19.

Per September 2022, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) mengungkapkan data terkait progres pembangunan berkelanjutan yang secara global terdapat 380 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sejumlah 101,3 juta perempuan dan anak perempuan dalam usia produktif hidup tidak punya pilihan untuk menentukan yang terbaik terhadap hidupnya, dan sebesar 54% perempuan hidup dalam situasi krisis serta tidak memiliki pendidikan yang memadai. Bahkan, sebanyak 49% perempuan di kota besar tidak aman keluar pada malam hari.

Kondisi semakin memprihatinkan, sejak akhir tahun 2021, sebanyak 44 juta perempuan dan anak perempuan mengalami perang, konflik, dan kekerasan terhadap hak-hak dasarnya. Berdasarkan kenyataan itu W20 dalam rangkaian KTT G20 di Bali mengedepankan tema: "En Route to Gender Equality for Gender Welfare" yang berkomitmen menjembatani kesenjangan disparitas gender.

Presidensi W20 Indonesia memperkuat isu prioritas dalam bentuk action plan yang memuat 3 isu utama, yaitu: akuntabilitas untuk Implementasi G20 lewat empower KPI (Key Performance Indicators), sebuah dashboard untuk mengukur efektivitas kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Selain itu, peningkatan ketrampilan dan mendorong sektor swasta untuk turut membantu pembiayaan bagi UMKM yang dikelola perempuan

penggerak pertumbuhan ekonomi, dan membangun ketahanan digital dan ketrampilan digital bagi perempuan pelaku UMKM.

Penguatan sejumlah isu itu dilakukan karena perempuan mampu memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Saat ini, tercatat perempuan Indonesia mengelola sebesar 52% dari total 63,9 juta usaha mikro, 56% dari 193 ribu usaha kecil. Perempuan Indonesia juga mengembangkan 34% dari 44 ribu usaha menengah.

Pertemuan W20 melahirkan komunikasi yang meminta agar pemimpin G20 untuk berkomitmen menerapkan roadmap Brisbane target, menciptakan jaringan gender data G20 dan W20 outcome dashboard, serta mengembangkan dan meningkatkan strategi nasional berbasis nilai-nilai kesetaraan gender.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada W20 Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dalam mendukung peran Indonesia sebagai Presidensi G20 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Masuknya delapan paragraf mengenai upaya pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Pimpinan G20 Bali yang terdiri dari 52 paragraf itu, merupakan bukti nyata komitmen G20 terhadap pemberdayaan perempuan. Sejumlah komitmen tentang pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari Deklarasi Pimpinan G20 Bali, antara lain mencakup tentang komitmen untuk menjamin akses pasokan pangan bagi perempuan, penguatan literasi digital, penguatan ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pekerjaan yang layak, integrasi antara perempuan dan penyandang disabilitas.

Kemudian, para pimpinan negara G20 juga mendorong kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dibutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta semua pihak untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Karena apa yang dicapai dalam Forum KTT G20 November lalu bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan ke-5 SDGs untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan demi masa depan dunia yang lebih baik. □

**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



## Buku Menyudahi Masalah

Dirasa masih ada pertentangan antara Islam dan Pancasila membuat Jazilul Fawaid memaparkan solusinya. Solusi tersebut termuat dalam satu buku yang berjudul: *Merawat Tradisi Kebangsaan: Islam dan Pancasila*. Baginya, masalah antara Islam dan Pancasila sudah selesai sehingga tak perlu dipertentangkan lagi.

**M**ENGUPAS hubungan Islam, Pancasila, dan Nasionalis sepertinya merupakan suatu hal yang menarik. Sudah banyak buku, bahkan sejak era Haji Umar Said Cokroaminoto hadir di tengah masyarakat untuk memecahkan masalah, memberi solusi, dan mencari titik temu dan persamaan di antara ketiga bidang tersebut. Salah satu buku yang membedah tema besar yang sepertinya tak akan pernah habis dibahas itu adalah buku karya Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA.

Pria yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR itu memberi judul bukunya: *Merawat Tradisi Kebangsaan: Islam dan Pancasila*. Buku yang diberi kata pengantar oleh Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, Dr. (HC) Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., itu terbagi dalam VII Bab. Dalam bab-bab yang ada dijelaskan tentang apa itu Pancasila, sejarahnya, serta kandungan-kandungannya. Dari penjelasan ini selanjutnya disinggung dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU), syariah, dan kebangsaan.

Hubungan-hubungan tersebut dikatakan dalam sampul belakang buku bahwa antara Islam dan Pancasila selalu menarik. Keduanya mengalami tarik ulur sepanjang zaman. Hal ini terkait dengan ketidakpuasan sebagaimana umat Islam atas tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dianggap langkah yang mengabaikan kesempurnaan agama.

Sebagai Politisi PKB dan warga NU, Jazilul Fawaid mengatakan, organisasinya, NU, sejak awal mengalami kepuasan dan kerelaan atas Pancasila. Dijelaskan, karena NU memahami agama secara substansial bukan doktrin – formalis. Bagi organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asyari itu, Islam tidak harus ditegakkan dalam bentuk doktrinalnya tetapi substansi moralnya. “Jika Pancasila telah memuat substansi – moral dari nilai – nilai Islam maka dasar negara ini dinilai selaras dengan visi agama”, ujar Jazilul Fawaid.

Menurutnya, dengan membaca buku itu maka pembaca akan paham dan tahu tentang dinamika pemikiran NU terkait Pancasila. Buku itu dikatakan untuk meng-counter berbagai upaya delegitimasi Pancasila atas nama Islam. Diakui sejak reformasi yang diiringi dengan menyeruaknya gerakan transnasional Islam, Pancasila

mendapat penentangan kembali oleh ideologi *islamisme* yang tidak mengenal sekat bangsa.

Jazilul Fawaid dalam pengantar buku mengakui bahwa pertentangan antara agama dan negara, Islam dan Pancasila, sudah selesai. *Founding fathers* atau pendiri bangsa, yang bertugas menyusun dasar negara sepakat menjadikan Pancasila sebagai

dasar negara dan ideologi kebangsaan. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas rakyat Indonesia, tercakupi dalam Sila I, yakni *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Kelima sila menurutnya apabila dicermati dengan seksama sejatinya merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang bersifat *rahmatan lil’alamin*, yakni rahmat bagi semesta alam.

Muhaimin Iskandar melihat buku tersebut bukan hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga sangat bermanfaat bagi masyarakat luas karena sangat relevan dengan problematika kebangsaan yang ditandai dengan menggejalanya penguatan politik identitas dengan mempertentangkan antara agama dan negara, termasuk perdebatan mengenai kompatibilitas antara Islam dan Pancasila.

Ditegaskan oleh Muhaimin Iskandar, buku ini jawaban dari hubungan relasional antara Islam dan Pancasila, termasuk kehadiran eksistensi NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dalam memoderasi perbedaan pandangan yang ada. “Buku ini jernih dan lugas menjelaskan hubungan relasional dengan argumentasi dan basis empirik yang kuat”, ujar pria yang akrab dipanggil Gus Ami itu.

Penyusunan buku disebut dilakukan dengan menggunakan alur pikir yang kuat dan sekuens yang logis. Pesan utama yang hendak disampaikan dalam buku yakni kesetaraan antara Islam dan Pancasila yang dipaparkan melalui narasi yang kuat dan pembabakan yang sistematis dalam tiap-tiap bagian buku, mulai dari narasi deskriptif mengenai Islam dan Pancasila dalam taradisi kebangsaan Indonesia, hingga urgensi pengakaran kembali relasi Islam dan Pancasila secara moderat. □



AWG

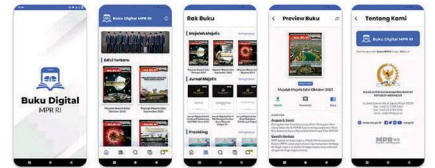


**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT





**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**Buku Digital MPR RI**

**MUDAH DI AKSES**  
**EFEKTIF & EFISIEN**

MAJALAH MAJELIS, JURNAL,  
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN  
MPR RI DALAM GADGET ANDA

MPR.GO.ID @MPRGOID



**“ Segera Unduh Aplikasinya ! ”**

**DI PLAY STORE**  
<http://bit.ly/bukudigitalmpri>